58
B

Sosial

LAPORAN AKHIR
HIBAH PENELITIAN
STRATEGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010

TEMA :
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA

MODEL STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM YANG BERBASIS KEPADA KEPENTINGAN PEREMPUAN PADA KOMUNITAS *SURVIVOR* DI WILAYAH RAWAN BANJIR

Drs. Tri Joko Sri Haryono, MSi
Dr. Toetik Koesbardiati
Yuyun W.I. Surya S.Sos MA
Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional dan Penelitian Multi Tahun Universitas Airlangga Tahun 2010 Nomor : 553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA
OKTOBER, 2010

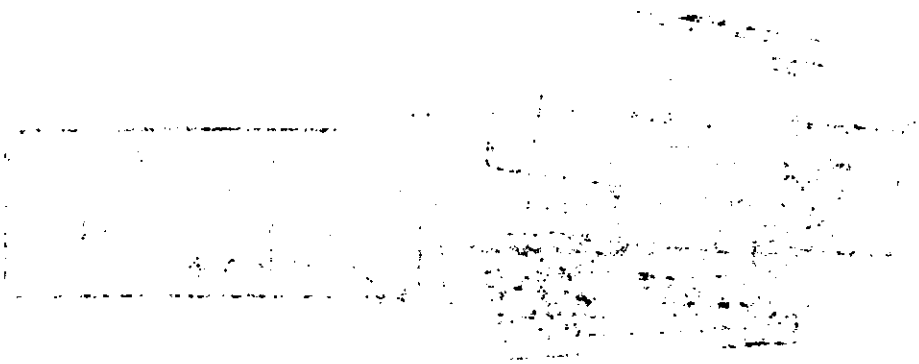

Sosial

LAPORAN AKHIR
HIBAH PENELITIAN
STRATEGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TEMA :
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA

MODEL STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM YANG BERBASIS KEPADA KEPENTINGAN PEREMPUAN PADA KOMUNITAS *SURVIVOR* DI WILAYAH RAWAN BANJIR

Drs. Tri Joko Sri Haryono, MSi
Dr. Toetik Koesbardiati
Yuyun W.I. Surya S.Sos MA
Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional dan Penelitian Multi Tahun Universitas Airlangga Tahun 2010 Nomor : 553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA
OKTOBER, 2010

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **MODEL STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM YANG BERBASIS KEPADA KEPENTINGAN PEREMPUAN PADA KOMUNITAS *SURVIVOR* DI WILAYAH RAWAN BANJIR**

2. Ketua Peneliti :
   a. Nama Lengkap dengan gelar : Drs. Tri Joko Sri Haryono, Msi
   b. Jenis Kelamin : Laki-laki
   c. NIP : 195804211987031003
   d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
   e. Jabatan Struktural : -
   f. Bidang Keahlian : Antropologi
   g. Fakultas/Jurusan/Puslit : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
   h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota Peneliti

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIK	BIDANG KEAHLIAN	FAKULTAS/ JURUSAN	PERGURUAN TINGGI
1	DR. Toetik Koesbardiati	Antropologi Gender	FISIP	Universitas Airlangga
2	Yuyun W.I. Surya S.Sos MA	Komunikasi Gender	FISIP	Universitas Airlangga
3	Sri Endah Kinasih, S.Sos Msi	Antropologi Hukum	FISIP	Universitas Airlangga

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :
   a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : dua tahun
   b. Biaya yang diusulkan : Rp 100.000.000,-
   c. Biaya yang disetujui tahun ke-1 : Rp 55.000.000,-

Surabaya, 15 Oktober 2010

Mengetahui :
Wakil Dekan I FISIP – UNAIR

Prof. Dr. Mustain Mashoed, M.Si
NIP. 196001201986041001

Ketua Pelaksana,

Drs. Tri Joko Sri Haryono, MSi
NIP. 195804211987031003

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr.Djoko Agus Purwanto, Apt.,M.Si.
NIP 195908051987011001

RINGKASAN

MODEL STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM YANG BERBASIS KEPADA KEPENTINGAN PEREMPUAN PADA KOMUNITAS *SURVIVOR* DI WILAYAH RAWAN BANJIR

(Drs. Tri Joko Sri Haryono, MSi, DR. Toetik Koesbardiati,
Yuyun W.I. Surya, S.Sos MA, Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi, 2010, 103 halaman)

Penanganan bencana selalu menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/objek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Program berbasis masyarakat yang mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan resiko bencana yang terjadi di lingkungannya. Program berbasis masyarakat diterapkan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya penanganan dampak bencana dan pengurangan resiko. Namun program ini jarang atau bahkan tidak pernah melibatkan perempuan sebagai korban bencana alam. Dampaknya justru perempuan menjadi korban yang paling menderita saat terjadi bencana banjir. Ketika ada bencana lingkungan banjir seperti di Lamongan dan Bojonegoro ini, perempuan selalu dinomorduakan dalam mendapatkan bantuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk bahan (input) perumusan model strategi mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana alam yang berbasis kepada kepentingan perempuan pada komunitas *survivor* di wilayah rawan banjir Jawa Timur. Melihat bencana alam dari perspektif jender karena perhatian jender dilewatkan atau dilupakan karena dianggap tidak penting. Kesempatan ini untuk mengubah peran tradisional jender dalam situasi bencana, akan sia-sia jika perempuan tidak berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Komunitas *survivor* yang dibentuk untuk kaum perempuan di tingkat masyarakat dan nasional sangatlah penting jika ukuran pemulihan adalah tanggapan terhadap kebutuhan perempuan dan yang berhubungan dengannya

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian : lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Lomongan dan Bojonegoro. Pertimbangan diambil dalam menetapkan dua wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena *pertama*, kedua wilayah ini paling rawan terkena bencana banjir. *Kedua*, kedua wilayah ini paling banyak kerugian materialnya sebesar Rp 211 Milliar dan korban sebanyak 1.631 jiwa menderita. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi pengamatan atau *observation* ; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview.* (3) Studi Pustaka : Informasi yang terkait dengan kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. (4) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik (5) adalah Analisa Data : Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diindentifikasikan berdasarkan tema kemudian dianalisa.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ditingkat manajerial yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda seperti Renstra/Program yang berkaitan dengan pengelolaan bencana, hampir bisa dikatakan netral gender. Semua kebijakan penanggulangan bencana mengacu pada tupoksi masing-masing kementerian/lembaga yang memang belum mencantumkan gender sebagai salah satu strateginya. Paradigma yang dipakai masih bersifat umum dan tanggap darurat. Penyebabnya adalah meskipun UU no 24 tahun 2007 sudah mencantumkan gender sebagai salah satu asas, prinsip serta tujuan dari Penanggulangan Bencana, akan tetapi belum dipahami dan tersosialisasi dengan baik. Sementara itu kementerian/lembaga serta Pemda telah mengeluarkan lebih dahulu kebijakan/pedoman sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Kesimpulan yang didapat bahwa apabila mengkaji kebijakan Surat Keputusan No : 05 tahun 2006 tentang Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Kecamatan Kanor Bojonegoro dan Surat Keputusan No : 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan Laren Lamongan (SK Terlampir), tampaknya ada disharmoni antara kebijakan strategis (UU no 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008) dengan kebijakan dibawahnya.

SUMMARY

MODEL OF MITIGATION STRATEGY AND DEVELOPMENT OF MANAGEMENT AID NATURAL DISASTER BASED ON IMPORTANCE OF WOMAN OF SURVIVOR COMMUNITY IN GRISTLE FLOODS REGION

(Drs. Tri Joko Sri Haryono, MSi, DR. Toetik Koesbardiati,
Yuyun W.I. Surya, S.Sos MA, Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi , 2010, 103 pages)

Handling disaster is not always about participation of society. Society is not only as victim / object of disaster but also as perpetrator of handling disaster. The program based on society, pushes empowerment of society capacity to alert our self in preventing and also reducing the impact of disaster that is happened in environment. Program based on society applied because, society as victim of disaster impact, have to be powered with knowledge and adequate skilled, so that can strive handling disaster impact and reduction of risk. But, this program is rarely or even never entangled woman as natural disaster victim. Its impact makes woman become the most suffering victim in that moment of floods disaster. For example, floods disaster in Lamongan and of Bojonegoro, woman is always in a second place in getting aid.

The aims of this research is as the materials (input) of model formulation of mitigation strategy and development of natural disaster aid management based on the importance of woman as survivor community in East Java floods gristle region. Observing natural disaster from a gender perspective because of missed or overlooked gender concern as unimportant. This opportunity is about to change the traditional role of gender in disaster situations, it will be wasted if women do not try to get advantage from the situation. Survivor community that was formed for women in community and national levels is critical if the size of the recovery is a response to the needs of women and other related.

In order to obtain empirical data and information, this research used descriptive research and qualitative approach. There are several steps that are used (1) determining the location of research: the research location is determined by purposive in Lamongan and Bojonegoro. The consideration is taken in setting these two regions as research sites because the first, the region most prone to floods disaster. Second, the two regions is the most widely material losses to Rp 211 Billion and the victims suffer as many as 1.631 people. (2) Data Collection: (a) which includes observation; and (b) in-depth interviews or depth interview. (3) Study of Literature: Information relating to strategic policy in disaster management. (4) Informant: are individuals who have knowledge and experience concerning the problems studied, the technique. (5) is a Data Analysis: Data collected was then classified and identified based on the theme and then analyzed.

The result of in this research indicate that the level of managerial policies are policies issued by Ministry/Agency/Local Authority such as the Strategic Plan/Program relating to disaster management, could almost be said of gender neutral. All disaster management policy based on tupoksi respective ministries / institutions that did not include gender as one of its strategies. The paradigm used was general and emergency response. The reason is although UU no.24 tahun 2007 already include gender as one of principle, principles and objectives of the Disaster, but not well understood and well

socialized. Meanwhile, the ministries / agencies and local government have first issued a policy / guidelines in accordance with their respective tupoksi.

In conclusion, that when reviewing policies Decree No: 05 tahun 2006 concerning Operation Unit for Disaster and Refugee Management (Operation Unit For PBP) District Kanor, Bojonegoro and Policies Decree No : 08 tahun 2008 about Forming Set of Operation Unit for Disaster and Refugee Management District Laren, Lamongan (SK Enclosed), there appears to be disharmony between strategic policy (UU No. 24 year 2007 and Regulation of the Minister of Home Affairs no. 15 tahun 2008) with the underlying policy.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdullillah kepada Allah SWT, bahwa laporan akhir penelitian yang berjudul "Model Strategi Mitigasi dan Pengembangan Manajemen Bantuan Bencana Alam yang Berbasis Kepada Kepentingan Perempuan pada Komunitas *Survivor* di Wilayah Rawan Banjir" telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sesungguhnya banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim peneliti di lapangan dalam pengumpulan data, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kesulitan bersifat teknis terkait dengan prosedur ijin penelitian yang juga harus tertuju ke Satlak Penanggulangan Bencana, sedangkan kesulitan non teknis yaitu medan yang ditempuh dalam mewawancarai informan dan pengumpulan data serta bukti-bukti di daerah rawan banjir memerlukan waktu sekitar satu jam dengan mengendarai ojek. Selain itu, untuk menuju lokasi penelitian harus menempuh jalan yang berlekok-lekok dengan kondisi tanah berbatu. Kesemuanya telah turut mempengaruhi upaya tim peneliti ini untuk memahami persoalan mitigasi bencana alam serta hasil penelitian ini.

Meskipun demikian, banyak pihak-pihak yang telah ikut membantu menyelasaikan masalah di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan untuk itu pula atas nama tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA.,drh serta seluruh staf LPPKM Universitas Airlangga, atas dukungan fasilitas dan administrasi yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Kesehatan, dinas Pekerjaan Umum, dinas Sosial, dinas Kebersihan dan Badan Kesbang Linmas/lembaga terkait yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.
3. Kepala desa dan camat kecamatan Kanor di kabupaten Bojonegoro dan kecamatan Laren di kabupaten Lamongan yang bersedia memberikan masukan dalam FGD dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.
4. Beberapa mahasiswa yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan masukan dan membantu dalam pengelolahan data di lapangan.
5. Seluruh informan anggota masyarakat yang ada kecamatan Kanor di kabupaten Bojonegoro dan kecamatan Laren di kabupaten Lamongan yang

bersedia memberikan masukan dalam FGD dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.

Atas segala bantuan dan pengorbanannya dalam membantu Tim Peneliti selama berada di lapangan dalam pengumpulan data, sekali lagi atas nama Tim Peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Walaupun hasil ini jauh dari kesempurnaan dalam laporan penelitian ini, tetapi kami yakin bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat, dunia pendidikan dan jaringan yang concern terhadap mitigasi bencana alam. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, kami akan memperbaiki penelitian ini.

Surabaya, 15 Oktober 2010

Tim Peneliti

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN i
RINGKASAN DAN SUMMARY ii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang Penelitian 1

BAB II STUDI PUSTAKA 8

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 16
III.1. Tujuan Penelitian 16
III.2. Manfaat Penelitian 17

BAB IV METODE PENELITIAN 21
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian 21
IV.2. Pengumpulan Data 21
IV.2.1. Pengamatan atau *Observation* 21
IV.2.2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview* 22
IV.2.3. Studi Pustaka 22
IV.3. Penentuan Informan 23
IV.4. Analisa Data 24

BAB V GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 29
V. 1. Kondisi Geografis dan Potensi Bencana di Kecamatan Kanor Bojonegoro ..29
V.1. 1. Keadaan Geografis 23
V.1. 2. Pemerintahan 33
V.1. 3. Kependudukan 35
V.1. 4. Ketenagakerjaan 38
V.1. 5. Pendidikan 41
V.1. 6. Kesehatan 44
V.1. 7. Pembangunan 47

V. 2. Kondisi Geografis dan Potensi Bencana di Kecamatan Laren Lamongan ...51
V. 2.1. Keadaan Geografis 51
V.2.2. Pemerintahan 52
V.2.3. Potensi dan Dampak Bencana Banjir 53

BAB VI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BANJIR DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR 61

VI. 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Bencana Banjir di Lamongan dan Bojonegoro 60
VI. 2. Pandangan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir 63

BAB VII STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM 70
VII. 1. Kebijakan Mitigasi, Penanganan dan Bantuan Bencana Alam di Lamongan dan Bojonegoro 70
VII. 2. Keterlibatan Perempuan Dalam Managemen Bencana Banjir 83
VII.3. Kebijakan Bencana Banjir Terkait Dengan Keterlibatan Perempua 90

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 95

DAFTAR PUSTAKA 97

PETA :

Peta 1 : Daerah Sebaran Bencana

DIAGRAM :

Diagram 1 : Kejadian Bencana di Indonesia 3

DAFTAR TABEL :

Tabel 1 : Bencana di Indonesia (1998-2006) 3
Tabel 2 : Kota-kota di Indonesia yang Berada di Dataran Banjir 4
Tabel 3 : Jumlah Korban Akibat Bencana Tahun 2002 sampai 2007 6
Tabel 4 : Luas Wilayah, Prosentase Terhadap Luas Kecamatan Kanor dan Jarak Desa ke Ibu Kota Kecamatan 30
Tabel 5 : Nama Sungai dan Panjangnya di Wilayah Kecamatan Kanor 32
Tabel 6 : Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Hujan Tiap Bulan Dalam Wilayah Kecamatan Kanor 32
Tabel 7 : Nama Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT Dalam Wilayah Kecamatan Kanor 34
Tabel 8 : Jumlah KK dan Penduduk Menurut Klasifikasi Dewasa, Anak-anak dan Jenis Kelamin di Wilayah Kecamatan Kanor 36
Tabel 9 : Jumlah Penduduk Per Desa, Luas dan Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi Dalam Wilayah Kecamatan Kanor 37
Tabel 10 : Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (10 Tahun Ke Atas) Menurut Jenis Usaha ditiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kanor 39
Tabel 11 : Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah Tiap Desa di Wilayah Kecamatan Kanor 42
Tabel 12 : Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis dan Kapasitas Tempat Tidur di Kecamatan Kanor 45
Tabel 13 : Jumlah Pokbang dan Posyandu ditiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kanor 46
Tabel14 : Program Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana Kecamatan Kano 49
Tabel 15 : Program Pembangunan Masuk Desa di Kecamatan Kanor 50
Tabel 16 : Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Hujan Tiap Bulan Dalam Wilayah Kecamatan Laren 52
Tabel 17 : Nama-nama Dusun Kecamatan Laren 53
Tabel 18 : Inventarisasi Pasca Banjir 55

GAMBAR :

Gambar 1 : Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Gelap - Lamongan, Setelah Bencana Banjir 99

Gambar 2 : Salah Satu Atap Rumah Warga, Sebagai Strategi Adaptasi Ketika Banjir Datang 99

Gambar 3 : Aktivitas Pembangunan Waduk di Kecamatan Laren-Lamongan, Sebagai Salah Satu Program Pemerintah Pencegahan Bencana Banjir 100

Gambar 4 : Kondisi Pemukiman Penduduk Desa Gelap – Lamongan 100

Gambar 5 : Perahu Miliki Warga yang Digunakan Untuk Aktivitas Ketika Bencana Banjir 101

Gambar 6 : Kondisi Areal Persawahan Penduduk Tergenang Banjir 101

Gambar 7 : Salah satu Sekolah yang Tergenang Banjir 102

Gambar 8 : Tanggul di Desa Pilang Kanor Bojonegoro 102

Gambar 9 : Aktivitas Penambangan/Penyeberangan di Bengawan Solo 103

Gambar 10 : Sungai Bengawan Solo, Ketika Tidak Ada Bencana Banjir 103

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah yang rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam, misalnya bahaya geologi (gempa, gunung api, longsor, tsunami dan sebagainya) dan bahaya hidrometeorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar dan sebagainya). Hal ini mengingat wilayah negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun non alam seperti bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Keduanya dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintasi wilayah penduduk padat. Lebih dari 220 juta penduduk, sebagian adalah miskin dan tinggal di daerah rawan banjir. Pada umumnya bencana banjir tersebut terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian Timur (Sumber : BMG). Hal ini disebabkan oleh kondisi morfologi Indonesia yaitu relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan bencana banjir selalu terjadi setiap tahun terutama pada musim hujan. Faktor kondisi alam tersebut diperparah oleh meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir secara tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada peta dibawah ini :

Peta 1 : Daerah Sebaran Bencana

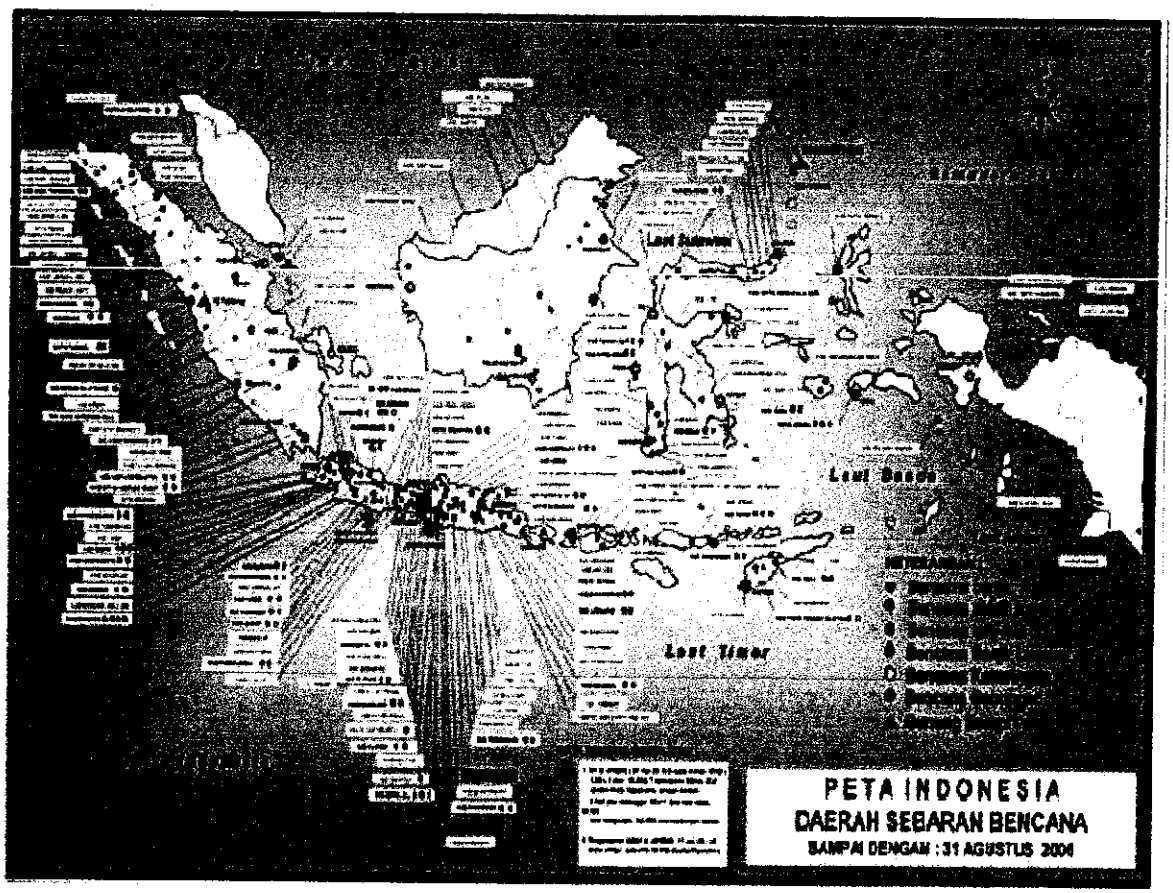

Sumber : BMG

Menurut Bakornas PB dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai 2005 telah tercatat 2.184 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian dari kejadian tersebut (53,3%) bencana hidrometeorologi. Dari total bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi adalah banjir sebanyak 743 kejadian (35%), kekeringan 615 kejadian (28%), tanah longsor 222 kejadian (10%), kebakaran 217 kejadian (9,9%) dan sisanya 17% kejadian yang meliputi seperti gempa bumi, kerusuhan sosial dan kegagalan teknologi. Kejadian bencana di Indonesia dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Diagram 1 : Kejadian Bencana di Indonesia

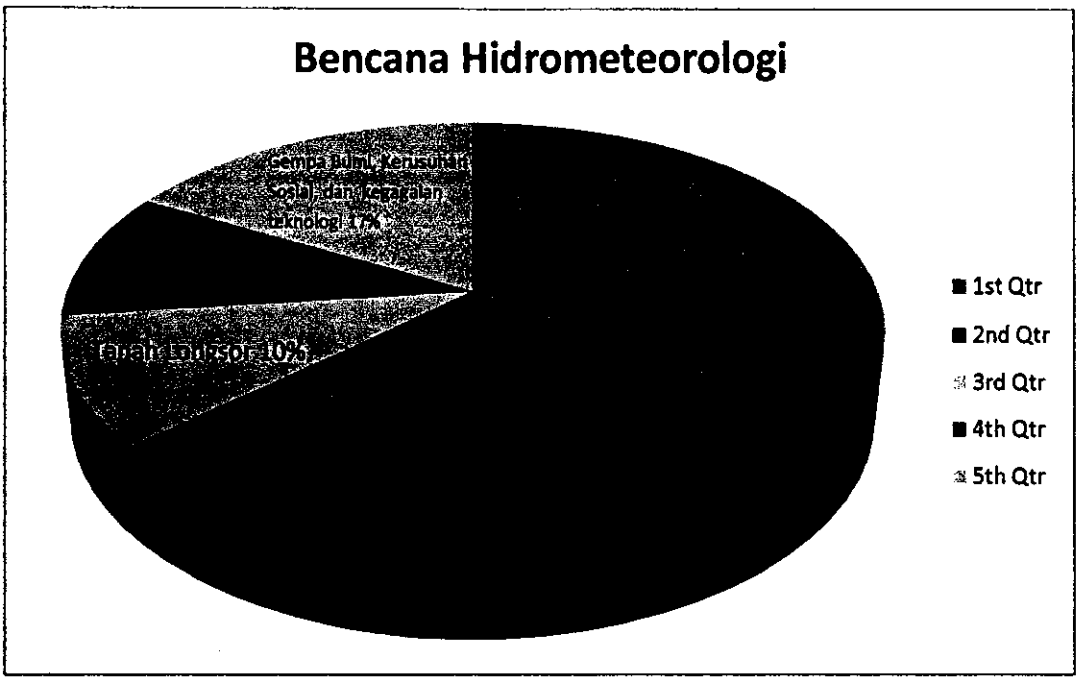

Demikian sumber dari Satkorlak PBP bahwa bencana yang sering menimpa di Indonesia adalah banjir. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Bencana di Indonesia (1998-2006)

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (Orang)
Gempa Bumi/Tsunami	57	135.935
Konflik Sosial	74	6.493
Banjir	607	1.452
Tanah Longsor	323	756
Kegagalan Teknologi	14	581
Epidemi	69	738
Kebakaran	146	34
Kebakaran Hutan	49	9
Angin Topan	90	7
Gunung Api	20	4

Sumber : Satkorlak PBP
Diolah oleh Biro Data dan Informasi Sekretariat Bakornas PBP

Bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi seperti pada diagram dan tabel diatas adalah banjir, maka banjir merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Indonesia dan berbagai kejadian banjir terbukti berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam korban jiwa dan kerugian yang bersifat materi. Berdasarkan diagram 1, 35% (743 kejadian) dan tabel 1 sekitar 607 kejadian, banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya pada tahun 2006 terlah terjadi banjir bandang di Jawa Timur di daerah Jember yang menyebabkan 92 orang meninggal dan 8.861 orang mengungsi serta daerah Trenggalek yang menyebabkan 18 orang meninggal. Di Manado (propinsi Sulawesi Utara) juga terjadi banjir disertai dengan tanah longsor yang menyebabkan 27 orang meninggal dengan jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencapai 30.000 orang. Banjir disertai tanah longsor juga melanda di Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2006 dengan korban lebih dari 2000 orang meninggal dan puluhan orang dinyatakan hilang (data Bakornas PB, 23 Juni 2006).

Dikarenakan secara geografis dan geologis Indonesia dapat digolongkan kawasan daerah rawan banjir. Daerah rawan banjir di Indonesia adalah daerah/kawasan yang berpotensi untuk dilanda banjir dengan indikasi pernah atau berulangkali terjadi banjir. Daerah rawan banjir di Indonesia sebagian besar disebabkan karena luapan air sungai. Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 6000 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup oleh sungai-sungai induk mencapai 1,4 juta hektar (Program for Hidro-Meteorological Risk Disaster Mitigation in Secondary Cities in Asia : hal 5). Tabel berikut ini menunjukkan beberapa lokasi di Indonesia yang berada di dataran banjir.

Tabel 2 : Kota-kota di Indonesia yang Berada di Dataran Banjir

No	Kota	Sungai
1	Jakarta	Kamal , Tanjungan, Muara Angke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Krukut, Cideng, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, Cakung
2	Semarang	Kali Garang/kali Semarang
3	Solo, Bojonegoro, Lamongan	Sungai Bengawan Solo, Sungai Tuntang
4	Bandung Selatan	Sungai Citarum Hulu
5	Surabaya	Sungai Brantas
6	Palembang	Sungai Musi

7	Padang	Batang Arau, Batang Kuranji, Batang Air Dingin
8	Pekanbaru	Sungai Siak
9	Jambi	Sungai Batanghari
10	Medan	Sungai Belawan, Deli, Babura, Percut, Kera
11	Banda Aceh	Krueng Aceh
12	Pontianak	Sungai Kapuas
13	Banjarmasin	Sungai Barito
14	Samarinda	Sungai Mahakam
15	Makasar	Sungai Jeneberang

Sumber : Program for Hidro-Meteorological Risk Disaster Mitigation in Secondary Cities in Asia : hal 6.

Berdasarkan tabel 2 diatas, Jawa Timur (termasuk Surabaya) dikelilingi kali Brantas, sedangkan Bojonegoro dan Lamongan dikelilingi sungai Bengawan Solo. Banjir yang merendam daerah Lamongan dan Bojonegoro di Jawa Timur disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Tuntang. Data dari Satlak Penanggulangan Bencana (PB) Lamongan, menyebutkan, meluasnya banjir di Lamongan mengakibatkan jumlah rumah warga yang tergenang meningkat. Banjir yang sebelumnya menggenangi 1.043 rumah warga di sembilan desa kini telah mencapai 2.352 rumah.

Pusdalops BNPB, 13 Pebruari 2009 melaporkan dampak banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo di Jawa Timur dan 91.631 jiwa menderita. Pengungsi sebanyak 279 KK atau 1.116 jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusdalops BNPB, luapan Sungai Bengawan Solo yang terjadi sejak 26 Pebruari 2009 dan curah hujan tinggi di beberapa wilayah Jawa Timur hingga minggu pertama bulan Maret 2009 mengakibatkan banjir yang melanda 8 kabupaten yaitu Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Lamongan, Gresik, Kediri, Pasuruan dan Sampang. Total kerusakan akibat banjir tersebut adalah 17 rumah rusak berat, 36 rumah rusak ringan, 63.519 rumah terendam. Selain rumah, fasilitas umum yang terendam adalah 340 unit sarana pendidikan, 7 unit sarana kesehatan, 565 tempat ibadah, 20.083 hektar lahan pertanian dan ribuan hektar tambak juga ikut terendam. Total kerugian akibat banjir di Jawa Timur mencapai Rp 389 Miliar. Kerugian terbesar melanda kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 211 Miliar (kompas 6 Maret 2009)

Menangani kian meluasnya banjir, Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) Kabupaten Lamongan telah menyalurkan bantuan berupa beras, mi instan, terpal, pakaian pantas pakai, dan minyak goreng. Namun bantuan ini tidak melihat kebutuhan

perempuan. Perempuan mengalami menstruasi, hamil bahkan melahirkan, harus mengurus dan menyusui anak. Belum lagi mereka harus memastikan keberlangsungan kehidupan dengan mencarikan makanan buat keluarga. Air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus), layanan kesehatan reproduksi dan pemenuhan kebutuhan pangan harus layak.

Sebagai gambaran bencana yang semakin meningkat dan kompleks, dibawah ini data jenis bencana dan jumlah korban akibat bencana tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Data dan informasi menggambarkan bahwa jumlah korban akibat bencana secara umum relative meningkat, dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 : Jumlah Korban Akibat Bencana Tahun 2002 sampai 2007

Jumlah Bencana	Tahun						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total
Gempa Bumi	6	65	150	953	5.784	102	7.061
Gempa Bumi dan Tsunami	-	-	165.945	-	683	-	166.628
Letusan Gunung Api	2	-	2	-	2	-	6
Tanah Longsor	40	206	135	212	214	73	880
Banjir dan Tanah Longsor	132	205	45	77	228	346	1.033
Banjir	238	483	100	68	379	122	1.390
Angin Topan	4	3	11	4	11	24	57
Gelombang Pasang/Abrasi	-	-	-	-	-	3	3
Kegagalan Teknologi	2	258	78	277	562	248	1.425
Total	424	1.221	166. 466	1.591	7.863	918	178.483

Sumber : Makalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Sosialisasi Gladi Pos Komando dan Dril Penanggulangan Bencana, Lido, 20-23 Juli 2008

Seperti diperlihatkan dalam tabel 3, jumlah korban tidak dipilah menurut jenis kelamin. Meskipun dalam bencana tidak memilih-milih korban berdasarkan atas jenis kelamin, usia, sosial-ekonomi, suku bangsa dan agama, namun permasalahan yang mengemuka ketika terjadi bencana sangat berkaitan dengan isu gender, khususnya dengan persoalan perempuan yang selama ini kurang diberi perhatian. Pemilahan jumlah korban menurut jenis kelamin sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Karena pola pikir umum berasumsi bahwa bencana menimpa orang tanpa memilih jenis kelamin. Sebab hal ini dianggap kebijakan penanganan bersifat netral, tidak memilah-milah untuk jenis kelamin tertentu.

Berdasarkan pengalaman komunitas perempuan akar rumput yang menjadi komunitas *survivor* di India, Turki, Honduras, Jamaika dan Iran melakukan aksi penanggulangan bencana

alam dan bekerjasama dengan komunitas lainnya dalam membangun kembali secara fisik dan psikis serta melakukan pengawasan. Dikarenakan perempuan mengerti kondisi dekitarnya, komunitas *survivor* ini mengarahkan dan mengawasi distribusi yang diberikan pada masyarakat dengan tepat seperti pendistribusian air, membuka kembali sekolah-sekolah, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, mengurusi perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan sampai pada perempuan yang menyusui anaknya (Jurnal Perempuan edisi 40, 2005 : 36-37)

Komunitas *survivor* menganggap perempuan terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan realitas lokal, maka kekuatan inilah yang digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri. Mereka biasa mengenal tetangga dan berkomunikasi antar sesama. Perempuan-perempuan di komunitas *survivor* ini berbagi pengetahuan, budaya, pengalaman dan kepercayaan. Mereka ternyata menemukan beberapa hal yang mereka butuhkan seperti air, makanan, pemukiman dan kesehatan keluarga. Pertemuan dan diskusi yang intensif membuat mereka mampu merumuskan solusi bersama. Secara bersama pula mereka menemukan kapasitas dan kekuatan mereka, kemudian mengoptimalkan keahlian yang ada dalam mereka sendiri untuk bersama membangun kembali daerahnya. Komunitas *survivor* inilah yang merupakan "kelompok transformasi" yang berbasis pada manajemen bencana alam. Kelompok ini pula juga menyebarkan informasi yang mereka ketahui dari *survivor* ke *survivor* yang lain.

Dengan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka sangat perlu untuk melakukan suatu analisis empiris yang dilandasi dan didasari dengan berbagai data dan temuan lapangan untuk memberikan masukan tentang perlunya penelitian ini, dikarenakan fakta di masyarakat, perempuan selalu tidak dipertimbangkan dalam memberikan bantuan bencana alam. Manajemen bantuan bencana alam, yang berbasis pada kepentingan perempuan sangat perlu sebagai tataran kebijakan yang akan membantu perempuan yang selama ini tidak terpikirkan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Menurut UU No 24/2007 mendefinisikan, "bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis."

Banjir didefinisikan sebagai kejadian genangan sementara yang alami pada dataran banjir (*floodplain*) ketika air hujan jatuh melimpah menjadia aliran permukaan dan menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi. Definisi lain menyatakan bahwa banjir adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relative tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran *drainase* atau sungai, sehingga melimpah serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengekibatkan kerugian pada manusia (Program for Hidro-Meteorological Risk Disaster Mitigation in Secondary Cities in Asia : hal 2)

Penanganan bencana sesuai dengan UU No. 25 tahun 2007, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/objek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Metode dalam penanganan bencana banjir ini adalah Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM/CBDP = *Community Base Disaster Preparedness*). KBBM adalah program berbasis masyarakat yang mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan resiko bencana yang terjadi lingkungannya. KBBM diterapkan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya upaya penanganan dampak bencana dan pengurangan resiko. KBBM diterapkan di daerah rawan bencana seperti banjir di Bojonegoro dan Lamongan, dimana masyarakatnya mudah bekerjasama (bergotong royong) untuk melaksanakan upaya mitigasi atau pengurangan resiko. KBBM bermanfaat bagi masyarakat yang paling rentan yang secara langsung terancam kondisi kesehatan, kehidupan ekonomi dan lingkungan hidupnya.

KBBM juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi mengidentifikasikan prioritas kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat serta menemukan solusi dari permasalahan mereka untuk jangka waktu yang panjang. Program KBBM adalah program upaya pengurangan

resiko bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana serta dampaknya, dalam masalah kesehatan, kebutuhan pokok, sosial, ekonomi dan lingkungannya. Tujuan dari Program KBBM adalah meningkatnya kapasitas masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak/risiko bencana serta meningkatnya taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat. Dengan konsep, bahwa risiko bencana selalu ada dan tinggi dengan adanya bahaya dan kerentananan di masyarakat, maka risiko dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat pula. Maka upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan yang ada di masyarakat. Namun program KBBM ini lebih menekankan pada komunitas *survivor* dimana perempuan dikomunitas itu berbagi pengetahuan, budaya, pengalaman dan kepercayan. Perempuan ternyata lebih mampu melihat pada tingkat kebutuhan secara prioritas seperti air, makan, pemukiman, dan kesehatan untuk keluarga mereka. Pertemuan dan diskusi yang insentif membuat mereka mampu merumuskan solusi bersama untuk membangun kembali daerahnya. Mengapa perempuan lebih rentan ? Elaine Enarson (2000) dalam tulisannya yang bejudul *Gender and Natural Disasters* menyatakan: "... jender membentuk dunia sosial di dalamnya, dimana berbagai peristiwa alam terjadi." Perempuan 'dibuat' menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang mereka bangun. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan, kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam kesiapsiagaan bencana, mitigasi dan pasca bencana.

Penelitian ini lebih menggunakan pendekatan ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan aliran feminisme yang melihat berbagai bentuk penindasan terhadap manusia dan khusus dalam ekofeminisme melihat juga penindasan yang dilakukan oleh manusia terhadap non manusia seperti alam. Karena perempuan selalu dikaitkan dengan alam maka pembahasan alam menjadi sangat penting dalam wacana feminisme. Ekofeminisme menuduh bahwa laki-laki lah yang paling banyak berperan dalam pengrusakan alam apalagi bila dikaitkan dengan karakter maskulin dan budaya patriarki. Cara relasi yang feminin yakni penuh pengertian, *caring* dan berperasaan lebih dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran ekologi.

Dalam tradisi religius dan kultural, perempuan sering dipikirkan sebagai "dekat dengan alam" ; alam dilihat sebagai feminin, maka dunia alam disimbolkan sebagai perempuan-ibu. Alam dipersonifikasikan sebagai perempuan, gadis ningrat, ibu alam; sebagai perempuan bijak

atau sebagai ratu yang mengatur segalanya. Secara khusus, pandangan yang paling sering muncul adalah alam sebagai ibu yang memelihara bumi yang memberi hidup tapi juga mengambilnya kembali. Alam direduksi menjadi alat bagi manusia ; dilihat sebagai sumber kehidupan yang kosmis dan baik; atau dilihat sebagai kekuatan misterius yang ditakuti dan dilenyapkan atau dikontrol. Semua interpretasi tentang alam mencerminkan identifikasi yang serupa tentang esensi perempuan (Farley, 1990 : 245)

Feminisme muncul untuk menanggapi masalah ketimpangan antar jenis kelamin, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai **tujuan** :

1. Saling memperkuat, keduanya (antara laki-laki dan perempuan) hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak berdasarkan model-model dominasi. Seperti yang dikemukakan *Rosemary Radford Ruether* : ada kaitannya yang sangat penting antara pola dominasi terhadap perempuan dan perlakuan dominasi terhadap alam (kaitan antara isu feminisme dan environmentalisme) (Reuther, Rosemary R, 1992 : 73). Menurut *Rosemary Radford Ruether*, relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bergantung pada laki-laki sebagai yang mendefinisikan kebudayaan tetapi juga pada pembatasan perempuan dengan tugas produksi ekonominya. Laki-laki menjadi kelas yang punya waktu senggang dengan pekerjaan yang relatif sedikit sehingga mempunyai kesempatan untuk berburu, berperang bahkan merusak alam. Dominasi atas kerja perempuan menjadi essensial bagi pemahaman atas metafora kultural atas dominasi alam seperti halnya dominasi terhadap perempuan. Perempuan menjadi mediator dan simbol dari proses dominasi material "yang lebih rendah" oleh kontrol kultural (laki-laki) "yang lebih tinggi".
2. Membangun teori dan praktek yang memberi perhatian pada manusia dan alam lingkungan yang tidak bias gender.
3. Adanya keadilan ekonomi dan keadilan sosial, kesataraan gender dan lingkungan hidup semuanya saling berhubungan untuk perdamaian.
4. Feminis dan ekologis dilihat sebagai usaha yang serius untuk membangun aktivitas akar rumput dan kepedulian terhadap alam dan perempuan.

Kedua wujud dominasi ini (perempuan dan alam) menyangkut kenyataan yang patriarkhis dan kyriarkis. Kehancuran ekologis saat ini tidak hanya akibat pandangan dan praktek yang antroposentris tetapi juga androsentris. Kaitan antara feminisme dan lingkungan

hidup/ekologi adalah historis dan kausal (Warrren, 1996 : xi). Para filsuf ekofeminis berpandapat konsepsi dasar dari diminasi terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan hirarki nilai. Maka peran etika feminisme dan lingkungan hidup adalah mengekspos dan membongkar dualisme ini serta menyusun kembali gagasan filosofis yang mendasarinya. Termasuk juga memperhitungkan kerangka kerja konseptual patriarkhal yang menindas seperti rasisme, sistem kelas, heteroseksisme dan seksisme. Kerangka kerja konseptual adalah konstruksi sosial yang membentuk dasar kepercayaan, nilai-nilai, sikap dan asumsi yang membentuk dan merefleksikan bagaimana seseorang memandang dirinya dan sesamanya.

Ciri dari kerangka kerja konseptual yang menindas dan patriarkhal tidak hanya dualisme dan hirarkhi nilai, tetapi juga konsepsi tentang kekuasaan yang "berkuasa atas" (*power over*). Konsep yang berdasarkan perbedaan seks-gender, khususnya dalam membedakan pembentukan kepribadian atau kesadaran, mengklaim bahwa pengalaman badaniah perempuan (bukan biologis semata) mengkondisikan perempuan menghormati alam secara berbeda dari laki-laki. Maka, etika ekofeminis perlu membangun bahasa, teori dan praktek yang sensitif gender, yang tidak lagi mengeksploitasi pengalaman dan kebiasaan yang memisah-misahkan, juga budaya identifikasi gender laki-laki pada perempuan dan alam.

Gebara seorang tokoh femininisme dari Brazil, menyatakan bahwa titik tolak refleksi ekofeminis haruslah merupakan perjuangan untuk pertahanan hidup sehari-hari para perempuan yang paling dimarginalkan. Tubuh yang menderita dari perempuan yang miskin dan termarginalkan menjadi ukuran perluasan eksploitasi dan dominasi terhadap perempuan dan alam oleh sistem kapitalis global. Batuan bencana alampun, seringkali juga tidak melihat kepentingan perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, membutuhkan paradigma, yakni menuju paradigma yang ekologis feminis (ekofeminis).

Ekofeminisme berpendapat bahwa perempuan yaang dikonstruksikan sebagai alam memberi peluang negatif pada perlakuan budaya patriarkhi terhadap perempuan. Opresi patriarkhi terhadap alam/perempuan muncul melalui cara pikir hirarkis bahwa perempuan adalah alam karenanya ia *the others* lantas menempatkan perempuan "yang dekat dengan alam" kemudian terpilah menjadi "yang alamiah" dan "yang tidak alamiah". Budaya menempatkan dirinya dengan alam untuk menetapkan identitas keberadaannya, melegitimasi diri dengan membandingkan kembali dengan alam dan menempatkan diri sebagai "yang alamiah". Patriarkhi memandang maskulitas sebagai "budaya" dan feminitas sebagai "alam".

Banyak perempuan melakukan pemberontakan atas subyek yang dianggap menguasai lingkungan. Mereka tidak hanya melakukan protes atas ketetapan pembangunan yang merugikan perempuan, namun mereka juga mampu mengungkapkan pengalaman sekaligus kritik secara mendalam tentang kondisi masyarakat lokal dan pengelolaan sumber-sumber alam yang tidak ramah kepada manusia dan perempuan.

Perempuan dan anak paling banyak menjadi korban dan menderita dari negara yang strukturnya sangat paternalistik. Banyaknya kasus-kasus pembakaraan hutan, korbannya adalah perempuan dan anak. Ketika ada bencana lingkungan banjir seperti di Lamongan dan Bojonegoro ini, perempuan selalu dinomorduakan dalam mendapatkan bantuan.

Ekofeminisme berbicara tentang ketidakadilan didalam masyarakat terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini berangkat dari pengertian adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap non manusia/alam. Karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam, maka secara konseptual, simbolik dan lingustistik ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis. Menurut Warren (1996 : 20), tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarkhi, dimana ada justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki.

Menurut Warren, perempuan selalu di"alam"kan atau di"femininkan". Di"alam"kan bila diasosiasikan dengan binatang seperti ayam, kucing dan ular. Sedangkan perempuan di"femininkan" di"femininkan" di"femininkan". Berkaitan dengan aktivitas seperti diperkosa, dikuasai, dipenetrasi, digarap dan sejenisnya. Kata-kata yang dipakai dalam menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan alam, misalnya tanah yang digarap, bumi yaang dikuasai, dan hutan yang diperkosa. Jadi tidak mengada-ada bila perempuan dan alam mempunyai kesamaan secara simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang bercirikan maskulin.

Karena perempuan mempunyai karakteristik dengan alam, maka ia sebagai perawat, penjaga dan pelestari alam. Artinya tugas tersebut didefinisikan bukan karena kesadaran tetapi karena kodrat. Pemikiran yang ingin mengembalikan perempuan kepada kodrat inilah yang amat berbahaya karena bermain diantara "menyanjung" dan "menindas" perempuan.

Pergerakan ekofeminis pertama dimulai sekitar tahun 1974 oleh sekelompok perempuan di utara India, mereka menamakan dirinya "Chipko Movement". Mereka memprotes penebangan hutan yang dilakukan oleh kolonial Inggris. Gerakan Chipko merupakan

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

manivestasi dari filsafat Gandhian Satyagrahas yang mencoba menyelamatkan dan melestarikan hutan tradisional atau *forest culture*. Hutan tradisional menjadi begitu penting bagi masyarakat India karena dari dalamnya mengandung tanah, air dan oksigen yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup terutama sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup perempuan, mengapa? Alasan yang pertama karena sebagian besar perempuan timur dalam kehidupannya sangat bergantung pada pohon-pohonan dan hasil hutan. Tingkat ketergantungan mereka terhadap alam sangat tinggi yaitu tercatat 60 % di 32 negara di Afrika, 80% di 18 negara di Asia dan 40% di Amerika Latin dan kepulauan Karibia. Ketika para laki-laki menghabiskan waktunya di ladang atau berburu, para perempuan tinggal bersama anak-anaknya di hutan, mereka mengandalkan pohon-pohonan serta hasil hutan untuk keberlangsungan hidup mereka. Pohon-pohonan dan hasil hutan tidak hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka tetapi dapat memenuhi hampir semua kebutuhan di ranah domestik. Yang kedua, Ada sejumlah kebiasaan, hal yang tabu dan sah dan waktu yang menghambat yang dihadapi perempuan sedang kan laki-laki tidak menghadapinya. Hal tersebut seperti perempuan dan laki-laki memiliki akses yang berbeda atas sebidang tanah. Di Tanzania, perempuan tidak memiliki hak sama sekali untuk mendiami sebidang tanah, mereka harus meminta izin kepada suami mereka atau laki-laki lain untuk mengolah sebidang tanah. Perempuan di sebagian besar negara berkembang tidak memiliki dukungan hukum untuk berpartisipasi dan ikut mengelola lingkungan lokal mereka. "Di daerah rural (pedesaan), perempuan sebagai buruh upah yang sangat miskin-menyiangi, mengangkut air dan kayu, dan melakukan pekerjaan rumah tangganya. Mereka hidup tanpa pendidikan, status, organisasi untuk melindungi atau hak kepemilikan tanah yang dapat menjadikan mereka turut serta dalam pengontrolan lingkungan."

Yang ketiga, pendapat dari pendatang khususnya pengelola hutan dari barat mengenai ketidak beruntungan perempuan di dunia ketiga, sangat berbeda. Mereka menganjurkan beberapa teknik untuk menghadapi kekurangan pohon-pohonan. Akan tetapi hal tersebut tidaklah benar sebab mereka hanyalah pendatang, perempuan-perempuan itu sendiri yang mengetahui bagaimana cara mempertahankan hidupnya dalam alam dan lingkungan yang sudah ia kenal dengan baik. Sejak produksi berskala kecil yang menjadi prioritas lokal banyak dilakukan, peranan perempuan sangatlah penting untuk menyokong itu semua, namun jika kehidupan alam terancam akibat munculnya komersialisasi perambahan hutan, maka dengan demikian kehidupan perempuan akan terganggu dan implikasinya juga akan mengakibatkan punahnya perempuan secara tidak langsung.

Selain berkonsentrasi pada penyelamatan hutan, ekofeminis juga peduli pada kondisi air tanah dan berbagai bencana yang berkaitan dengan itu seperti kekeringan dan banjir yang dapat merusak suatu ekosistem. Di negara-negara dunia ketiga, air sangat penting artinya bagi perempuan dan anak-anak. Di Afrika dan Asia tercatat perempuan dan anak-anak dapat menghabiskan sekitar 4-3 jam perminggu untuk mengangkut air dalam memenuhi kebutuhan keseharian keluarganya. Semakin langkanya air akibat semakin berkurangnya sumber air tanah maka kerja dari perempuan dan anak-anak semakin berat. "Jumlah perempuan yang hidup di daerah rural yang menjadi akibat kelangkaan air mencapai 55% di Afrika, 32% di Asia, dan 45% di Amerika Latin. Walaupun air terlihat berlimpahan banyaknya di seluruh dunia, namun demikian masih ada di daerah tertentu di beberapa negara yang memiliki musim kering teramat panjang yang mengakibatkan banyak peempuan menghabiskan banyak waktu untuk mengangkut dan mengumpulkan air."

Kualitas air yang semakin menurun akibat polusi air oleh limbah pabrik atau zat kimia juga menjadi masalah tersendiri. Menurut Joni Seager, sekitar setengah populasi dunia ketiga tanpa air yang tidak sehat. Terdapat sekitar 250 juta kasus dari air yang menyebabkan penyakit, menyebabkan 10 juta orang meninggal, dan hal ini dapat terjadi setiap tahun. Air yang terkontaminasi menjadi masalah yang cukup rumit terutama bagi perempuan yang miskin yang terpaksa harus memasak dari air yang terkontaminasi tersebut. Akibatnya, dirinya dan keluarganya terjangkit beberapa penyakit, hewan-hewan, ternak tidak dapat hidup, tanaman tidak dapat subur. Situasi tersebut menyebabkan semakin banyaknya perempuan atau anak-anak yang sakit lalu meninggal ataupun jika mereka hidup, mereka hidup dengan berbagai penyakit. Akibatnya fungsi reproduksi akan semakin berkurang dan pada akhirnya akan menyebabkan menurunnnya jumlah populasi manusia di daerah ini.

Permasalahan lainnya yang mengancam kehidupan perempuan, adalah kekeringan atau kebanjiran. Kekeringan dan banjir merupakan bencana alam (*natural disaster*) yang dapat terjadi secara alami ataupun merupakan dampak atas kerusakan alam oleh manusia. Seperti kekeringan diakibatkan tidak adanya cadangan air tanah atau pemerintah yang tidak membuat bendungan sebagai sarana untuk menapung air hujan agar dapat dimanfaatkan pada musim kemarau. Banjir dapat disebabkan karena penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan semakin berkurangnya tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan menyimpannya dalam waktu tertentu. Dampak dari dua jenis bencana ini sangat fatal yaitu dapat merusak ekosistem dan dapat memusnahkan seluruh makhluk hidup, tak terkecuali manusia terutama masyarakat yang miskin yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak. Hal demikian dapat terjadi karena sebagian besar perempuan di dunia ketiga menjadi buruh dengan penghasilan

sangat kecil bahkan sebagian besar diantaranya tidak memiliki penghasilan sama sekali, hidupnya digantungkan pada suami dan alam. Oleh karena itu tidak heran bahwa telah terjadi fenomena yaitu 80%-90% keluarga miskin di dunia merupakan keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Terjadinya fenomena yang demikian disebabkan karena sulitnya perempuan memiliki akses ekonomi yang lebih luas, jika alam saja yang akrab oleh keseharian perempuan di kelola dan diatur oleh laki-laki hingga menimbulkan berbagai bencana alam, apalagi ranah publik yang semuanya di dominasi oleh laki-laki ?

Perempuan tidak hanya mendapat dampak dari bencana alam, kerusakan hutan atau banjir, tetapi penderitaan perempuan khususnya perempuan di dunia ketiga terus berlangsung terutama para perempuan yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani baik petani ladang maupun petani di sawah. " Pada kenyataannya, petani perempuan jam bekerja lebih lama, mempunyai lebih sedikit aset dan upah yang lebih rendah daripada petani laki-laki, dan mempunyai ketergantungan yang paling tinggi. Sebagian besar mereka tidak memiliki pendidikan dan kompetensi yang cukup. Petani perempuan sangat miskin sebab akses informasi untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam (yang dalam penelitian ini adalah bencana banjir).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III. 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun model strategi mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana alam yang berbasis kepada kepentingan perempuan pada komunitas *survivor* di wilayah rawan banjir Jawa Timur sebagai suatu kebijakan yang selama ini belum terpikirkan. Dalam penelitian ini mengapa model strategi mitigasi lebih memprioritas perempuan dalam perpektif gender. Hal ini lebih mencermati apakah dalam penanggulangan bencana pada komunitas *survivor sudah* memperlakukan adil dalam pengelolaan bantuan terhadap perempuan dan laki-laki. Artinya, berlaku adil adalah mempertimbangkan dan kemudian mengakomodasikan kebutuhan, kesulitan, hambatan, aspirasi perempuan dan laki-laki, mengingat keduanya berbeda dalam peran gender yang mereka sandang serta hubungan sosial yang mengaturnya.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan bertujuan:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Jawa Timur khususnya Lamongan dan Bojonegoro.
2. Mendeskripsikan pandangan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap bencana banjir. Dalam hal ini upaya pemberian bantuan/pertolongan dimaksudkan untuk keseluruhan penduduk yang terkena bencana. Ketika mereka bersandar pada struktur distribusi sumberdaya yang mencerminkan struktur masyarakat patriarki.
3. Menjelaskan dan menganalisa penyusunan kebijaksanaan mitigasi di kedua wilayah ini (Lamongan dan Bojonegoro). Setelah menganalisa kebijakan mitigasi ini yang berdasarkan perspektif jender, maka menyiapkan masyarakat 'membiasakan diri' hidup bersama dengan bencana, khususnya untuk lingkungan yang sudah (terlanjur) terbangun, yaitu dengan mengembangkan system peringatan dini dan memberikan **pedoman** bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang biasa terjadi, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan serta kenyamanan dalam kehidupannya.
4. Menganalisa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berbasis jender dan rencana tanggapan yang melibatkan perempuan secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi ke dalam

hitungan akan sangat membantu dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap bencana secara keseluruhan.

5. Mencari model strategi mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana alam yang berbasis kepada kepentingan perempuan pada komunitas *survivor* di wilayah rawan banjir Jawa Timur. Melihat bencana alam dari perspektif jender karena perhatian jender dilewatkan atau dilupakan karena dianggap tidak penting. Kesempatan ini untuk mengubah peran tradisional jender dalam situasi bencana, akan sia-sia jika perempuan tidak berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Komunitas *survivor* yang dibentuk untuk kaum perempuan di tingkat masyarakat dan nasional sangatlah penting jika ukuran pemulihan adalah tanggapan terhadap kebutuhan perempuan dan yang berhubungan dengannya.

Tujuan khusus tersebut diatas terbagi menjadi dua bagian : bagian pertama mendasarkan pada penelitian lapangan dan bagian kedua penelitian kelembagaan (kebijakan).

III.2. Manfaat Penelitian

Bencana alam adalah persoalan kebijakan publik, hasil dari sebuah kegagalan dari dampak kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bencana telah menjadi persoalan masalah kebijakan berskala global yang melibatkan model pembangunan "modern" yang memperluas kerentanan hidup perempuan atas alam dan tekknologi. Penggunaan yang eksploitatif, kebijakan pengaturan pemukiman yang tidak mengindahkan lingkungan serta distribusi populasi telah secara dramatis menghancurkan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam (Vandana Shiva, 1989). Kemajuan, pembangunan, dan pengetahuan justru lebih merupakan sebuah kemunduran, kesengsaraan dan pembahayaan siklus hidup terutama perempuan.

Laki-laki dan perempuan merupakan relasi gender yang sangat signifikan dalam kehidupan keseharian. Relasi ini akan memberikan efek yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan sebelum, ketika dan setelah bencana alam terjadi. Laki-laki karena konstruksi perannya diwilayah publik memiliki peluang yang lebih besar pada akses dan kunci penyelamatan (*key survival*). Sebaliknya karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan diwilayah domestik jauh lebih rentan menjadi korban bencana.

Dalam situasi bencana alam, perempuan dan anak banyak menjadi korban (3/4 dari 91.631 jiwa yang menderita adalah perempuan) (Kompas, 6 Maret 2009). Perempuan dengan pakaian serba tertutup, tidak dapat bergerak sebebas laki-laki. Mungkin pada saat itu, mereka

(perempuan) bersama anak-anaknya panik untuk berusaha menyelamatkan mereka, mungkin juga mereka gagal untuk menyelamatkan diri. Hal ini disebabkan perempuan belum tersosialisasi melatih diri secara fisik, sementara laki-laki lebih lincah dan cepat bergerak bila terjadi bencana alam (banjir).

Bantuan memang segera datang dari segala penjuru dunia. Namun bantuan dari berbagai organisasi yang peduli terhadap pemulihan pasca bencana harus dikelola dengan cara melibatkan baik perempuan maupun laki laki secara bersama. Karena kebutuhan antara perempuan dan laki laki berbeda maka untuk memulihkannya diperlukan manajemen pra dan pasca bencana alam yang berperspektif jender. Di beberapa negara yang sering terjadi bencana mempunyai pengalaman pelibatan komunitas *survivor* (didalamnya melibatkan kaum perempuan) dalam penangan pasca bencana alam. India, Turki, Honduras, Jamaika, dan Iran, memiliki komunitas perempuan menjadi akar rumput melakukan aksi penanggulanngan bencana alam dan berkerjasama dengan komunitas lainya dalam membangun kembali secara fisik dan psikis serta melakukan pengawasan. Karena perempuan mengerti kondisi sekitarnya, mereka juga mengarahkan dan mengawasi distribusi yang di berikan pada komunitas yang tepat. Mereka juga merancang, mengawasi system distribusi air dan trasportasi, melakukan koordinasi informasi tentang pentingnya kesehatan, mengendalikan kondisi lingkungan seperti sebelumnya, mengatasi kelaparan, mengawasi jika terjadi korupsi, membuka kembali sekolah-sekolah, melakukan diversifikasi dan memperbaiki kualitas ekonomi lokal.

Realitas lokal digunakan memperbaiki kondisi mereka sendiri. Perempuan biasanya dalam kondisi normal mengenal tetangga mereka dengan baik dan pandai berkomunitas antar sesama. Perempuan dikomunitas itu berbagi pengetahuan, budaya, pengalaman dan kepercayan. Mereka ternyata menemukan beberapa hal yang mereka butuhkan secara prioritas seperti air, makan, pemukiman, dan kesehatan untuk keluarga mereka. Pertemuan dan diskusi yang insentif membuat mereka mampu merumuskan solusi bersama untuk membangun kembali daerahnya.

Pada perkembangannya, komunitas *survivor* ini selain sebagai korban bencana alam, tetapi juga dengan segala kekuatan yang dimiliki menjadi "kelompok transformasi" yang berbasis pada manajemen bencana alam. Kelompok ini juga menyebarkan informasi yang mereka ketahui dalam istilah "dari survivor ke survivor". Komunitas ini akan mencari sebuah kebijakan dan sistem manajemen bencana alam.

Komunitas *survivor* merupakan bagian tak terpisahkan dari usaha pemulihan/konseling menjadi mitra dengan pemerintah setempat dengan kampanye kebersihan lingkungan, mengorganisasikan orang-orang agar sadar akan pentingnya kesehatan, merancang keperluan sanitasi dan penggunaan air yang effisien serta mencegah kembali terjadinya banjir.

Komunitas *survivor* juga melakukan survivor awal, membangun pemukiman yang aman, merancang kembali rumah-rumah yang memberi kenyaman bagi perempuan, melakukan penelitian, menegosiasikan kontrak kerja untuk kepentingan darurat dan membangun ide sistem infrastruktur jangka panjang dengan pemerintahan lokal.

Melihat bencana alam dari perspektif jender , karena :

1. Pandangan sebagai konsekuensi terjadinya bencana menuntun ke satu fokus kondisi fisik semata, kondisi sosial diabaikan, perhatian terhadap jender dipinggirkan. Perempuan akan terus mengalami ketidakseimbangan pengaruh yang ditimbulkan oleh bencana alam.
2. Kebanyakan upaya pemberian bantuan/pertolongan dimaksudkan untuk keseluruhan penduduk yang terkena bencana. Ketika mereka bersandar pada struktur distribusi sumberdaya yang mencerminkan struktur masyarakat patriarki, perempuan terpinggirkan dalam akses ke sumber bantuan/pertolongan.
3. Perempuan memiliki peran advokasi yang kuat dalam mengukur kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, sebab mereka memahami bencana apa yang mengancam kehidupan mereka sehari-hari. Peran advokasi sudah menekankan bahwa apa yang diperlukan untuk membawa suatu perspektif jender kepada membangun kapasitas perempuan sebelum, selama dan setelah kejadian bencana.
4. Selama ini ketidakhadiran kapasitas kelembagaan di dalam analisa jender tercermin dalam upaya pertolongan/pemberian bantuan, yang tidak dimasukkan perspektif jender di dalam kaidah-kaidah dan prosedurnya. Berarti bahwa kebutuhan tertentu perempuan, perhatian dan potensi mereka untuk menyumbangkan kontribusi dilewatkan begitu saja selama tahapan kesiapsiagaan, tanggapan, dan rekonstruksi.
5. Dibutuhkan suatu proses pengembangan efektif yang mencakup keduanya, baik kebutuhan dan kontribusi potensial perempuan seperti halnya laki-laki. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berbasis masyarakat dan rencana tanggapan yang melibatkan perempuan secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi ke dalam hitungan/perkiraan akan sangat membantu dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap bencana secara keseluruhan. Suatu rencana yang berjalan bahkan berlanjut

akan menandai kemampuan perempuan dan termasuk di dalamnya upaya memberi bantuan/pertolongan akan membantu mengubah kepercayaan jender tentang perempuan.

BAB IV
METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu tindakan-tindakan manusia yang telah diamati oleh peneliti dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari pengamatan dan penelitian lapangan. Pendekatan deskriptif ini akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teknik, yaitu :

IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Lomongan dan Bojonegoro. Pertimbangan diambil dalam menetapkan dua wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena pertama, kedua wilayah ini paling rawan terkena bencana banjir. Kedua, kedua wilayah ini paling banyak kerugian materialnya sebesar Rp 211 Miliar dan korban sebanyak 1.631 jiwa menderita.

IV.2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam serta studi pustaka.

IV.2.1. Pengamatan atau *Observation*

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan ke dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan didalam menghadapi sebelum dan sesudah terjadinya bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, evakuasi dan pengungsian. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi mitigasi dan managemen bencana di masyarakat Lamongan dan Bojonegoro. Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti akan terus menerus sebagai seorang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, serta melihat kembali kebijakan pemerintah daerah terhadap daerah yang rawan banjir.

Dalam pengamatan peneliti melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, merasakan keadaan kehidupan mereka bagi pihak yang menjadi korban.

IV.2.2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview*

Dalam wawancara mendalam, peneliti melakukan review dari perspektif gender terhadap kebijakan strategis, manajerial dan teknis yang relevan yang berkaitan dengan pengelolaan bencana. Selain itu, adalah menanyakan bagaimana penerapan Pengarus Utamaan Gender (PUG) sesuai amanat Inpres no 9 tahun 2000 Dalam Pembangunan Nasional serta UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan gender sebagai salah satu dasar, prinsip serta tujuan Penanggulangan Nasional Bencana Alam (PNBA).

Dalam hal ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan

Untuk menunjang wawancara mendalam, peneliti menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagi menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari ingatan.

Selain pengamatan dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi di monografi desa untuk memperoleh data terpilah menurut jenis kelamin untuk mengetahui apakah sudah dilakukan *gender analysis* dan apakah juga sudah dilakukan *assessment* terhadap kelompok rentan. Selain itu juga mengumpulkan kebijakan yang sudah tersedia di kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah sampai kepada Satlak Penanggulangan Bencana (PB). Dalam melengkapi data-data informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan.

IV.2.3. Studi Pustaka.

Untuk menunjang kelengkapan data penelitian, maka diperlukan untuk mendapat informasi dengan melakukan studi pustaka, internet, jurnal, serta artikel yang terkait dengan masalah yang diangkat. Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menambah data dari beberapa tulisan yang telah dibukukan dan untuk menambah wawasan peneliti. Informasi melalui studi pustaka dengan mencari kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kebijakan strategis ini meliputi Inpres no 9 tahun 2000 tentang

Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional serta UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana, dan Peraturan Pemerintah no 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana. Sedangkan informasi dari internet, jurnal, serta artikel yang relevan akan diperlukan dalam kelengkapan data. Kelengkapan data yang telah ditemukan dari literatur ini juga digunakan peneliti sebagai bahan awal pembelajaran sebelum peneliti turun ke lapangan.

IV.3. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti. Penentuan informan ditentukan secara *purposive* baik di Lomongan dan Bojonegoro sebanyak 14 orang yang meliputi :

1. Informasi dari *stakeholders* dalam penanganan bencana yaitu 2 orang dari dinas Sosial di Bojonegoro dan Lamongan. Dinas Sosial ini sangat penting melihat sejauh mana keterlibatan dalam menangani dan memberikan pelatihan, pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan bencana di daerahnya. Selain itu, juga melihat apakah dalam penanggulangan bencana di daerahnya mengintegrasikan isu gender, sesuai dengan kebijakan strategis yang meliputi Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional serta UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana, dan Peraturan Pemerintah no 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana dan bagaimana implementasinya dalam mengintegrasikan isu gender dan PUG tersebut.
2. Survivor sebanyak 4 orang yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki untuk mengetahui sejauh mana program-program yang mereka lakukan. Selain itu, pelatihan apa saja yang mereka peroleh dari dinas terkait seperti dinas Sosial, dinas Kesehatan, dinas PU dan PMI untuk mengidentifikasi apakah kebijakan pengelolaan bencana banjir berbasis pada kesetaraan gender serta bagaimana implementasinya di lapangan (*de jure* vs *de facto*). Demikian juga apakah para survivor memiliki responsif gender dalam menangani pengelolaan bencana banjir.
3. Satlak Penanggulangan Bencana (PB) sebanyak 2 orang, sangat penting untuk melihat sejauh mana keterlibatan dalam menangani penanggulangan bencana di

daerahnya. Demikian juga melihat apakah dalam penanggulangan bencana di daerahnya mengintegrasikan isu gender, Pengarustamaan Gender (PUG) dan bagaimana implementasinya dalam mengintegrasikan isu gender dan PUG tersebut.

4. Kepala Kantibmas yang menangani bencana banjir sebanyak 2 orang dari 1 orang kecamatan Laren Lamongan dan 1 orang kecamatan Kanor Bajonegoro. Informan ini akan memberikan bagaimana mengimplementasikan penanganan bencana banjir sesuai dengan kebijakan dan pelatihan selama ini apakah juga mengintegrasikan isu gender dan PUG.
5. Kepala desa 1 orang kecamatan Laren Lamongan dan 1 orang perempuan selaku sekretaris desa dari kecamatan Kanor Bajonegoro bagaimana bentuk penanganan bencana banjir yang melanda di wilayahnya.
6. Korban bencana sebanyak 2 orang yang kesemuanya berjenis kelamin perempuan untuk memberikan informasi berkaitan bagaimana bentuk bantuan dalam penanganan bencana dari pra bencana (mitigasi), saat terjadi bencana dan pasca bencana banjir.

IV.4. Analisa Data

Teknik analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan *gender analysis*, yaitu suatu pendekatan untuk menelaah perbedaan dalam kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki (terutama berhubungan dengan peran, hubungan sosial, kebutuhan kesempatan dalam memperoleh akses informasi yang dalam penelitian ini terkait dengan konteks bencana banjir). Hal ini bisa berpengaruh terhadap laki-laki dan perempuan didalam mendapatkan akses dan manfaat dari setiap fase dalam pengelolaan bencana banjir.

Pendekatan *gender analysis* sangat penting dalam penelitian ini karena didalam masyarakat selalu peran gender digambarkan laki-laki sebagai kepala keluarga, pencari nafkah ; peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, bekerja di dapur. Dalam hubungan sosial diantara keduanya digambarkan laki-laki mempunyai peran memimpin, pengambil keputusan ; perempuan mempunyai peran sebagai yang dipimpin dan menjalankan keputusan dari suami maupun masyarakat. Semua ini disebut dengan pelabelan atau *stereotipi gender*. Berkaitan dengan penelitian ini apakah *stereotipi gender* dalam merancang program termasuk untuk merancang penanggulangan bencana, dasar acuannya adalah *stereotipi gender* ini. Hasilnya suatu kebijakan, program dan implementasinya yang bias gender. Banyak pembuat kebijakan dalam memahami gender karena sering mempersamakannya dengan jenis kelamin.

Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasikan berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, peneliti membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi gender dan antropologi hukum. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah peneliti pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu tindakan-tindakan manusia yang telah diamati oleh peneliti dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari pengamatan dan penelitian lapangan. Pendekatan deskriptif ini akan dianalisa secara kualitatif.

Desain Riset Dan Tahapan Penelitian

KEGIATAN TAHAP PENELITIAN I

No	Tahapan	Luaran	Indikator
1.	Mencari informasi tentang proses terjadinya bencana banjir di Jawa Timur	Mendapatkan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Jawa Timur khususnya Lamongan dan Bojonegoro.	Mendapatkan data primer yang berkaiatan dengan bencana banjir dan berhasil melakukan wawancara (perangkat desa, tokoh agama, pemerintah daerah, Satlak Penanggulangan Bencana (PB), korban bencana, LSM lokal) dan etnografi.
2.	Mencari data tentang pandangan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap bencana banjir	Mendapatkan data tentang pandangan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap bencana banjir. Dalam hal ini	Mendapatkan pengumpulan informasi berkaitan dengan pandangan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap bencana banjir.

		upaya pemberian bantuan dimaksudkan untuk keseluruhan penduduk yang terkena bencana.	
3.	Mencari informasi tentang pemetaan kebutuhan korban (baik laki-laki maupun korban)	Mendapatkan informasi tentang pemetaan kebutuhan korban (baik laki-laki maupun korban)	Menganalisa pemetaan kebutuhan korban (baik laki-laki maupun korban) berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, tokoh agama, pemerintah daerah, Satlak Penanggulangan Bencana (PB), korban bencana, LSM lokal.

KEGIATAN TAHAP PENELITIAN II

1.	Mencari data dan informasi tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berbasis jender dan rencana tanggapan yang melibatkan perempuan	Mendapatkan data tentang strategi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berbasis jender dan rencana tanggapan yang melibatkan perempuan secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang sangat membantu dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap bencana secara keseluruhan	Mendapatkan tentang strategi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berbasis jender dan rencana tanggapan yang melibatkan perempuan secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang sangat membantu dalam mengurangi kerentanan (informasi dari perangkat desa, tokoh agama, pemerintah daerah, Satlak Penanggulangan Bencana (PB), korban bencana, LSM lokal)
2.	Mencari informasi tentang model strategi mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana alam yang berbasis kepada kepentingan perempuan pada komunitas *survivor* di wilayah rawan banjir Jawa Timur.	Menentukan model dan strategi mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana alam yang berbasis kepada kepentingan perempuan. Dengan menganailisa bencana alam dari	Menelusuri dan melacak mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana alam yang sudah dibangun dan dikembangkan oleh berbagai pihak (berdasarkan informasi dari perangkat desa, tokoh agama, pemerintah daerah, Satlak Penanggulangan Bencana

		perspektif jender. Komunitas *survivor* yang dibentuk untuk kaum perempuan sangat penting untuk pemulihan kebutuhan perempuan.	(PB), korban bencana, LSM lokal).

BAGAN ALUR PENELITIAN

MODEL STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM YANG BERBASIS KEPADA KEPENTINGAN PEREMPUAN

BAB V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Luas wilayah Jawa Timur 46. 428, 57 km², dengan jumlah penduduk tahun 2009 sejumlah 37.070.731 jiwa (BPS Jawa Timur 2007). Dengan luas wilayah Jawa Timur 46. 428, 57 km² tersebut, Jawa Timur berada pada 111 derjat hingga 114,44' derajat Buju Timur dan 7,12' derajat hingga 8,48' derajat Lintang Selatan. Wilayah Jawa Timur terdiri dari wilayah daratan (90% dari seluruh wilayah propinsi) dan kepulauan Madura (10% dari seluruh wilayah propinsi). Dikelilingi oleh sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudra Indonesia dan sebelah barat propinsi Jawa Tengah.

Secara hidrologis Jawa timur dibagi menjadi 4 Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Madura yang memiliki potensi kapasitas tampung air sekitar 10 juta m³, SWS Pekalen Sampean memiliki potensi kapasitas tampung air sekitar 21,85 juta m³, SWS Brantas memiliki potensi kapasitas tampung air sekitar 505,70 juta m³ dan SWS Bengawan Solo memiliki potensi kapasitas tampung air sekitar 142,45 juta m³. Apabila curah hujan sangat tinggi mengakibatkan kapasitas daya tampung meluap bahkan bisa jebol dan pada akhirnya terjadi bencana banjir. Curah hujan yang sangat tinggi selatan Jawa pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008 akibat banjir luapan sungai Bengawan Solo yang melanda 26 desa di Kecamatan Babat, Laren, Karangbinangun, Karanggeneng, dan Glagah Lamongan menyebabkan kerugian mencapai Rp 25 miliar dan Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 211 Miliar (kompas 6 Maret 2009)

Bab berikut ini, akan mendeskripsikan kondisi geografis dan potensi bencana di Kecamatan Kanor Bojonegoro dan Kecamatan Laren Lamongan.

V.1. Kondisi Geografis dan Potensi Bencana di Kecamatan Kanor Bojonegoro

V.1. 1. Keadaan Geografis

Kecamatan Kanor termasuk wilayah geografis Kabupaten Bojonegoro, merupakan bagian dari wilayah Pembantu Bupati Bojonegoro yang terdiri dari 25 desa. Terletak disebelah selatan Pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Secara administrasi, sebelah utara Kecamatan Kanor berbatasan dengan Kabupaten Tuban, sebelah timur berbatasan dengan Kecamtan Baureno, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumberrejo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Balen.

Sedangkan luas wilayah 59,78 Km^2 terdiri dari dataran rendah di sebelah utara dan perbukitan disebelah selatan yang dihuni oleh kepala keluarga dengan komposisi jumlah penduduk yaitu laki-laki sebanyak 29.544 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.590 jiwa. Wilayah terluas di Kecamatan kanor adalah Gedongarum yang letaknya sekitar 8 Km dari pusat pemerintahan Kanor dengan luas 4.36 Km^2 dan prosentase terhadap luas wilayah kecamatan sebesar 7.29%. Sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Piyak yang jaraknya dari pusat pemerintahan Kecamatan Kanor sekitar 3 Km dengan luas wilayah 0.72 Km^2 dan prosentase terhadap luas wilayah kecamatan sebesar 1.20%.

Desa terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Kanor adalah Kedungprimpen, Nglarangan dan Sroyo yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Baureno dan Kecamatan Sumberrejo. Namun untuk Desa Sroyo yang memiliki jarak 10 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kanor ini karena letaknya yang strategis dimana selain berbatasan dengan dua kecamatan, juga terletak di jalan jalur utama Surabaya-Bojonegoro maka Desa Sroyo sangat ramai jika dibandingkan dengan desa-desa di Kecamatan Kanor lainnya karena kegiatan ekonomi seperti transaksi jual beli juga banyak dilakukan di Pasar Desa Sroyo.

Selain itu wilayah yang memiliki jarak paling dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kanor adalah Desa Kanor yaitu 1 Km dengan luas wilayah 2.65 Km^2 dan prosentase terhadap luas Kecamatan Kanor 4.43%. Selain terletak paling dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kanor, desa Kanor juga terletak dekat atau dihilir Sungai Bengawan Solo. Wilayah lain yang terletak di hilir Sungai Bengawan Solo antara lain Desa Tambahrejo, Kabalan, Cangaan dan Sarangan di sebalah selatan desa Kanor, desa Semambung, Pilang, Gedongarum dan Kedungprimpen di sebelah utara desa Kanor. Karena letakknya di sepanjang hilir Sungai Bengawan Solo maka setiap tahun dilanda bencana banjir. Bencana banjir pada tahun 2007 merupakan bencana banjir yang paling parah yang pernah melanda Kecamatan Kanor.

Tabel 4
Luas Wilayah, Prosentase Terhadap Luas Kecamatan Kanor dan Jarak Desa ke Ibu Kota Kecamatan

Desa	Luas (Km^2)	Terhadap Kecamatan %	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (0.0 Km)
1	2	3	4
1. Sarangan	1.01	1.38	8
2. Tejo	2.21	3.69	7
3. Pesen	1.23	2.05	6

4. Samberan	1.90	3.17	9
5. Nglarangan	2.79	4.66	10
6. Sroyo	0.78	1.30	10
7. Bakung	3.52	5.88	9
8. Palembon	2.21	3.69	8
9. Simbatan	1.68	2.81	5
10. Cangaan	1.13	1.89	7
11. Kabalan	1.83	3.04	5
12. Piyak	0.72	1.20	3
13. Caruban	1.99	3.32	5
14. Sedeng	2.84	4.75	7
15. Bungur	2.14	3.57	7
16. Simorejo	3.91	6.54	5
17. Sumberwangi	2.78	4.52	3
18. Tambah rejo	2.36	3.95	8
19. Kanor	2.65	4.43	1
20. Prigi	3.54	5.92	3
21. Temu	4.06	6.79	7
22. Kedungprimpen	3.89	6.51	10
23. Gedongarum	4.36	7.29	8
24. Pilang	2.35	3.93	5
25. Semambung	1.91	3.20	4
Jumlah 2008 2007	59.78 59.78	100% 100%	-

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kanor diakibatkan oleh luapan Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kecamatan Kanor. Karena selain dialiri oleh Sungai Bengawan Solo, masih ada dua sungai kecil yang mengalir disepanjang wilayah Kecamatan Kanor yaitu Sungai Mekuris yang panjangnya 2,150 M dan Sungai Pohwates yang panjangnya 8,70 M. Sungai Pohwates merupakan sungai yang membatasi antara wilayah Desa Sroyo dan Desa Drajat yang berbatasan dengan Desa Sroyo dan merupakan bagian dari Kecamatan Baureno

dan mengalir di sepanjang Desa Pohwates yang merupakan bagian dari Kecamatan Kepohbaru.

Tabel 5
Nama Sungai dan Panjangnya di Wilayah Kecamatan Kanor

No.	Nama sungai (Asal Sumber)	Panjang (Km)
1	2	3
1	Bengawan Solo	9 Km
2	Sungai Mekuris	2,150 M
3	Sungai Pohwates	8,70 M

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Kondisi geografis Kecamatan Kanor yang dilalui oleh tiga sungai ini mengakibatkan Kecamatan Kanor sering dilanda banjir. Selain itu bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kanor rata-rata terjadi di bulan Desember hingga Februari. Bencana banjir yang biasanya terjadi di bulan Desember hingga bulan Februari ini dikarenakan kondisi curah hujan di bulan-bulan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan curah hujan pada bulan-bulan lainnya. Pada tabel 6 disebutkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 292 mm dengan hari hujan 9 hari. Kemudian di bulan Januari curah hujan mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu dari 292 mm menjadi 207 mm. Namun jumlah hari hujan justru berbanding terbalik karena jumlah hari hujan di bulan Januari justru mengalami peningkatan menjadi 13 hari.

Tabel 6
Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Hujan Tiap Bulan
Dalam Wilayah Kecamatan Kanor

Bulan	Curah Hujan (MM)	Hari Hujan	Rata-Rata Per Hari (MM)
1	2	3	4
Januari	207	13	1.200
Februari	213	17	1.200
Maret	166	11	1.200
April	138	7	1.200
Mei	76	3	1.200
Juni	70	3	-
Juli	-	-	-

Agustus	26	4	-
September	-	-	-
Oktober	198	5	-
Nopember	168	8	1.200
Desember	292	9	1.200
Jumlah 2008 2007	1554 1609	80 122	- -

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Pada bulan Februari konisi curah hujan mengalami kenaikan menjadi 213 mm disertai dengan kenaikan jumlah hari hujan yaitu 17 hari. Dan setelah itu kondisi curah hujan akan terus mengalami penurunan hingga bulan Juli seiring dengan berkurangnya jumlah hari hujan dan akan mengalami kondisi stabil pada bulan Agustus. Kondisi curah hujan akan mengalami kenaikan lagi pada bulan oktober yang juga disertai dengan bertambahnya jumlah hari hujan. Hari hujan rata-rata perhari mencapai 1.200 mm. Secara keseluruhan dalam satu tahun kondisi curah hujan pada tahun 2008 di Kecamatan Kanor ini mengalami penurunan yaitu 1.554 mm dengan jumlah hari hujan 80 hari lebih sedikit dari pada tahun 2007 yang curah hujannya mencapai 1.609 mm dengan jumlah hari hujan 122 hari dalam setahun.

V.1. 2. Pemerintahan

Kecamatan Kanor terdiri dari 25 desa. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa dari 25 desa tersebut sebanyak 1 desa merupakan desa swadaya yaitu Desa Kedungprimpen dan 18 desa merupakan desa swakarya dan 6 desa merupakan desa swasembada yaitu Desa Tejo, Sroyo, Piyak, Prigi, Gedongarum dan Semambung.

Jumlah desa di Kecamatan Kanor hingga tahun 2008 tidak mengalami peningkatan demikian juga dengan jumlah dusun, RW dan RT. Sampai saat ini jumlah dusun di Kecamatan Kanor sebanyak 59 Dusun, 101 RW dan 403 RT. Jumlah dusun terbanyak yaitu desa Sedeng yang membawahi 4 Dusun, namun jumlah RW terbanyak adalah desa Bungur sebanyak 9 RW dan yang membawahi RT terbanyak adalah desa Prigi.

Akan tetapi bisa diprediksi bahwa dusun-dusun ini bisa saja hilang dari peta jika bencana banjir terus-terusan melanda Kecamatan Kanor dalam skala besar. Seperti dusun Grape di desa Kanor yang terancam hilang dari peta menyusul munculnya dua anak sungai baru pasca bencana banjir besar yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Bengawan Solo dimana anak sungai tersebut memiliki lebar 20 meter, kadalaman 4 meter dan menyatu di titik

tertentu kemudian bermuara di Bengawan Solo. Jika hal ini terjadi maka desa lain di Kecamatan Kanor yaitu desa Kanor, Semambung, Prigi dan Pilang terancam menjadi pulau di tengah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo (http://www.melanesianews.org/suara/publish/alam/Dusun_Grape_Terancam_Hilang_150108_printer.shtml). Sementara itu desa yang paling sedikit masing-masing membawahi 1 dusun yaitu desa Sroyo dan desa Sarangan.

Tabel 7
Nama Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT Dalam Wilayah Kecamatan Kanor

Desa	Dusun	RW	RT
1	2	3	4
1. Sarangan	1	2	5
2. Tejo	2	2	14
3. Pesen	2	2	7
4. Samberan	3	3	16
5. Nglarangan	3	3	16
6. Sroyo	1	2	12
7. Bakung	2	5	26
8. Palembon	3	3	10
9. Simbatan	2	4	13
10. Cangaan	3	2	7
11. Kabalan	3	5	17
12. Piyak	2	2	6
13. Caruban	3	5	12
14. Sedeng	4	8	17
15. Bungur	2	9	19
16. Simorejo	3	5	21
17. Sumberwangi	2	6	22
18. Tambah rejo	2	3	13
19. Kanor	2	4	17
20. Prigi	2	6	32
21. Temu	3	6	28
22. Kedungprimpen	3	5	22

23. Gedongarum	2	4	19
24. Pilang	2	2	18
25. Semambung	2	3	14
Jumlah 2008 2007	59 59	101 101	403 403

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

V.1. 3. Kependudukan

Berdasarkan registrasi penduduk akhir tahun 2008 jumlah penduduk Kecamatan Kanor sebanyak 59.774 jiwa. Dilihat dari komposisi jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.838 jiwa atau sebesar 49,9%, sementara penduduk perempuan sebanyak 29.936 jiwa atau sebesar 50,1%. Kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat ini tentunya juga dVkuti oleh peningkatan jumlah penduduk. Antara tahun 2007-2008 di Kecamatan Kanor terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 640 jiwa atau sebesar 1,1%. Sementara itu dilihat dari jumlah KK di Kecamatan Kanor ada sekitar 16.734 KK dengan komposisi jumlah penduduk dewasa sebanyak 43.181 jiwa atau sebesar 72,2% dan jumlah anak-anak sebesar 16.593 jiwa atau 27,8%.

Jika dilihat dari rasio jenis kelaminnya (*sex ratio),* pada tahun 2008 penduduk Kecamatan Kanor mendekati angka 100, tepatnya adalah 99,6. Namun apabila dilihat per desa, ternyata ada 8 desa dengan rasio jenis kelamin yang berada diatas angka 100,00 adalah desa Simorejo (101), desa Kabalan (101,3), desa Pilang (103), desa Samberan (104,6), desa Bakung (107,2), desa Nglarangan (107,3), desa Caruban (108) dan desa Gedongarum (119,2).

Jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah sedangkan disisi lain tidak disertai dengan pertambahan jumlah luas wilayah, maka angka kepadatan penduduk akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, tercatat kepadatan penduduk Kecamatan Kanor adalah 989,2 orang/km^2. Pada tahun 2008 angka ini naik menjadi 999,8 orang/km^2, dengan kepadatan penduduk tertinggi di Desa Sroyo yaitu 1747 orang/km^2 sedangkan kepadatan penduduk terendah di Desa Gedongarum yaitu 590 orang/km^2.

Tabel 8
Jumlah KK dan Penduduk Menurut Klasifikasi Dewasa, Anak-anak dan Jenis Kelamin di Wilayah Kecamatan Kanor

Desa	KK	Dewasa		Anak-anak		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sarangan	326	376	377	156	184	532	561
2. Tejo	550	501	537	380	369	881	906
3. Pesen	283	399	412	132	122	531	534
4. Samberan	690	910	896	187	152	1097	1048
5. Nglarangan	1005	1217	1175	459	386	1676	1561
6. Sroyo	430	513	601	102	147	615	748
7. Bakung	1068	1779	1678	351	308	2130	1986
8. Palembon	683	831	901	360	326	1191	1227
9. Simbatan	555	779	783	218	247	997	1030
10. Cangaan	654	687	706	429	454	1135	1142
11. Kabalan	552	860	840	320	324	1180	1164
12. Piyak	281	393	420	140	110	533	590
13. Caruban	490	590	586	203	163	808	745
14. Sedeng	691	945	981	333	294	1278	1275
15. Bungur	760	1011	1030	417	382	1423	1412
16. Simorejo	960	1352	1357	483	454	1835	1811
17. Sumberwangi	602	760	757	294	330	1054	1080
18. Tambah rejo	769	990	1005	368	370	1358	1375
19. Kanor	834	1177	1212	432	445	1609	1657
20. Prigi	857	990	1039	399	460	1389	1499
21. Temu	1068	1292	1341	5999	673	1891	2014
22. Kedungprimpen	772	864	949	397	402	1261	1351
23. Gedongarum	737	916	926	475	259	1401	1175
24. Pilang	567	241	744	225	211	985	955
25. Semambung	550	770	785	278	299	1048	1084
Jumlah 2008 2007	16734 16648	21143 20775	22038 21510	8695 3769	7898 8080	29838 29544	29936 29590

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Desa Sroyo memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi karena luas wilayahnya yang cukup kecil yaitu 0,78 km^2 sedangkan jumlah penduduknya mencapai 1.363 jiwa lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di Desa Pesen yaitu 1.065 jiwa dengan luas wilayah yang lebih luas daripada Desa Sroyo yaitu 1,23 km^2. Selain karena faktor luas wilayah dan jumlah penduduk, kondisi geografis Desa Sroyo yang terletak jauh dari Sungai Bengawan Solo yang memungkinkan Desa Sroyo jarang terkena bencana banjir serta letak Desa Sroyo yang strategis karena merupakan titik dari pertemuan empat kecamatan yaitu Kecamatan Kanor, Sumberrejo, Kepohbaru dan Baureno, membuat desa Sroyo ramai sehingga banyak pendatang baik dari dalam maupun luar kota terutama untuk berdagang sebelum akhirnya menetap di desa Sroyo.

Selain itu, naiknya tingkat kepadatan penduduk juga dipengaruhi oleh banyaknya angka kelahiran dan kematian di Kecamatan Kanor tersebut. Pada tahun 2007 tercatat bahwa banyaknya angka kelahiran perempuan adalah 62 jiwa lebih banyak jika dibandingkan dengan angka kelahiran laki-laki yaitu sebanyak 54 jiwa. Sedangkan pada tahun 2008 angka kelahiran mengalami peningkatan yaitu untuk angka kelahiran perempuan menjadi 87 jiwa lebih banyak dari pada angka kelahiran laki-laki yaitu 84 jiwa. Angka kelahiran tertinggi terjadi di Desa Kanor yaitu sebanyak 21 jiwa dalam satu tahun dan angka kelahiran terendah di Desa Cangaan yaitu 1 Jiwa dalam satu tahun. Namun ada juga beberapa desa yang dalam satu tahun tidak terjadi kelahiran sama sekali yaitu Desa Sarangan, Tejo, Pesen, Samberan, Sroyo, Piyak, Gedongarum dan Pilang.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Per Desa, Luas dan Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi Dalam Wilayah Kecamatan Kanor

Desa	Jumlah penduduk	Luas (Km^2)	Kepadatan Penduduk per Km^2
1	2	3	4
1. Sarangan	1093	1.01	1082
2. Tejo	1787	2.21	808
3. Pesen	1065	1.23	865
4. Samberan	2145	1.90	1128
5. Nglarangan	3237	2.79	1160
6. Sroyo	1363	0.78	1747
7. Bakung	4116	3.52	1169

8. Palembon	2418	2.21	1094
9. Simbatan	2027	1.68	1206
10. Cangaan	2277	1.13	2015
11. Kabalan	2244	1.82	1232
12. Piyak	1123	0.72	1559
13. Caruban	1553	1.99	780
14. Sedeng	2553	2.84	898
15. Bungur	2835	2.14	1324
16. Simorejo	3646	3.91	932
17. Sumberwangi	2140	2.78	769
18. Tambah rejo	2733	2.36	1158
19. Kanor	3266	2.65	1232
20. Prigi	2888	3.54	815
21. Temu	3905	4.06	961
22. Kedungprimpen	2612	3.89	671
23. Gedongarum	2576	4.36	590
24. Pilang	1940	2.35	825
25. Semambung	2137	1.91	1111
Jumlah 2008 2007	59.774 59.134	59.78 59.78	999.8 989.2

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

V.1. 4. Ketenagakerjaan

Kondisi geografis Kecamatan Kanor yang memiliki luas tanah sawah lebih banyak dari pada luas tanah kering ini serta sistem irigasi yang memadai menjadikan wilayah Kecamatan Kanor sebagian besar merupakan area pertanian, maka mayoritas penduduk di Kacamatan Kanor memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tercatat pada tahun 2008 ada sebanyak 22.442 penduduk yang bekerja sebagai petani dan sebagai buruh tani sebanyak 5.265 penduduk. Desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani terbanyak di desa Bungur yaitu sebesar 2.373 penduduk sedangkan yang paling sedikit bekerja sebagai petani adalah Desa Kabalan yaitu hanya 88 penduduk.

Selain itu desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani paling banyak adalah desa Kanor yaitu sebesar 1.359 penduduk, namun penduduk Kanor memiliki

jumlah penduduk terbanyak yang bekerja sebagai karyawan/ ABRI yaitu 88 penduduk jika dibandingkan dengan desa lainnya. Sedangkan desa yang penduduknya paling sedikit bekerja sebagai buruh tani adalah desa Piyak yaitu sebesar 13 penduduk saja. Namun tidak seperti desa lain yang terletak di hilir Sungai Bengawan Solo yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun buruh tani, akan tetapi penduduk di desa Kabalan memanfaatkan keberadaan Sungai Bengawan Solo sebagai tempat mencari nafkah yaitu dengan menjadi nelayan. Sebanyak 300 penduduk desa Kabalan yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah ini memiliki selisih yang cukup jauh jika dibandingkan dengan desa Kedungprimpen yang hanya ada 4 penduduk yang bekerja sebagai nelayan walaupun sama-sama terletak di hilir Sungai Bengawan Solo bahkan di desa-desa lain seperti Kanor, Semambung, Pilang dan Gedongarum yang penduduknya sama sekali tidak ada yang bekerja sebagai nelayan meskipun terletak di sepanjang hilir Sungai Bengawan Solo.

Tabel 10
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (10 Tahun Ke Atas) Menurut Jenis Usaha ditiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kanor

Desa	Karyawan /ABRI	Tani	Pedagang	Nelayan	Buruh Tani	Pertukangan	Industri	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sarangan	33	579	12	-	75	30	102	46	877
2. Tejo	45	132	114	-	98	35	201	73	698
3. Pesen	16	430	8	-	40	11	55	36	595
4. Samberan	31	462	11	-	538	12	50	57	1161
5. Nglarangan	37	300	37	-	-	15	-	42	1430
6. Sroyo	23	758	58	-	-	58	12	60	969
7. Bakung	71	1060	113	-	118	11	-	93	1466
8. Palembon	22	831	34	-	90	29	251	37	1294
9. Simbatan	35	943	37	-	97	41	44	296	1490
10. Cangaan	37	246	22	-	70	37	200	55	666
11. Kabalan	30	88	56	300	500	30	15	183	1202
12. Piyak	24	539	30	-	13	23	9	172	910
13. Caruban	13	790	13	-	77	17	101	48	1059
14. Sedeng	47	467	29	-	150	20	70	74	857
15. Bungur	53	2373	37	-	-	23	6	104	2595

16. Simorejo	48	1776	48	-	363	29	116	224	2604
17. Sumberwangi	21	1036	19	-	-	25	31	91	1223
18. Tambah rejo	26	436	28	-	855	25	19	283	1672
19. Kanor	80	711	7	-	1359	45	-	29	2229
20. Prigi	29	650	36	-	609	8	-	45	1377
21. Temu	58	1966	23	-	213	20	-	137	2417
22. Kedungprimpen	13	1838	41	4	-	12	-	67	1974
23. Gedongarum	12	1409	37	-	-	24	-	41	1523
24. Pilang	26	632	91	-	-	59	-	212	1019
25. Semambung	28	790	25	-	-	23	-	24	890
Jumlah 2008	856	22442	966	304	5265	632	1282	2529	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Pekerjaan penduduk di Kecamatan Kanor yang sebagian besar sebagai petani dan buruh tani ini bukan berarti tidak menjadikan persoalan tersendiri bagi Kecamatan Kanor karena pekerjaan sebagai petani dan buruh tani. Di Kecamatan Kanor menjadikan kondisi perekonomian penduduk kanor sangat rentan masuk ke dalam suatu perangkap kemiskinan akibat bencana banjir yang setiap tahun melanda. Menurut Bagong Suyanto (2009, 3-5), dampak yang paling mencolok yang dialami korban banjir adalah meningkatnya jumlah hutang setelah banijr karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa ditunda lagi. Sebagian masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian jelas merupakan kelompok yang paling terpukul karena usaha mereka terpaksa berhenti sementara, bahan produksi rusak atau bahkan hilang, dan lahan garapan rusak hingga tidak mungkin lagi ditanami ulang minimal dalam jangka pendek (http://www.air.bappenas.go.id/index.php?prm_page_id=1&prm_type_id=5&prm_news_id=1790).

Selain itu terdapat juga penduduk yang bekerja di bidang industri. Umumnya industri yang terdapat di Kecamatan Kanor ini masih merupakan industri berskala kecil yang masih bersifat informal dan jumlah tenaga kerja yang kurang dari 100 orang. Pada tahun 2008 tercatat ada 83 industri penggilang padi yang tersebar di setiap desa kecuali Desa Sroyo. Jumlah tenaga kerja di penggilingan padi ini sebanyak 83 orang, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 81 orang.

Industri genting bata ada 9 yang tersebar di desa Cangaan sebanyak 5 industri, Tambahrejo 1 industri, Kanor 2 industri, dan Semambung 1 industri. Jumlah seluruh tenaga kerja ada 9 orang dan jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 65 tenaga kerja. Industri yang lain yaitu pande besi yang hanya terdapat 2 industri di Kacamatan Kanor dan menyerap 9 tenaga kerja. Industri tahu/tempe pada saat ini ada 103 dan mampu menyerap 103 tenaga kerja. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2007 pelaku industri tahu/tempe ini mencapai 147 dan mampu menyerap 161. Dengan naiknya harga bahan baku berupa kedelai maka mengakibatkan penurunan jumlah pelaku industri tahu/tempe. Industri di Kacamatan Kanor yang lumayan banyak menyerap tenaga kerja adalah industri anyaman bambu. Setidaknya di Kecamatan Kanor ada 181 pelaku industri anyaman bambu yang mampu menyerap 184 tenaga kerja. Selain anyaman bambu, juga berkembang industri pembuatan hulek-hulek dari akar bambu yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Industri anyaman bambu ini terdapat di Desa Sarangan, Kabalan, Temu, Kedungprimpen, Gedongarum, Pilang dan Semambung.

V.1. 5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dan memiliki posisi tawar yang tinggi dalam dunia kerja sehingga penghasilan seseorang tersebut juga tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Gary S. Becker dalam teorinya tentang sumber daya manusia:

> *"Ada hubungan positif antara penghasilan yang diperoleh sesorang dengan tingkat pendidikan yang dicapainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang diperoleh sepanjang hidupnya. Sebaliknya bagi mereka yang memiliki pendidikan rendah akan mendapat penghasilan yang lebih rendah dibanding yang berpendidikan tinggi." (Becker, 1997 dalam Ariadi & Kamaji (ed.), 2005:41).*

Oleh karena itu kebutuhan akan pendidikan dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun terkadang peningkatan kebutuan terhadap pendidikan ini tidak selalu dimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah terutama gedung sekolah yang merupakan sarana vital bagi keberlanjutan proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga sering terjadi ketimpangan antara banyaknya kelas, jumlah guru dan jumlah murid yang menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif serta biaya sekolah yang semakin mahal.

Pada tahun 2007 di Kecamatan Kanor tersedia 97 sekolah yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 34 sekolah (35,1%), Sekolah Dasar dan yang setingkat sebanyak 53 sekolah (54,6%), Sekolah Menengah Pertama dan yang setingkat sebanyak 7 sekolah (7,2%) dan Sekolah Menengah Atas dan yang setingkat sebanyak 3 sekolah (3,1%). Sedangkan pada tahun 2008 jumlah sekolah mengalami pengurangan namun hanya ditingkat Taman Kanak-Kanak yaitu dari 34 sekolah menjadi 25 sekolah. Untuk Sekolah Dasar ada di masing-masing desa dan Sekolah Menengah Pertama dan setingkatnya ada dibeberapa desa yaitu Desa Bakung, Simbatan, Cangaan, Sumberwangi, Kanor, Kedungprimpen dan Semambung. Sedangkan Sekolah Menengah Atas dan setingkatnya hanya ada di 3 desa masing-masing 1 sekolah yaitu Desa Bakung, Simbatan, dan Prigi.

Dari keberadaan sekolah di Kecamatan Kanor tersebut sebagian besar merupakan sekolah swasta bahkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas semuanya adalah sekolah swasta, maka untuk bisa sekolah di sekolah yang berstatus negeri, penduduk Kecamatan Kanor biasanya sekolah di luar kecamatan seperti yang terdekat yaitu di Kecamatan Sumberejo maupun Kecamatan Baureno.

Tabel 11
Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah Tiap Desa di Wilayah Kecamatan Kanor

Desa	TK	SD		SMP		SMA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Sarangan	-	-	-	-	-	-	-
2. Tejo	1	1	-	-	-	-	-
3. Pesen	1	1	1	-	-	-	-
4. Samberan	1	1	-	-	-	-	-
5. Nglarangan	2	2	1	-	-	-	-
6. Sroyo	-	1	1	-	-	-	-
7. Bakung	2	1	2	-	1	-	1
8. Palembon	1	1	1	-	-	-	-
9. Simbatan	1	1	-	-	1	-	1
10. Cangaan	1	1	2	-	1	-	-

11. Kabalan	1	1	1	-	-	-	-
12. Piyak	-	1	1	-	-	-	-
13. Caruban	1	1	-	-	-	-	-
14. Sedeng	3	3	-	-	-	-	-
15. Bungur	1	2	-	-	-	-	-
16. Simorejo	-	1	1	-	-	-	-
17. Sumberwangi	1	2	-	1	-	-	-
18. Tambah rejo	2	3	1	-	-	-	-
19. Kanor	11	2	-	-	1	-	-
20. Prigi	1	2	-	-	-	-	1
21. Temu	1	2	1	-	-	-	-
22. Kedungprimpen	1	1	1	-	2	-	-
23. Gedongarum	1	1	1	-	-	-	-
24. Pilang	-	1	1	-	-	-	-
25. Semambung	-	2	1	-	1	-	-
Jumlah 2008 2007	25 34	35 35	18 18	1 1	6 6	- -	3 3

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Meskipun jumlah sekolah di Kecamatan Kanor untuk jenjang Sekolah Dasar dan setingkatnya, Sekolah Menengah Pertama dan setingkatnya serta Sekolah Menengah Atas dan Setingkatnya tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2008 namun minat masyarakat Kecamatan Kanor untuk mengenyam pendidikan formal semakin bertambah. Hal ini terlihat pada tahun 2008 murid yang tertampung sebanyak 6.257 murid terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 930 murid (14,9%), Sekolah Dasar dan yang setingkatnya sebanyak 3.404 murid (54,4%), Sekolah Menengah Pertama dan yang setingkatnya sebanyak 1.712 murid (27,4%) dan Sekolah Menengah Atas dan yang setingkatnya sebanyak 211 murid (3,4%). Namun untuk jumlah murid ditingkat Sekolah Dasar dan setingkatnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 4,4%. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama dan yang setingkatnya serta Sekolah Menengah Atas dan yang setingkatnya mengalami kenaikan yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan indikator bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat akan pentingnya pendidikan formal.

Sedangkan untuk jumlah guru pada tahun 2008 tercatat ada sebanyak 524 guru yang terdiri dari guru Taman Kanak-Kanak sebanyak 55 guru (10,5%), Guru Sekolah Dasar dan

setingkatnya sebanyak 263 guru (50,2), guru Sekolah Menengah Pertama dan setingkatnya sebanyak 154 guru (29,4), guru Sekolah Menengah Atas dan setingkatnya sebanyak 52 guru (9,9%). Dan banyaknya guru Sekolah Dasar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 247 guru Sekolah Dasar.

V.1. 6. Kesehatan

Salah satu dimensi kemiskinan adalah kesehatan jasmani. Kesehatan yang mempengaruhi maksimal tidaknya orang dalam berproduksi termasuk bekerja. Bagi korban bencana banjir, dia akan semakin terpuruk ketika salah satu keluarganya apalagi jika tulang punggung satu-satunya pencari nafkah sakit. Disaat pekerjaannya harus terhenti sementara, tabungannya juga harus habis terkuras untuk biaya pengobatan sehingga tidak jarang mereka terpaksa harus berhutang untuk biaya pengebotan dan ini menjadikan masyarakat korban bencana banjir sangat rentan sehingga menjadi terpuruk apabila jatuh sakit.

Sedangkan bencana banjir yang terjadi setiap tahun selalu memberikan dampak berupa datangnya penyakit menular maupun sakit akibat kecelakaan hingga berakibat pada suatu kematian. Oleh karena itu Pemerintah termasuk Kecamatan Kanor yang bertekad menanggulangi dan mengurangi dampak dari bencana mau tidak mau harus harus menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Menurut Ariadi & Karnaji (2005), Pemerintah harus memberi prioritas yang semakin mudah bagi masyarakat korban bencana terutama golongan miskin untuk mengakses segala fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudahan mengakses fasilitas kesehatan tidak hanya secara georafis, tetapi juga secara ekonomi dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa terkecuali.

Sarana kesehatan tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, tenaga medis dan apotek. Di Kecamatan Kanor pada tahun 2008 telah tersedia 69 sarana kesehatan yang terdiri dari 1 puskesmas dengan tersedia 7 tempat tidur, 3 puskesmas pembantu dan tidak tersedia tempat tidur, 44 puskesmas swasta dengan tersedia 44 tempat tidur, dan 21 pos kesehatan dengan tersedia 21 tempat tidur. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 dimana tersedia 60 sarana kesehatan dan tersedia 63 tempat tidur. Sedangkan untuk penambahan fasilitas lainnya seperti apotik hingga tahun 2008 belum ada di Kecamatan Kanor.

Tabel 12
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis dan Kapasitas Tempat Tidur di Kecamatan Kanor

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah	Kapasitas Tempat Tidur
1	2	3
1. RSU Pemerintah	-	-
2. RSU Swasta	-	-
3. R.S Bersalin	-	-
4. Puskesmas	1	7
5. Puskesmas Pembantu	3	-
6. Puskesmas Swasta	44	44
7. BKIA	-	-
8. Balai Pengobatan	-	-
9. Pos Kesehatan	21	21
10. Apotik	-	-
11. Toko Obat Berijin	-	-
Jumlah 2008 2007	69 60	69 63

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Sementara itu, pada tahun 2008 tercatat penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat di Kecamatan Kanor adalah penyakit pada sistem otot dan jaringan yang diderita oleh 4.998 orang, penyakit disentri diderita sebanyak 2.602 orang, penyakit saluran pernapasan bagian atas 2.370 orang dan penyekit anemia diderita oleh 1.291 orang. Sedangkan untuk jenis penyakit kusta diderita oleh 10 orang dan untuk penyakit TBC diderita oleh 70 orang. Banyaknya penderita sakit ini bisa jadi sebagai indikator bahwa layanan di bidang kesehatan masih belum berhasil.

Namun untuk layanan kesehatan yang lainnya seperti posyandu sudah ada di masing-masing desa. Posyandu merupakan pelayanan kesehatan yang sangat penting karena ditujukan untuk memberikan layanan kesehatan terhadap bayi maupun balita. Dengan adanya pelayanan posyandu kondisi kesehatan bayi dan balita bisa lebih ditingkatkan sehingga menjamin keberlangsungan hidup bayi maupun balita dari penyakit tertentu. Sehingga keberadaan posyandu merupakan proteksi dini untuk terhadap penyakit atau kecacatan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut mulai sejak bayi ataupun balita.

Pada tahun 2008 tercatat ada 65 pokbang (Kelompok Pengembang) dan posyandu yang menyebar disetiap desa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 yang semula

hanya tersedia 63 pokbang dan posyandu yang menyebar di setiap desa. Desa yang memiliki layanan posyandu paling banyak adalah desa Tambahrejo dan desa Temu yaitu masing-masing memiliki 4 posyandu dan 4 pokbang. Sedangkan desa yang memiliki sarana posyandu paling sedikit adalah desa Pesen yang hanya memiliki 1 posyandu dan 1 pokbang. Meskipun terdapat sarana posyandu dan pokbang di setiap desa ironisnya pada tahun 2008 tercatat bahwa tidak pernah dilakukan imunisasi mulai dari tahapan BCG hingga ibu TT2 untuk ibu hamil di setiap desa. Dengan tidak adanya masyarakat yang melakukan imunisasi ini merupakan indikator bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai tindakan preventif terhadap suatu penyakit.

Tabel 13
Jumlah Pokbang dan Posyandu ditiap Desa
Dalam Wilayah Kecamatan Kanor

Desa	Jumlah Pokbang	Jumlah Posyandu
1	2	3
1. Sarangan	2	2
2. Tejo	2	2
3. Pesen	1	1
4. Samberan	2	2
5. Nglarangan	3	3
6. Sroyo	2	2
7. Bakung	3	3
8. Palembon	3	3
9. Simbatan	2	2
10. Cangaan	3	3
11. Kabalan	3	3
12. Piyak	2	2
13. Caruban	2	2
14. Sedeng	3	3
15. Bungur	2	2
16. Simorejo	3	3
17. Sumberwangi	2	2
18. Tambah rejo	4	4
19. Kanor	3	3

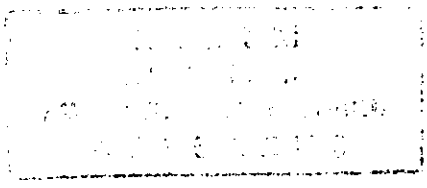

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

20. Prigi	3	3
21. Temu	4	4
22. Kedungprimpen	3	3
23. Gedongarum	2	2
24. Pilang	2	2
25. Semambung	2	2
Jumlah 2008 2007	65 63	65 63

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

V.1. 7. Pembangunan

Bencana banjir yang setiap tahun melanda Kecamatan Kanor tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, akan tetapi juga merusak pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Rosyid (dalam Wignyosoebroto & Suyanto, 2008 : Vi) bahwa:

> *"Akibat bencana alam senantiasa menimbulkan kerugian dan korban, baik berupa harta benda, nyawa dan prasarana maupun lingkungan hidup, termasuk di dalamnya sumber-sumber daya alam yang tersedia, serta kerusakan hasil-hasil pembangunan. Di daerah manapun, bencana senantiasa menghancurkan sejumlah fasilitas publik: jembatan rusak, saluran irigasi hancur, jalan terputus dan terkoyak dan sebagainya."*

Oleh karena itu pemerintah Kacamatan Kanor terus melakukan pembangunan barupa pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang belum ada sebelumnya maupun melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang rusak bahkan hancur akibat terjangan banjir Sungai Bengawan Solo.

Adapun program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kanor antara lain pembangunan jalan desa dan jembatan. Adapun pembangunan jalan desa hampir dilakukan disetiap desa. Secara keseluruhan jalan utama desa di Kecamatam Kanor sudah beraspal dan dipaving seperti jalan yang menghubungkan desa Medalem hingga Kecamatan Kanor dan berlanjut hingga ke desa Pandanwangi Kecamatan Sumberrejo. Namun tidak semua kondisi jalan beraspal ini dalam keadaan baik dan layak dilewati. Untuk kondisi jalan di desa Piyak sudah banyak terdapat lubang sehingga air sering tergenang saat terjadi hujan.

Kondisi jalan terparah adalah di desa Pilang yang sudah sangat rusak sehingga tidak layak dilewati baik oleh sepeda motor maupun mobil. Rusaknya sarana jalan yang menghubungkan antar desa ini karena terkikis oleh banjir Luapan Sungai Bengawan Solo. Desa

Pilang yang letaknya langsung disepanjang hilir Sungai Bengawan Solo ini memiliki kondisi yang parah karena setiap kali diterjang bencana banjir maka seluruh rumah penduduk tenggelam antara 1 meter hingga 2 meter sehingga penduduk Pilang terpaksa harus mengungsi di tanggul.

Selain pembangunan jalan, pembangunan yang lainnya yaitu berupa pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak seperti di desa Sarangan dan Simorejo. Akibat bencana banjir ini juga pemerintah Kecamatan Kanor harus mengeluarkan dana untuk pembangunan talut penahan jalan dan juga saluran air atau irigasi seperti di desa Samberan, Cangaan, Tambahrejo dan Kedongarum. Dan untuk pembangunan fisik ini semua dana bersumber dari Alokasi Dana Desa Kecamatan Kanor yang pada tahun 2008 tercatat sebanyak Rp.2.443.064.964. Dana terbesar yang harus dikeluarkan adalah untuk pembangunan jalan desa dan jembatan di desa Simorejo yaitu sebesar Rp.64.390.000.

Pembangunan fisik lain yang tidak kalah penting adalah renovasi kantor desa. Beberapa kantor desa yang renovasi adalah kantor desa Cangaan dan balai desa Kabalan. Selain itu pemerintah Kanor Juga melakukan pembangunan sarana fisik berupa Dam Afoor ingas yang menghabiskan dana sebesar Rp.55.970.000 di desa Temu.

Sedangkan program pembangunan masuk desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kanor hingga tahun 2008 yang paling diutamakan adalah pemugaran rumah pasca bencana banjir sebanyak 55 rumah yang terletak di desa Sarangan, Kabalan, Cangaan, Tambahrejo, Kanor, Pilang, Semambung dan Kedungprimpen. Namun jumlah rumah yang dipugar ini belumlah semuanya karena keterbatasan dana maka pemerintah Kecamatan Kanor harus mengedepankan mana yang harus mendapat prioritas bantuan pemugaran rumah.

Kecamatan lainnya yang terkena luapan Bengawan Solo. Ketika itu terjadi 17 titik tanggul jebol. Banyaknya titik tanggul yang jebol inilah menyebabkan Kecamatan Kanor menderita dampak banjir terparah di Bojonegoro (http://www.melanesianews.org/suara/publish/alam/Dusun_Grape_Terancam_Hilang_150108_printer.sgtml). Selain berfungsi sebagai penahan banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, tanggul-tanggul tersebut juga berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi penduduk yang tinggal di sepanjang hilir Bengawan Solo.

Tabel 14
Program Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kanor

Desa	Jenis Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	2	3	4
1. Sarangan	Jalan dan jembatan	ADD	25.050.000
2. Tejo	Jalan desa dan sarana olahraga	ADD	25.300.000
3. Pesen	Jalan desa dan polindes	ADD	46.300.000
4. Samberan	Saluran air dan talut	ADD	53.540.000
5. Nglarangan	Peningkatan jalan desa	ADD	61.235.000
6. Sroyo	Jalan macadam	ADD	49.195.000
7. Bakung	Peningkatan jalan desa	ADD	54.551.000
8. Palembon	Peningkatan jalan desa	ADD	52.187.528
9. Simbatan	PJU dan peningkatan jalan desa	ADD	50.798.748
10. Cangaan	Rehab kantor desa dan saluran air	ADD	50.415.000
11. Kabalan	Rehab balai desa	ADD	57.388.000
12. Piyak	PJU dan peningkatan jalan desa	ADD	43.350.000
13. Caruban	Peningkatan jalan desa	ADD	47.648.000
14. Sedeng	Peningkatan jalan desa	ADD	63.603.975
15. Bungur	Peningkatan jalan desa	ADD	56.572.528
16. Simorejo	Jalan desa dan jembatan	ADD	64.390.000
17. Sumberwangi	Peningkatan jalan (aspal)	ADD	49.725.000
18. Tambah rejo	Saluran air	ADD	50.150.000
19. Kanor	Peningkatan jalan desa	ADD	55.178.528
20. Prigi	Peningkatan jalan desa	ADD	25.300.000
21. Temu	Dam afoor ingas	ADD	55.970.000
22. Kedungprimpen	Jalan desa dan paving	ADD	57.300.000
23. Gedongarum	Saluran air	ADD	56.212.000
24. Pilang	Talut penahan jalan	ADD	50.640.000

25. Semambung	Peningkatan jalan desa	ADD	51.941.915
Jumlah 2008 2007		- -	- -

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Selain pemugaran rumah akibat bencana, program pembangunan masuk desa Kecamatan Kanor lainnya pada tahun 2008 adalah perbaikan tanggul di desa Semambung dan Kanor serta pembangunan tanggul di desa Cangaan, Pilang dan Kabalan. Tanggul di desa Semambung dan Kecamatan Kanor ini memang perlu diperbaiki karena pada waktu menjelang akhir tahun sampai memasuki tahun baru 2008 yang lalu, Kecamatan Kanor menderita kerusakan paling parah dibanding 13 kecamatan lainnya.

Tabel 15
Program Pembangunan Masuk Desa di Kecamatan Kanor

No	Lokasi	Jenis Kegiatan	Sumber Dana	Keterangan
1	Sarangan, Kabalan, Cangaan, Tambeh Rejo, Kanor, Pilang, Semambung, Kedungprimpen	Pemugaran rumah pasca bencana banjir 55 rumah	APBD V	-
2	Semambung, Kanor	Perbaikan tanggul bengawan solo	APBN V	-
3	Cangaan, Pilang, Kabalan	Pembangunan tanggul bengawan solo	APBD V	-
4	Sedeng	Pembangunan gedung SDLB	APBD V	-
5	Semambung	Pembangunan gedung SDN 1	APBD V	-
6	Semambung	Pembangunan gedung MI	APBD V	-
7	Sumberwangi	Pembangunan gedung SMK, SMPN 1 Kanor	APBD V	-
8	Semambung	Pembangunan jalan	APBD V	-
9	Pilang-Prigi	Pembangunan jalan	APBD V	-
10	Simorejo-Baureno	Pembangunan jalan	APBD V	-
11	Kanor-Simorejo	Pembangunan jalan	APBD V	-
12	Simbatan-Kanor	Pembangunan jalan	APBD V	-

Sumber: Kecamatan Kanor Dalam Angka 2009

Pembangunan lainnya adalah pembangunan gedung sekolah yaitu SDSLB di desa Sedeng, pembangunan gedung SDN 1 dan MI di Semambung, Pembangunan SMK dan SMPN 1 Kanor di Sumberwangi. Semua sumber dana yang dipergunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari APBD V Kecamatan Kanor. Dana APBD V ini juga dipergunakan untuk pembangunan jalan di Semambung. Panjang jalan di desa Semambung hingga tahun 2008

tercatat panjang jalan yang diaspal 2 Km, panjang jalan yang permukaannya masih batu/kerikil 2 Km.

Pembangunan jalan lainnya yaitu jalan yang menghubungkan desa Pilang dengan desa Prigi, desa Simorejo dengan Kecamatan Baureno, desa Kanor dengan Simorejo dan jalan yang menghubungkan antara desa Simbatan dengan desa Kanor. Hingga tahun 2008 tercatat panjang permukaan jalan yang sudah diaspal di Kecamatan Kanor adalah 51,45 Km panjang jalan yang permukaannya masih batu/kerikil adalah 54,15 Km dan panjang jalan yang permukaannya masih berupa tanah adalah 8,06 Km.

V.2. Kondisi Geografis dan Potensi Bencana di Kecamatan Laren Lamongan.

V. 2.1. Keadaan Geografis

Lamongan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang kerap dilanda bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh faktor keadaan alam Kabupaten Lamongan yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terus-menerus meluap. Luapan Sungai Bengawan Solo ini, diakibatkan oleh waduk di daerah hulu sudah tidak mampu lagi menampung air hujan karena berkurangnya daerah resapan air di daerah hulu akibat penggundulan hutan.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Lamongan yang selalu menjadi 'langganan' bencana banjir adalah Kecamatan Laren. Bahkan pada tahun 2007 lalu Kecamatan Laren merupakan salah satu Kecamatan yang terparah tergenang bencana banjir hingga menenggelamkan permukiman penduduk Laren. Secara administratif, sebelah utara Kecamatan Laren berbatasan dengan Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Brondong yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tuban. Sebelah Selatan berbatan dengan Kecamatan Karanggeneng dan Kecamatan Maduran Lamongan. Sebelah Timur, Kecamatan Laren berbatasan dengan Kecamatan Dukun Gresik. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Selain itu, secara geografis Kecamatan Laren ini dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang secara langsung juga berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di Kecamatan Laren. Pada saat musim penghujan yaitu bulan November hingga Juni curah hujan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juli hingga Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada saat bulan Desember yaitu 275 mm, sehingga tidak heran jika bencana banjir kerap kali melanda diantara bulan Desember hingga April.

Tabel 16
Jumlah Curah Hujan dan Rata-rata Hujan Tiap Bulan
Dalam Wilayah Kecamatan Laren

Bulan	Curah Hujan (MM)	Hari Hujan
1	2	3
Januari	110	10
Februari	165	13
Maret	235	9
April	172	11
Mei	77	7
Juni	109	5
Juli	32	1
Agustus	-	-
September	38	1
Oktober	-	-
Nopember	143	5
Desember	275	12
Jumlah	1.356	74

Sumber: Kecamatan Laren Dalam Angka 2009

V.2.2. Pemerintahan

Sebagai Kecamatan yang mengalami kondisi terparah akibat bencana banjir, sudah barang tentu hampir semua desa yang berada di Kecamatan Laren ini terkena bencana banjir. Kecamatan Laren sendiri terdiri dari 12 desa dan 23 Dusun. Bencana banjir yang melanda di Kecamatan Laren ini melanda mulai dari desa Laren, desa Bulu Tigo, desa Siser, desa Duri Kulon, desa Centini, desa Keduyung, desa Jabung, desa Dateng dan yang paling parah adalah desa Gelap. Bencana banjir yang menerjang desa desa Gelap merusak sarana dan prasarana pemerintah seperti kantor balai desa.

Pusat pemerintahan seperti kantor Kecamatan, Koramil dan kantor dinas pemerintah di Kecamatan Laren awalnya berpusat di desa Laren, namun karena desa Laren kerap kali dilanda bencana sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke desa Gampeng Sejati. Pada saat bencana banjir datang kantor Kecamatan, Koramil dan kantor dinas pemerintah lainnya juga berfungsi sebagai posko bencana. Namun untuk kegiatan ekonomi masyarakat masih tetap berpusat di desa Laren, seperti keberadaan pasar Kecamatan yang merupakan tempat warga melakukan berbagai aktivitas pertukaran jual beli.

Tabel 17
Nama-nama Dusun Kecamatan Laren

No	Nama Desa	Nama Dusun
1	Duri Kulon	Duri Kulon
2	Centini	Centini, Guyangan
3	Keduyung	Keduyung, Mesuwur
4	Pesanggrahan	Pesanggrahan
5	Jabung	Jabung
6	Dateng	Dateng, Sapan
7	Gelap	Dandu, Gelap, Karang jiwo
8	Mojo Asem	Mojo Asem
9	Siser	Siser
10	Bulutigo	Bulutigo, Karyo, Sukorejo
11	Pelangwot	Pelangkumpo, Pelanglengor, Pelangwot
12	Laren	Gendong, Ketintang, Laren

Sumber: Kecamatan Laren Dalam Angka 2009

V.2.3. Potensi dan Dampak Bencana Banjir

Mengingat letaknya yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo, maka seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hampir seluruh Desa di Kacamatan Laren memiliki potensi dilanda bencana banjir terutama desa-desa yang letaknya paling dekat dekat aliran sungai. Semua desa yang ada di Kecamatan Laren berpotensi mengalami berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir yang kerap kali melanda Kecamatan Laren. Potensi tersebut adalah tempat tinggal yang tidak aman karena rawan terhadap bencana banjir yang setiap saat bisa menerjang kapan saja. Masyarakat yang tinggal di sepanjang DAS Bengawan Solo ini sangat rawan terhadap ancaman bencana.

Kecamatan Laren merupakan salah satu kecamatan yang terparah akibat bencana banjir selain kecamatan Kanor Bojonegoro. Sedangkan desa yang berada di kecamatan Laren yang merupakan paling parah akibat banjir adalah desa Gelap. Desa Gelap ini juga merupakan desa terjauh dari kecamatan. Untuk menuju lokasi Desa Gelap harus beberapa desa yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Laren, diantaranya adalah desa desa Laren, desa Pelangwot, desa Bulu Tigo, desa Siser, desa Mojoasem, desa Pesanggrahan, desa Keduyung, desa Centini, desa Nduri Kulon, desa Njabo, desa Ndateng, desa Gelap dan desa Karangwungu Kulon.

Hal ini digambarkan oleh tabel 18 yang merupakan data yang berhasil dihimpun oleh pemerintah Kecamatan Laren tentang dampak dan kerugian serta berbagai invetarisasi yang dibutuhkan oleh desa-desa korban bencana di Kecamatan Laren. Di tabel 18 tersebut, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Laren sebanyak 31.409 jiwa yang terbagi ke dalam 7.346 KK yang semuanya memiliki potensi menjadi korban bencana karena secara fisik mereka tinggal di wilayah yang rawan terhadap bencana banjir.

Misalnya saja di desa Bulutigo, dampak bencana banjir yang dirasakan adalah 2 rumah penduduk roboh, di desa Pesanggrahan sebanyak 4 rumah penduduk yang roboh, di desa Pelangwot sebanyak 3 rumah penduduk juga roboh. Kondisi yang sama juga dialami oleh 3 keluarga di Kecamatan Laren yang rumahnya juga roboh akibat bencana banjir. Desa centini, Duri Kulon dan Keduyung masing-masing terdapat 2 rumah yang roboh, sedangkan korban rumah roboh terbanyak adalah di desa Mojoasem yaitu sebanyak 6 rumah penduduk roboh.

Potensi kerusakan yang lainnya adalah kerusakan tangkis desa, kerusakan jalan desa; serta berbagai sarana dan prasarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Kerusakaan lainnya juga pada sarana dan prasarana keagamaan seperti TPQ, Ponpes, Masjid, Musholla. Kerusakan pada Balai Desa tidak saja menyebabkan masyarakat terganggu jika harus mengurus mengurus birokrasi tetapi juga kegiatan pemerintahan desa terganggu bahkan kurang aktif.

Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Laren terus berupaya untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang terjadi seperti melakukan normalisasi tangkis di berbagai desa dan juga jalan desa yang telah rusak, perbaikan pintu air yang rusak, perbaikan saluran pembuangan air hingga mengupayakan agar seluruh pengungsi bisa kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Selain itu invetarisasi ini sangat membantu pemerintah Kecamatan Laren dalam menganalisa apa saja kebutuhan masyarakat korban bencana di Kecamatan Laren.

Selain membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana yang telah rusak, ternyata juga dibutuhkan perbaikan ekonomi seperti perlu adanya bantuan benih padi dan benih ikan. Karena bagaimanapun para petani padi maupun tambak sudah kehilangan modal produksi yang mereka miliki akibat bencana banjir. Bahkan kerugian mereka berlipat ganda tatkala mereka harus menanam beberapa kali dan hasilnya bencana banjir menghanyutkan benih-benih tersebut. Selain itu dari hasil inventarisasi yang dilakukan ternyata untuk pemulihan pasca bencana juga diperlukan netralisir terhadap wabah penyakit sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang ekstra (*foging banjir*).

Tabel 18
Inventarisasi Pasca Banjir

Desa	KK	Jiwa	Rumah Roboh (buah)	Keruskan Tangkis Desa			Kerusakan Jalan Desa		Sarana Prasarana Pendidikan dan Keagamaan									Ket
				P	L	T	P	L	TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMU/ MA	TPQ	PONPES	Masjid	Musholla	Balai desa	
Bulutigo	818	3249	2	30 15 8 5	2 2 2 1	2 1.5 2.5 1	1000	2.5	4	1/3	-/1	-/1	3	-	3	12	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi tangkis sudah di laksanakan (selesai)
Siser	353	1849	-	500	2	0.5	1000	2.5	2	1/1	-/-	-/-	1	-	1	7	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -desa siap pompanisasi untuk BBM agar disuply dari pemda -normalisasi tangkis sudah dilaksanakan, perlu peninggian jalan 0,5-1m

Dateng	392	1666	-	33	4	3.5	-	-	1	½	-/-	-/2	1	-	4	5	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian jalan tangkis 51 m -gedek/dolken/ kawat (Jl.darurat)
Pasanggrahan	450	2225	-	20	2	1	-	-	1	-/-	-/-	-/-	1	-	2	4	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian jalan dan tangkis
Jabung	750	2750	-	40 25 13	4 4 4	3.5 3.5 3.5	2000	3	2	-/2	-/1	-/-	3	-	2	13	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis dan jalan desa -gedek/dolken/ kawat (Jl. Darurat)

Pelangwot	1166	4664	3	35 75 15	6 6 6	6 6 6	200	2	-	2/4	-/-	-/-	-	-	3	17	-	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis/jalan desa ±1 m -normalisasi tangkis negara yang putus -gedek/ dolken/ kawat
Laren	450	2356	3	200 1000	2.5	1.5	-	-	2	-/1	-/-	-/-	2	-	1	5	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis/jalan desa -gendong sleding 750 m dan 25 rumah dipindahkan -relokasi dusun Gendong -pintu air saluran pembuang/ drainase rusak

Gelap	669	2607	-	10 16 20 15 17	4 4 4 6 6	3.5 3.5 3.5 6 6	50	4	3	1/1	-/1	-/-	4	-	3	5	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis/ jalan sleding 25 m - perlu pembenahan sarana pendidikan
Karangwungu	425	1449	-	40 10 10	2 2 2	2 2 2	100	2.5	2	1/2	-/-	-/-	2	-	1	3	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi tangkis sudah di laksanakan (selesai)
Centini	850	3500	2	-	-	-	2000	3	3	1/2	1/1	1/-	5	2	2	23	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis jalan -bantuan perbaikan saluran pembuangan

																		air
Durikulon	356	1687	2	-	-	-	950	3	2	1/1	-/1	-/-	-	2	-	1	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis dan jalan desa -gedek/ dolken/ kawat
Mojoasem	317	1780	6	170 80	3 3	2 2	250	3	-	- 1/1	-/1	-/1	1	-	2	2	1	-TPQ terancam sleding/ambruk -4 buah pintu air rusak -2 standrat bengkok -pasangan tembok tegak 1600 m
Keduyung	350	1627	2	-	-	-	1000	3	1	1/1	1/-	-/-	2	-	2	4	1	-100% pengungsi kembali ke rumah -normalisasi/ peninggian tangkis/ jalan sepanjang 1000 m
Jumlah	7346	31409	24															

BAB VI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BANJIR DAN PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR

VI. 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Bencana Banjir di Lamongan dan Bojonegoro.

Faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Lamongan dan Bojonegoro disebakan dua hal yaitu :

1. Banjir akibat sungai

   Terjadi karena luapan air sungai dimana kapasitas penyimpanan air di sungai ini terlampaui akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal).

2. Hutan Gundul

   Banjir yang disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan memiliki daya rusak yang besar dan akan lebih berbahaya bila disertai tanah longsor, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap terhadap daerah yang dilaluinya.

Banjir akibat sungai disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah selatan Jawa mengakibatkan kapasitas daya tampung bendungan Gajah Mungkur di Wonogiri tidak mampu menahan volume air deras dari wilayah hulu sungai Bengawan Solo. Pilihannya membuka bendungan Gajah Mungkur yang pada akhirnya mengakibatkan banjir besar di beberapa wilayah hilir termasuk Ngawi, Bojonegoro dan Lamongan. Apabila bendungan Gajah Mungkur tidak dibuka, kemungkinan bendungan tersebut yang menampung volume air akibat hujan yang tinggi dapat mengakibatkan bencana atau banjir yang lebih besar lagi.

Meski ketinggian air sungai Bengawan Solo mulai surut, banjir di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, justru meluas merambah daratan lain di daerah itu yang sebelumnya tidak banjir. Menurut Satlak Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Lamongan :

> *"Meluasnya banjir di Lamongan itu disebabkan oleh jebolnya tangkis Bengawan Solo di Widang, Tuban yang berbatasan dengan Kecamatan Laren. Ketinggian air Bengawan Solo di pemantauan Babat saat ini adalah 7,60 pheilscall, sedangkan sehari sebelumnya mencapai 8,49 pheilscall".*

Sejumlah desa di Kecamatan Laren yang diterjang banjir adalah Gelap, Jabung, Keduyung, Siser, Kroyo, Dateng dan Plangwot. Bahkan Plangwot sebenarnya merupakan tempat relokasi perumahan untuk 156 Kepala Keluarga (KK) korban tanah ambles beberapa waktu lalu. Perumahan tersebut sudah didesain bebas banjir, karena berada di sebelah utara tangkis negara yang diyakini lebih kuat. Banjir yang terjadi kali ini di wilayah Plangwot sangat mengejutkan warga, karena air berasal dari arah barat, dari Widang, Tuban yang memang bersebelahan dengan Desa Plangwot. Jalan Raya Widang hingga Compreng di Kecamatan Widang, Tuban, selalu ditutup sebab ketinggian air yang pagi hari sekityar 50 centimeter terus naik.

Menurut Satlak Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Lamongan, selama ini di daerah sepanjang Bengawan Solo tidak di tanggul. Pemerintah sudah berencana menanggul namun terkendala pembebasan tanah. Tanah yang perlu dibebaskan untuk tanggul Bengawan Solo di Lamongan yakni 30,5 hektare, di Gresik 4,5 hektare dan di Bojonegoro 31 hektare. Pernyataan Satlak Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Lamongan ini, mulai Kecamatan Babat hingga Cepu masih belum selesai dibangun akibat terkendala pembebasan lahan.

Tanggul yang rawan jebol tersebut dibangun sejak tahun 2006 lalu, namun karena terkendala pembebasan tanah, hingga kini sebagian wilayah pengerjaannya belum selesai. Jika persoalan tanah tersebut selesai, diperkirakan 2009 ini mulai dibangun. Menurut Mulyono, karena tanggul di beberapa wilayah masih belum selesai pengerjaannya, maka penanganan banjir masih bersifat darurat yakni mengevakuasi warga dari bencana banjir. Sementara itu, Banjir di Bojonegoro sekitar 115 desa di empat kecamatan telah tergenang. Kecamatan yang terendam paling parah adalah Baureno, Kanor, Balen, Kapas, Kota, Kalitidu, Dander, Trucuk, Malo dan Padangan. Ketinggian air di kawasan itu berkisar antara 50 centimeter sampai 1 meter lebih.

Menurut Satlak Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Lamongan, banjir akibat luapan sungai terpanjang di Jawa itu, merendam 4.457 rumah warga dengan ketinggian air berkisar 0,50-2 meter, 23 musalah, lima gedung SDN, satu SMPN dan satu unit bangunan pondok pesantren. Selain itu, banjir juga merusak areal tanaman padi seluas 804 ha, polowijo/jagung 486 ha, kenaf/serat karung 499 ha dan areal tambak seluas 496 ha.Kewaspadaan pada musim hujan tetap dilakukan, mengingat ketinggian air di kawasan yang tergenang luapan banjir Bengawan Solo itu masih berkisar satu setengah meter.

Ada empat desa yang terparah hingga sekarang ini yang memerlukan pertolongan, yaitu Gelap, Bulutigo, Mojoasem dan Konang Kecamatan Laren, ketinggian air di pemukiman warga

itu mencapai dua meter. Ketinggian air banjir luapan Bengawan Solo di Laren, Lamongan mencapai puncaknya dengan ketinggian air pada papan duga 6,30m (siaga VI - kritis).

Selain itu bencana banjir, di Bojonegoro akibat hutan gundul dimana Sungai Bengawan Solo ini di akibatkan dari hutan-hutan di Bojonegoro banyak yang gundul seperti di wilayah Dander, Tamayang, Kedungadem sehingga apabila ada banjir bandang datang resapan air berkurang dan air mengalir ke Bengawan Solo semua. Banjir yang terjadi memiliki arus yang deras sehingga merusak berbagai sarana dan prasana yang ada. Bahkan jika ada tanggul yang putus satu saja, maka masyarakat tidak bisa tidur karena harus menyelamatkan diri dan hartanya. Apalagi di Desa Pilang yang merupakan daratan rendah sehingga sulit dilakukan evakuasi. Biasanya peringatan dilakukan melalui sistem peringatan dini (*early waming system*), telepon dan kentongan sehingga warga bisa cepat-cepat menyelamatkan diri.

Menurut Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) Pemkab Bojonegoro, Bambang Santoso selain kerugian materi, banjir yang disebabkan oleh meluapnya Bengawan Solo itu juga telah menewaskan tiga orang, dua diantaranya adalah warga Kecamatan Padangan yang tenggelam dalam banjir. Kerugian terbesar di bidang sektor perumahan mencapai Rp 230 miliar, hampir separuhnya dari jumlah total seluruh kerugian. Beliau menyebutkan, kerugian sektor perumahan akibat terjangan air banjir Bengawan Solo tersebut, mengakibatkan 177 rumah hancur total, termasuk hanyut, 3.369 rumah rusak sedang dan 33.218 rumah rusak ringan.

Rumah warga yang hancur juga hanyut diterjang luapan sungai Bengawan Solo terbanyak di Kecamaran Kanor sebanyak 74 unit, di sejumlah desa di Kecamatan Trucuk 22 rumah, di Kecamatan Kalitidu , Kecamatan Balen masing-masing 16 rumah dan di Kecamatan Padangan 12 rumah. Sedangkan jumlah gedung SDN yang rusak total tercatat sebanyak 14 bangunan, rusak sedang 367 bangunan dan rusak ringan 288 bangunan. Jalan di dalam kota dengan tingkat kerusakkan mulai 5 persen hingga 80 pesen sepanjang 47,076 km. jalan poros kabupaten dengan tingkat kerusakkan mencapai 100 persen sepanjang 92,2 km dan puluhan km jalan poros desa.

Menurut Bambang Santoso, yang juga Sekkab Bojonegoro itu, data seluruh kerugian akibat banjir luapan sungai Bengawan Solo berbagai sektor tersebut dilaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendapatkan tindak lanjut dan bantuan. Alasannya, lanjutnya, tidak mungkin Pemkab Bojonegoro mampu menangani perbaikkan berbagai sektor yang rusak akibat banjir di Bojonegoro.

"Yang jelas perbaikan berbagai sektor yang rusak akibat banjir akan ditunjang APBN"

Meski demikian, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan anggaran bencana untuk penanggulangan sektor prasarana dan sarana jalan sebesar Rp2,1 miliar sedangkan dana yang dibutuhkan melakukan rehabilitasi darurat jalan yang rusak di Bojonegoro akibat banjir diperkirakan mencapai Rp 60 miliar. Bambang Santoso mengatakan, untuk memperbaiki rumah warga yang hancur total juga hanyut, pemkab mengajukan usulan bantuan kepada Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) sebesar Rp3,5 miliar.

Genangan masih terdapat di dua kecamatan yaitu kecamatan Laren dan Maduran di kabupaten Lamongan dengan ketinggian air di perumahan 10-30 cm dan di jalan 15-60 cm. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusdalops BNPB, luapan Sungai Bengawan Solo yang terjadi sejak 26 Februari 2009 dan curah hujan tinggi di beberapa wilayah Jawa Timur hingga minggu pertama bulan Maret 2009 mengakibatkan banjir yang melanda 8 kabupaten yaitu Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Lamongan, Gresik, Kediri, Pasuruan dan Sampang.

Total kerusakan akibat banjir tersebut adalah 17 rumah rusak berat, 36 rumah rusak ringan, 63.519 rumah terendam. Selain rumah, fasilitas umum yang terendam adalah 340 unit sarana pendidikan, 7 unit sarana kesehatan, 565 tempat ibadah, 20.083 hektar lahan pertanian dan ribuan hektar tambak juga ikut terendam (Sumber: BNPB).

VI. 2. Pandangan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir

Pandangan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) terhadap bencana banjir, terkait dengan upaya pemberian bantuan/pertolongan dimaksudkan untuk keseluruhan penduduk yang terkena bencana. Sebagian masyarakat juga menilai bencana alam adalah kondisi alam yang melekat pada bumi. Bencana yang terjadi dari bencana satu ke bencana yang lainnya. Terus demikian berulang-ulang.

Masyarakat berpandangan juga pada kompleksnya dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana, tidak hanya mencakup pada kerugian fisik material akan tetapi mencakup pula permasalahan sosial-psikologis mereka yang menjadi korban bencana dan masyarakat yang khawatir akan terjadi bencana yang sama. Kejadian bencana yang datang secara berproses dan/atau tiba-tiba menimbulkan efek serius yang tidak hanya dirasakan oleh perorangan tetapi juga oleh seluruh masyarakat terutama yang bertempat tinggal ditempat terjadinya bencana.

Namun masyarakat di kecamatan kanor Bojonegoro dan Laren Lamongan, seolah-olah bencana alam tidak pernah menjadi bahan pelajaran, pengalaman berharga atau setidaknya bahan renungan dalam menangani bencana. Ketika mereka bersandar pada struktur distribusi

sumberdaya yang mencerminkan struktur masyarakat patriarki. Hal ini dapat dicermati pada saat Sukowati menceritakan bagaimana kondisi di desa Simbatan kecamatan Kanor Bojonegoro saat terjadi bencana banjir terumata banjir yang skalanya paling besar yaitu pada tahun 2007. Bencana banjir yang terjadi di Desa Simbatan bisa dibilang cukup parah. Pada saat terjadi bencana banjir, kondisi Desa Simbatan terlihat seperti lautan karena banjir merendam rumah-rumah penduduk mulai dari yang hanya setinggi 1 meter hingga setinggi rumah (3 – 4 meter). Kondisi yang parah semacam ini menjadikan para penduduk Desa Simbatan sangat menderita. Bagaimana tidak, penduduk desa Simbatan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani ini tidak bisa bekerja sehingga untuk kebutuhan makanan saat bencana yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu datangnya bantuan.

Sedangkan proses penyaluran bantuan yang ada di Kecamatan adalah pihak desa sendirilah yang mengambil ke kantor Kecamatan, jika tidak maka tidak akan mendapatkan bagiannya. Di sisi lain menurut pengakuan Sukowati, untuk mengangkut bantuan dari kecamatan dan membagikannya ke rumah-rumah penduduk membutuhkan perahu karena jalan sudah tidak bisa dilewati. Namun, biaya penyewaan perahu tergolong mahal yaitu sekitar Rp.200.000-Rp.300.000 sekali menyewa. Sedangkan Sukowati mengaku bahwa bantuan pasti berupa barang tidak ada yang berupa uang sehingga perangkat desa merasa kesulitan dana untuk proses penjemputan bantuan di Kecamatan. Sehingga ada pula warga yang memiliki inisiatif sendiri untuk menjemput makanan di Kecamatan dengan cara membuat perahu *gethek* dari pelepah pisang. Namun, hal ini sangat berisiko karena perahu dari pelepah pisang bisa dengan mudah terguling. Seperti penuturan Sukowati :

> *"Sebenarnya bantuan makanan itu sangat banyak di Kecamatan. Namun, penduduk sini bisa dibilang pada saat benjir mengalami kelaparan karena tidak memiliki biaya untuk menyewa perahu. Sehingga kami perangkat desa ini juga tidak bisa mengambil bantuan dari kecamatan. Kalau biaya perahu dibebankan kepada korban setiap rumah Rp.10.000 bisa. Tetapi hal ini tidak mungkin, mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani, Iha kalau sudah banjir begini ya mereka tidak memiliki uang".*

Selain hambatan tersebut, ada hambatan lainnya yang kerap kali dihadapi oleh Sukowati dan Perangkat desa lainnya dalam menangani bencana di Desa Simbatan. Hambatan tersebut adalah berkaitan dengan tradisi masyarakat yang enggan atau tidak mau meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke tempat lebih aman, sehingga hal ini mempersulit evakuasi korban bencana. Sukowati sendiri tidak tahu alasannya mengapa. Namun, dugaan Sukowati adalah mereka takut meninggalkan rumah mereka karena pada saat bencana, memang kondisi rumah tidak aman karena banyak penjarahan.

Oleh sebab itu, para korban bencana ini lebih memilih tetap tinggal di rumahnya masing-masing dengan cara membuat papan di rumah untuk tidur. Kebetulan mayoritas tempat tidur mereka bukan berupa kasur akan tetapi hanya tempat tidur yang terbuat dari kayu atau penduduk Desa Simbatan sering menyebutnya *bayang*. *Bayang* ini sengaja mereka buat untuk tidur sehari-hari serta persiapan ketika terjadi bencana, maka bayang-bayang ini tinggal ditumpuk saja. Untuk penduduk yang tidak punya maka mereka bisa ikut ke rumah tetangga lainnya. Sedangkan untuk ternak seperti ayam, kambing, dan sapi sudah mereka ungsikan di posko pengungsian yang disediakan khusus untuk hewan ternak. Untuk makanan biasanya mereka mengambilnya di dapur-dapur umum yang disediakan oleh desa yang biasanya ditempatkan dirumah warga yang lebih tinggi termasuk juga rumah Pak Lurah.

Dalam penanganan bencana ini, perangkat desa sangat berperan aktif. Mereka terus memantau kondisi air Bengawan Solo. Jika kondisi air sudah mulai menunjukkan tanda-tanda banjir maka mereka segera mengumumkan kepada warga untuk segera mengamankan barang-barang dan membawa ternak-ternak mereka ke tempat pengungsian yang telah disediakan oleh desa.

Selain itu, peran PKK sendiri sebagai roda penggerak emansipasi perempuan di Desa Simbatan juga cukup penting. Peran PKK disini pada saat saat bencana adalah berfungsi sebagai pengelola bahan bantuan makanan. Bantuan yang diberikan biasanya masih berupa bahan makanan mentah seperti beras dan supermi sehingga harus diolah lagi dan dibagi-bagi sesuai dengan jumlah korban yang ada. Ada pula perangkat yang bertugas untuk menggalang bantuan makanan ke desa-desa tetangga yang tidak terkena bencana, dan masyarakatpun dengan sukarela memberikan bantuan berupa nasi bungkus bagi para korban bencana di Kecamatan Kanor.

Akan tetapi, sejauh ini keterlibatan perempuan dalam penanganan bencana masih sangat kecil. Seperti yang sudah di jelaskan PKK misalnya, perannya hanya seputar pada tataran kegiatan domestic yang tidak jauh dari peran ibu-ibu ketika di rumah yaitu memasak. Sedangkan keterlibatan yang lainnya tidak ada, seperti keterlibatan dalam rapat-rapat pengambilan kebijakan tentang penanganan bencana maupun keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan tentang bencana. Sehingga penanganan bantuan bagi perempuan yang tentunya memiliki kebutuhan berbeda dengan laki-laki belum sepenuhnya tersentuh. Dari berbagai bantuan yang diberikan, memang ada bantuan bagi perempuan seperti pembalut, namun bantuan ini tidak langsung disalurkan ke para perempuan yang ada namun biasanya mereka mengambilnya sendiri di kecamatan dengan menyuruh saudara laki-laki atau suami mereka. Yang menjadi persoalan di sini adalah, bagaimana jika seandainya tidak ada yang bisa

disuruh untuk mengambil bantuan tersebut maupun tidak ada perahu untuk mengambilnya. Satu-satunya cara menggunakan kain handuk sambil menunggu bantuan pembalut tersebut datang kepadanya.

Selain itu, bantuan berupa susu formula juga telah disediakan oleh puskesmas, namun bantuan ini biasanya kurang begitu dimanfaatkan karena mayoritas penduduk desa memang menyusui anaknya dengan ASI hingga anak tersebut tumbuh besar. Selain itu penggunaan susu formula bagi penduduk desa tergolong mahal sehingga tidak bisa dijangkau oleh penghasilan mereka yang rata-rata bekerja sebagai petani maupun buruh tani.

Kondisi yang termasuk memprihatinkan pula di saat bencana adalah tidak adanya MCK bagi warga, sehingga kebutuhan akan mandi, buang air besar maupun kecil dilakukan di langsung di air banjir yang tentunya juga akan sangat mengganggu kesehatan mereka terutama perempuan dan anak-anak. Maka tidak mengherankan jika menurut penuturan Sukowati bahwa pasca terjadinya bencana banjir, biasanya penyakit yang menyebar adalah diare dan gatal-gatal. Penyakit ini sebagian besar menyerang anak-anak dan perempuan.

Hal ini akibat dari mandi, minum dan buang hajat besar pada saat bencana menggunakan air banjir tersebut. Meskipun tidak banjir, masyarakat di desa Simbatan kecamatan Kanor Bojonegoro jarang memiliki WC. Mereka masih menggunakan kakus atau tanah yang digali untuk buang air besar, ada pula yang masih sembarangan di bawah kumpulan pohon bamboo (*greng*). Meskipun perangkat desa sudah menghimbau berkali-kali namun kebiasaan penduduk yang satu ini sangat sulit untuk diubah.

Demikian juga bantuan bencana di kecamatan Laren Lamongan. Terutama di desa Gelap merupakan salah satu desa yang paling parah akibat bencana banjir dan desa yang paling sulit untuk memberikan bantuan. Perjalanan yang ditempuh selama kurang lebih 20 Km dari Kecamatan tersebut memakan waktu 2 jam untuk sampai kesana dengan menggunakan sepeda motor. Kondisi geografis yang ekstrim dimana jalan-jalan masih berbatu. Adapula jalan baru yang sudah beraspal yaitu jalan yang menghubungkan Kecamatan Laren dengan Babat. Namun untuk menuju Desa Gelap kami harus menyeberang pintu air bendungan Bengawan Solo dan kemudian melewati tanggul yang kondisi jalannya masih buruk.

Desa Gelap terletak pada dataran rendah yang dikelilingi oleh area persawahan dan rawa. Sehingga kehidupan masyarakat di sana bersumber mata pencaharian sebagai petani maupun pencari ikan di rawa-rawa yang juga dekat dengan pemukiman mereka. Karena banyak yang bekerja mencari ikan maka hampir setiap keluarga memiliki perahu kecil sendiri. Biasanya mereka mencari ikan dan udang untuk dimakan sendiri maupun dijual di pasar. Selain

itu, adanya perahu-perahu ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu-satunya alat transportasi ketika terjadi bencana banjir.

Seringkali bencana banjir yang melanda desa Gelap ini mencapai 2 meter atau lebih sehingga dampaknya bukan saja merusak sarana dan prasarana umum seperti robohnya kantor balai desa, tetapi juga diantara korban bencana terpaksa harus mengungsi ke rumah saudara mereka yang tidak tergenang banjir. Namun, jika bencana banjir hanya setinggi leher orang dewasa biasanya mereka tetap memilih untuk bertahan dengan membuat papan di atas rumah mereka yang berfungsi untuk mengamankan barang-barang dan juga sebagai tempat tidur. Sedangkan untuk keluar rumah baik berinteraksi dengan tetangga maupun mengambil bantuan mereka menggunakan perahu sebagai alat transportasi.

Adaptasi yang dilakukan baik di Bojonegoro dan Lamongan dalam mengatasi kerentanan dan mengurangi resiko akibat banjir, berupa cara membuat atap (*wuwung*) diatas rumah (Lamongan) dan membuat papan (*dipan*) di rumah untuk tidur (Bojonegoro). Ini semua merupakan strategi adaptasi. Strategi adaptasi adalah cara atau metode yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan menurut Altman dalam Gifford, 1987) startegi adaptasi merupakan proses tingkah laku baik individu maupun masyarakat untuk melakukan antisipasi dengan melibatkan perencanaan terhadap suatu peristiwa (dalam hal ini akibat bencana banjir. Tujuan dari strategi adaptasi ini menurut Soerjono Soekanto (2000) untuk :

1. Menghindari ketegangan sosial, misalnya jumlah massa yang ingin menyelamatkan diri dan keluarga, dengan jumlah massa yang cukup banyak pasti ada suatu ketegangan.
2. Mempertahankan kelangsungan keluarga, misalnya dari pada mengungsi yang kemungkinan besar terjadi adanya perpisahan keluarga lebih baik menjaga kelangsungan keluarga dengan cara membuat atap (*wuwung*) diatas rumah (Lamongan) dan membuat papan (*dipan*) di rumah untuk tidur (Bojonegoro).
3. Bertahan hidup.

Bantuan-bantuan untuk para korban bencana ini biasanya untuk desa Gelap dan desa terdekatnya di pusatkan di dusun Dandu Desa Gelap karena dusun ini letaknya lebih dekat dengan Kecamatan namun sulit ditempuh oleh kendaraan. Bantuan-bantuan ini berasal dari pemerintah maupun para relawan dan juga LSM, Parpol dan Universitas. Begitu juga dengan penyelamatan maupun evakuasi penduduk saat terjadi bencana semuanya dilakukan oleh para relawan. Hal ini dikarenakan penduduk sekitar tidak ada yang terlibat, dalam artian peran penduduk adalah sebatas spontanitas saja tanpa adanya koordinasi.

Padahal jika kita lihat korban bencana bukan hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan yang memiliki kebutuhan khusus seperti haid, hamil dan menyusui. Kebutuhan tersebut perempuan akan lebih nyaman jika menyampaikannya kepada perempuan juga. Namun karena dalam hal ini keterlibatan perempuan tidak ada sama sekali, maka selama ini jika ada perempuan yang membutuhkan seperti pembalut biasanya mereka akan berusa membelinya sendiri diwarung terdekat, atau menggunakan handuk yang tidak terpakai meskipun ada juga sedikit diantara mereka yang mengatakannya kepada petugas pencatat kebutuhan para korban.

Demikian juga dengan kebutuhan akan susu bagi balita yang juga tidak tersedia. Hal ini dikarenakan bagi ibu-ibu di desa lebih banyak menggunakan ASI yang umumnya hingga anak usia dua tahun namun masih digunakan hingga anak tersebut berumur lima tahun bahkan lebih. Namun untuk kebutuhan bagi ibu hamil sudah terpenuhi dengan adanya bidan desa dan juga dokter dari relawan. Akan tetapi ada hal yang menjadi kendala yaitu ketika melahirkan yaitu membawa pasien yang merupakan korban bencana ini ke posko karena jarak dan alat transportasi yang hanya berupa perahu.

Demikian juga dengan korban bencana yang tidak memiliki perahu akan mengalami kesulitan karena tidak bisa pergi kemana-mana maupun mengambil bantuan, sehingga mereka harus tetap bertahan di dalam rumah menunggu bantuan datang. Oleh sebab itu, hingga sekarang pemerintah Kabupaten Lamongan masih terus berupaya memperbaiki penanganan bencana di Kecamatan Laren dengan membangun berbagai infrastruktur berupa pembuatan jalan-jalan baru yang bisa menjadi alternative ketika terjadi bencana banjir.

Pandangan masyarakat terhadap bencana banjir sangatlah tidak netral gender. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, perempuan menjadi pihak yang paling beresiko. Bukan hanya karena perempuan dekat dengan alam, tetapi karena alam itu sendiri memiliki dimensi gender (*gendered nature*). Konsep ekofeminisme (*ecofeminism*) berusaha menjelaskan hubungan antara feminisme dan ekologi. Paham yang berkembang awal tahun 1970-an ini menggabungkan elemen feminisme dan gerakan hijau (*green movement*). Ekofeminisme melihat semua manusia dan segala aktivitasnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ekosistem lokal dan global, sedangkan gerakan hijau didasari pada prisip dasar ekologi yang melihat semua organisme dalam kaitannya dengan lingkungan alam. Dalam kerangka pemikiran demikian, menurut Mc Kibben (1990) kegagalan manusia untuk menghormati keterbatasan ekologis telah menyebabkan terjadinya krisis ekologi pada masa sekarang ini. Ekofeminisme ingin menjelaskan bagaimana ketidakadilan yang ada dalam komunitas manusia direfeksikan dalam hubungan yang destruktif antara kemanusiaan dan dunia alamiah yang bukan manusia (*non-human natural world*). Lebih lanjut, konsep ini menaruh perhatian pada

kerusakan ekologis yang disebabkan oleh sistem sosial-ekonomi dan militer kontemporer serta menganalisa beban, biaya, tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan perempuan akibat kerusakan ekologis.

Gadis Arivia dalam artikel Ekofeminisme menyatakan lingkungan hidup berurusan dengan perempuan jika perempuan dan alam mempunyai kesamaan simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin. Dalam praktek-paktek yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada hubungan kekuasaan yang tidak adil, memarginalisasikan perempuan dan merusak lingkungan. Misalnya di masyarakat pedesaan di negara yang sedang berkembang, relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi jenis bantuan bencana alam (Sims, 1994). Seperti yang terjadi di kecamatan Kanor dan Laren, bantuan makanan yang diberikan selalu menurut porsi dan jenis makanan untuk laki-laki. Misalnya makanan yang pedas, kurang matang dan nasi agak keras. Bantuan makanan untuk perempuan dan anak hampir tidak ada. Jenis bantuan makanan dianggap sama. Hal ini kekuasaan yang dimiliki laki-laki untuk lebih memilih jenis maknan yang menguntungkan telah menghalangi perempuan untuk makan yang lebih bergizi, bisa dikonsumsi untuk anaknya.

BAB VII

STRATEGI MITIGASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN BANTUAN BENCANA ALAM

VII. 1. Kebijakan Mitigasi, Penanganan dan Bantuan Bencana Alam di Lamongan dan Bojonegoro.

UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, serta PP No. 25 tahun 2000 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Kota (dan Kabupaten) untuk mengelola pembangunan kotanya, khususnya dalam administrasi pemerintahan dan keuangan. Oleh karena itu sekarang ini pemerintah kota mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang tertujuan meningkatkan peran kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah, penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi – termasuk dalam hal teknologi mitigasi bencana. Akan tetapi, konsentrasi peran yang besar di kota-kota tersebut, tidak lepas dari kenyataan bahwa kota-kota di Indonesia terletak pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap bencana alam, dan karena sangat heterogen dan pluralnya sistem sosial dan perekonomian yang terjadi juga sekaligus rawan terhadap bencana sosial, bencana teknologi, atau bencana buatan manusia lainnya. Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia cenderung tidak jelas. Banyak kejadian alam dan bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia dalam penggunaan sumber daya alam.

Setiap pemerintah kabupaten/kota perlu mempunyai suatu kebijakan mitigasi bencana dengan mengikuti pedoman atau Arahan Kebijaksanaan Mitigasi Bencana yang diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengembangkan dan memadukan berbagai program pembangunan yang berwawasan keamanan dan keselamatan warga kota dari bencana yang mungkin terjadi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu sebab pentingnya penyusunan kebijaksanaan mitigasi ini, disamping mengurangi dampak dari bencana itu sendiri adalah juga untuk menyiapkan masyarakat 'membiasakan diri' hidup bersama dengan bencana, khususnya untuk lingkungan yang sudah (terlanjur) terbangun, yaitu dengan mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan memberikan pedoman bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang biasa terjadi, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan serta kenyamanan dalam kehidupannya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Upaya tersebut antara lain, dengan mengadakan perbaikan tanggul secara terus-menerus agar dapat menahan air banjir. Namun upaya yang telah dilakukan tersebut, ternyata belum cukup mampu untuk mencegah terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan termasuk melakukan pelatihan tanggap darurat bencana yang melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir tidak terkecuali Kecamatan Kanor.

Kabupaten Bojonegoro yang kerap kali dilanda bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo ini, membuat pemerintah Kabupaten Bojonegoro tiada henti-hentinya berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membangun dan memperbaiki tanggul mulai dari Cepu hingga Kacamatan Kanor yang juga merupakan salah satu agenda pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pembangunan dan perbaikan tanggul ini diharapkan bisa menahan air banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Upaya lain yang dilakukan adalah, dengan memantau secara terus-menerus kondisi debit air Sungai Bengawan Solo pada saat musim hujan. Cara ini dilakukan dengan memasang alat pengukur debit air sungai ditujukan sebagai yang ditempatkan pada beberapa titik Kecamatan yang menjadi titik terawan.

Early warning system diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam. Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam terjadinya banjir harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Selain itu menangani masalah bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo dengan mengadakan perbaikan tanggul, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf memberikan bantuan kepada korban banjir di Lamongan. Bantuan yang diberikan berupa satu truk makanan siap saji, obat-obatan, serta 5.000 karung pasir. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lamongan, Masfuk. Bahkan, bantuan juga berasal dari pihak swasta yakni unilever (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim, Jumat, 27 Februari 2009). Mereka memberikan bantuan produk-produk unilever pada korban banjir. Bantuan juga didistribusikan ke daerah banjir lain seperti Bojonegoro dan Tuban melalui Bakorwil Bojonegoro berupa beras, kecap, mi

instan, susu cair kental manis dan minyak goreng.

Wagub Gus Ipul ini juga mengunjungi sejumlah desa yang tergenang banjir di Kecamatan Laren. Kecamatan ini merupakan daerah di Lamongan yang mengalami banjir terparah dan warga yang mengungsi mencapai 4.282 jiwa. Pengungsi itu juga tersebar di beberapa tempat, seperti di sepanjang jalan Bojonegoro-Cepu, gedung serba guna dan beberapa titik tanggul yang mengelilingi Kecamatan Kota Bojonegoro.

Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada petani pascabanjir adalah tiga stok bantuan benih dan pupuk. Bantuan tersebut berasal dari dana APBN, APBD, dan bantuan dari beberapa perusahaan. Stok cadangan benih nasional dari Departemen Pertanian (APBN) sebanyak 120 ton benih padi, 13 ton benih jagung, satu ton benih kedelai, dan 400 ton pupuk NPK. Sedangkan cadangan benih dari APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 102 ton benih padi. Beberapa perusahaan juga memberikan bantuan benih dan pupuk, seperti PT Petrokimia yang menyiapkan 40 ton benih padi, 200 ton pupuk ponscha, dan 200 ton pupuk organik. Begitu juga PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri yang masing-masing menyediakan pupuk organik 100 ton (Sumber: BNPB).

Untuk pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah melakukan upaya seperti mengadakan pelatihan seperti penanganan bencana berbasis masyarakat. Upaya penanganan bencana pada saat ini, mengalami perubahan paradigma maupaun tindakan. Penanganan bencana sesuai dengan UU No. 25 tahun 2007, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/objek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Metode yang tepat dalam penanganan bencana sekarang ini (dan sekarang yang sedang dikembangkan oleh PMI) adalah Kesiapsiagaan Bencana berbasis masyarakat (KBBM/CBDP = *Community Base Disaster Preparedness*). KBBM adalah program berbasis masyarakat yang mendorong pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan resiko bencana yang terjadi lingkungannya. KBBM diterapkan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya penanganan dampak bencana dan pengurangan resiko. KBBM diterapkan di daerah rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang/tsunami dan dimana masyarakatnya mudah bekerjasama (bergotong royong) untuk melaksanakan upaya mitigasi

atau pengurangan resiko. KBBM bermanfaat bagi masyarakat yang paling rentan yang secara langsung terancam kondisi kesehatan, kehidupan ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Pelatihan ini merekrut 145 peserta yang nantinya akan menjadi relawan yang merupakan perwakilan dari masing-masing Kecamatan yang menjadi daerah korban bencana. 145 relawan ini tergabung dalam satu koordinasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para relawan ini masuk kedalam suatu struktur organisasi yang diberi nama Tagana. (Taruna Siaga Bencana) Tagana juga masuk dalam struktur organisasi Kecamatan yang berada langsung di bawah Satpol PP. Tugas utama dari Tagana adalah :

1. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
2. Membantu kelancaran distribusi bantuan dari Kabupaten ke lokasi-lokasi bencana.

Tagana sendiri sudah dibentuk dua tahun yang lalu. Awal pembentukannya Tagana bernama Satgas Sos (Satuan Tugas Sosial). Para relawan Satgas Sos ini, mengikuti pelatihan yang diadakan di Malang selama dua minggu. Setelah itu, para relawan mendapatkan sertifikat sebagai tanda anggota resmi Satgas Sos serta mendapatkan tunjangan satu bulan seratus ribu rupiah (Rp 100.000,-). Kemudian, seiring dengan perubahan undang-undang mengenai penanggulangan bencana, nama Satgas Sos berubah menjadi Tagana karena sifatnya yang mencakup Nasional. Jadi para relawan tidak hanya bertugas di daerahnya sendiri yang terkena bencana banjir, melainkan juga bertugas di daerah lain yang mengalami bencana. Namun, sekarang ini keberadaan Tagana digantikan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) karena menyesuaikan dengan perubahan undang-undang mengenai penanggulangan bencana. Karena menurut Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 yang telah mengesyahkan lembaga pengelolaan bencana yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengganti Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Fungsi utamanya adalah berkoordinasi implementasi serta komando untuk pengelolaan bencana sebagai lintas kementrian/lembaga terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh pada tahapan pra bencana, keadaan darurat sampai pasca bencana (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008 : 19).

Tugas pokok PNPB termasuk :

1. Mempersiapkan petunjuk dan arah untuk penanggulangan bencana di setiap fase bencana (pencegahan dan kesiapsiagaan, fase ketika terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua, tanpa ada perbedaan yang bersifat deskriminatif, seperti kenyakinan, suku bangsa atau **jenis kelamin**.
2. Membangun kebutuhan-kebutuhan untuk pengelolaan bencana yang standar.

3. Menyampaikan informasi berkaitan dengan bencana pada masyarakat.
4. Menyediakan pedoman untuk membangun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di tingkat propinsi (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008 : 19).

Dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana, dimana penekanan diberikan pada proteksi dan keselamatan tanggungjawab dan implementasinya merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat. Pada dasarnya paradigma ini dari pengelolaan bencana adalah untuk meningkatkan pengelolaan bencana tidak hanya di fase tanggap yaitu ketika keadaan bencana datang atau ketika dalam keadaan darurat, akan tetapi juga pengelolaan bencana termasuk pengelolaan untuk mengurangi resiko dalam setiap fase bencana yaitu fase persiapan (mitigasi), keadaan darurat dan fase sesudah bencana (fase rehabilitasi dan fase rekonstruksi).

Perbedaan lainnya adalah pengelolaan bencana dalam paradigma ini lebih difokuskan pada penguatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) serta pemangku kepentingan sebagai subyek dalam pengelolaan bencana. Dengan mekanisme ini, diharapkan implementasi pengelolaan bencana akan bekerja baik, menciptakan rasa kepeduliaan, keterlibatan dan kebersamaan masyarakat dalam mengelola bencana.

Sebagai salah satu Kecamatan yang juga kerap kali dilanda bencana, kecamatan Kanor juga mengirim perwakilannya sebagai relawan BPBD sebanyak empat orang. Empat orang tersebut berasal dari Desa Kabalan yaitu Sholihin, Ilham, sedangkan dari desa Tambah rejo adalah Khamim dan Muis. Pelatihan yang dilakukan adalah cara membuat dapur umum, termasuk belajar memasak dan juga bagaimana cara mengevakuasi korban banjir.

Dalam pelatihan pengelolaan bencana ini, tidak dilibatkannya perempuan. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan bencana, dimensi gender tercantum sebagai asas, prinsip serta tujuan dari UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari pelatihan tersebut diharapkan didalam pelaksanaan di lapangan para relawan ini dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan bencana. Pada initinya, penanganan pada korban laki-laki dan perempuan pada batasan tertentu perlu mempertimbangkan siapa melayani siapa.

Pada pelatihan ini perspektif gender, hampir tidak ada dalam analisis bencana. Dampaknya minimnya pengetahuan pada perempuan tentang kejadian penanggulangan bencana. Misalnya pada pra bencana yang terkait dengan akses penyuluhan dan informasi tentang manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal

sebagai Siklus Manajemen Bencana, yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah daerah melibatkan perempuan memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok rentan bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah daerah dan masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah menyebabkan perempuan mempunyai resiko yang lebih besar terhadap bencana banjir.

Pelatihan terhadap relawan ini juga selalu dikoordinasi. Koordinasi dilakukan dua kali dalam setahun di Kabupaten Bojonegoro. Pelatihan-pelatihan tersebut di pandu oleh PMI (Palang Merah Indonesia) dan dinas-dinas terkait seperti dinas Kesehatan, dinas PU, dinas Sosial, dinas Kebersihan dan Badan Kesbang Linmas.

Pelatihan dari PMI, program yang dilakukan adalah Pertolongan Pertama Berbasis Masyarakat (*Community Base First Aid*). Sebagai salah satu bentuk program berbasis masyarakat, pertolongan pertama berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk program yang diunggulkan oleh Palang Merah Indonesia dalam rangka pengurangan resiko bencana. Tujuan CBFA adalah untuk mengembangkan dasar pelatihan pertolongan pertama dan juga untuk melengkapi dengan memasukkan aspek kesehatan masyarakat (misal pencegahan, promosi kesehatan dan control terhadap wabah penyakit), managemen bencana (kesiapsiagaan dan respon). CBFA juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi mengedentifikasikan prioritas kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat serta menemukan solusi dari permasalahan mereka untuk jangka waktu yang panjang. CBFA mempunyai aspek dari pertolongan pertama untuk kecelakaan umum yang ada di masyarakat. Selain itu CBFA ini, juga memfokuskan kepada masalah air bersih dan sanitasi lingkungan. Pelatihan tersebut meliputi mendirikan tenda, memasak dan donor darah serta bagaimana cara menolong orang yang tenggelam. Ada ataupun tidak ada bencana koordinasi harus tetap dilakukan karena datangnya bencana tidak bisa diprediksi.

Selain pelatihan dari PMI, juga pelatihan Dinas Sosial tentang Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Penanggulangan Bencana mempertihatkan bahwa inti dari pelatihan ini secara eksplisit mencantumkan gender pada materi Penanganan Kesehatan Reproduksi dan Pengarusutamaan Gender, Managemen Penanganan Air Bersih dan Managemen Penanganan Masalah Gizi Darurat. Dalam pelatihan tersebut memang syarat dengan upaya penanganan bantuan yang mempertimbangkan kepentingan gender. Isu gender dapat diintegrasikan kedalam kurikulum dalam pelatihan. Namun dalam kenyataan pelatihan ini tidak melibatkan perempuan, sehingga ketika terjadi bencana kebutuhan perempuan sebagai kelompok rentan, hanya menjadi bagian kecil dari kelompok masyarakat yang seharusnya diperhatikan, sehingga perempuan sebagai subyek yang perlu dilibatkan secara aktif.

Pada saat terjadi bencana banjir terparah yaitu akhir tahun 2007 memasuki tahun 2008, pengevakuasian warga dilakukan dengan menggunakan perahu yang disewa dari penduduk.

Banjir besar pada saat itu diakibatkan oleh tanggul yang jebol sehingga peran dari relawan adalah membuat dapur umum, mengevakuasi warga dan berbaur dengan warga untuk menjadi komando dalam penanganan bencana karena merekalah yang tahu apa yang harus dilakukan. Para relawan ini mengkomando warga untuk mencari pasir dan memasukkannya ke dalam karung. Pasir-pasir ini kemudian digunakan untuk menahan air di tanggul. Para relawan inilah yang mengkoordinir kantong-kantong dari warga dan juga mencari pasir untuk penahan tanggul.

Namun relawan BPBD hanya terfokus pada tanggap darurat dan lemah dalam koordinasi dengan satuan pelaksana daerah. Hal ini disebabkan :

1. Keanggotan di BPBD meskipun memiliki struktur tetapi tidak terikat dan tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Mereka disatukan atas dasar keikhlasan. Mereka dibentuk atas dasar kerelaan sehingga dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki jiwa mengabdi di dalamnya.
2. Persepsi belum sama baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat kecamatan dalam penanggulangan bencana terutama berkaitan dengan Juklak maupun SOP nya. Karena setiap instansi memiliki Juklak dan SOP nya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.
3. BNPM belum mempunyai program yang memadai berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir seperti fase sebelum terjadi banjir, pada saat banjir dan sesudah banjir.
4. Anggaran belum memadai (belum dianggaran dalam APBD). Dalam pelaksanaan berorganisasi, BPBD ini tidak memiliki sumber dana.
5. Bencana lebih dilihat pada waktu terjadinya saja.

Keanggotaan dari BPBD sendiri sebagian besar diambil dari Tagana dan Satgas Sos. Keberadaan relawan ini sangat penting dalam penanganan korban bencana karena datangnya bencana juga tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, menurut penuturan Khamim (relawan dari desa Tambah Rejo Bojonegoro) perlu adanya kepedulian terhadap relawan. Kepedulian ini maksudnya bukan pemberian uang, akan tetapi lebih kepada adanya suatu wadah atau organisasi yang benar-benar terstruktur, mempunyai visi dan misi, adanya pengurus dan dana operasional bagi kelangsungan organisasi BPBD tersebut.

Selain BNPB manajemen bencana kurang berjalan dengan baik, juga pemahaman masyarakat terhadap bencana juga masih lemah. Masyarakat belum memahami dan memperhatikan sungguh-sungguh peringatan dini, ramalan cuaca yang diumumkan setiap saat

oleh Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) karena ada kalanya masyarakat menganggap peringatan dari BMG tersebut belum akurat.

Bencana banjir yang setiap tahun melanda daerah di sepanjang DAS Bengawan Solo selain kecamatan Kanor Bojonegoro, juga termasuk Kecamatan Laren Lamongan. Di kecamatan Laren Lamongan telah menimbulkan berbagai dampak dan kerugian yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan bencana banjir yang melanda di Kecamatan Laren Lamongan terjadi dalam skala besar sehingga bencana banjir yang melanda acap kali merusak rumah dan pertanian warga dan fasilitas publik yang lain. Mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir di Kecamatan Laren Lamongan ini, maka pemerintah Kecamatan Laren Lamongan tidak henti-hentinya melakukan upaya penanggulangan bencana banjir salah satunya yaitu dengan membuat posko-posko bencana saat terjadi bencana. Posko bencana tersebut terletak di lima titik yaitu posko 1 terletak di desa Nggelap Kecamatan Laren, Posko 2 terletak di Kantor Kecamatan Laren, Posko 3 terletak di Klagen Kecamatan Maduran, Posko 4 terletak di Babat Birik (Desa Klagen) Kecamatan Maduran dan Posko 5 terletak di desa Pengean Kecamatan Maduran. Selain itu juga terdapat posko-posko lainnya yang didirikan oleh para relawan baik LSM, Parpol maupun Universitas lokal UNISDA (Universitas Darul Ulum) Lamongan.

Keberadaan posko-posko bencana ini sangat penting dalam proses penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Laren karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Burhan selaku Kamtibmas Kecamatan Laren bahwa dari 20 desa yang ada terdapat 13 desa yang rawan terhadap bencana banjir. Adapun desa-desa di Kecamatan Laren tersebut yang menjadi titik rawan banjir adalah desa Laren, desa Pelangwot, desa Bulu Tigo, desa Siser, desa Mojoasem, desa Pesanggrahan, desa Keduyung, desa Centini, desa Nduri Kulon, desa Njabo, desa Ndateng, desa Gelap dan desa Karangwungu Kulon. Kondisi akibat bencana banjir terparah adalah desa Gelap yang letaknya berbatasan dengan desa Widang Kabupaten Tuban yang juga merupakan daerah rawan bencana banjir. Sedangkan 7 desa lainnya yang tidak terkena bencana banjir di Kecamatan Laren adalah desa Nggampeng Sejati, desa Taman Prijet, desa Nggodo, desa Mbulu Mbrangsi, desa Mbrangsi, desa Tejoasri, dan desa Karang Tawas.

Berbeda dengan para relawan di Lamongan yang selalu siap siaga di posko. Para relawan ini lebih telah dibekali dengan keterampilan penanganan bencana. Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani bencana termasuk bekerja sama dengan pihak universitas lokal yaitu UNISDA (Universitas Darul Ulum) yang ada di Kabupaten Lamongan. Kerjasama tersebut antara lain dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara penyelamatan saat terjadi bencana dalam istilah lain tanggap darurat bencana.

Adapun yang dilakukan dalam pelatihan tersebut adalah mengajarkan kepada warga yang menjadi peserta cara berenang dan bagaimana jika menolong orang yang hanyut terbawa arus. Namun pelatihan tersebut jarang ada yang berminat untuk mengikuti karena lemah koordinasi. Selain itu juga terbentur oleh tidak adanya waktu bagi warga untuk mengikuti pelatihan tersebut karena mereka harus bekerja. Seperti yang dikatakan oleh Kusairi kepala desa Gelap :

> *"Kalau pelatihan pernah dari teman-teman mahasiswa UNISDA. Warga dilatih renang, terus sama cara menyelamatkan kalau ada orang yang terbawa arus, tapi tidak ada yang ikut soalnya pada bekerja. Selain itu, juga tidak ada koordinasi yang jelas jadinya mereka istilahnya mrotol dewe-dewe* (putus sendiri-sendiri)".

Fungsi dari keberadaan posko-posko bantuan tersebut adalah untuk menyalurkan bantuan ke desa-desa yang terkena bencana banjir serta menyalurkan kebutuhan masyarakat korban bencana banjir mengenai apa saja yang dibutuhkan karena kebutuhan antara para korban bencana ini juga berbeda-beda. Misalnya saja kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua. Secara umum para korban bencana ini membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan air bersih, namun ada beberapa kebutuhan yang terkadang tidak serta merta tersedia ataupun tidak disediakan misalnya saja kebutuhan perempuan akan pembalut, kamar mandi yang terpisah dengan laki-laki, atau tenda yang terpisah dengan laki-laki dan juga kebutuhan anak-anak akan makanan tambahan seperti susu dan tempat yang nyaman untuk belajar. Namun sejauh ini, pemerintah Kecamatan Laren sudah berusaha untuk mengupayakan agar semua kebutuhan para korban bencana ini bisa terpenuhi seperti pembalut, susu, makanan, pakaian, obat-obatan dan bantuan yang lainnya.

Alur pemberian bantuan ini biasanya dilakukan dengan cara spontanitas dimana bantuan yang datang langsung disalurkan ke posko-posko yang sudah ada, kemudian bantuan disalurkan melalui kepala desa yang dihubungi lewat telepon supaya para kepala desa yang daerahnya terkena bencana segera mengambil bantuan yang ada di posko. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain biasanya ada petugas dari desa yang akan mencatat semua kebutuhan yang dilaporkan oleh para korban bencana kemudian berbagai kebutuhan yang telah tercatat tersebut diberitahukan kepada pihak desa dan kecamatan sehingga kebutuhan bisa langsung tertangani dalam waktu paling lama tiga jam.

Selain lima posko yang telah ada, masih banyak lagi posko-posko yang didirikan oleh berbagai LSM, Parpol maupun Universitas. Keberadaan posko-posko ini sangat membantu sekali dalam penanganan bencana banjir di Kecamatan Laren mengingat Kecamatan Laren

merupakan salah satu lokasi yang terkena bencana banjir paling parah di Kabupaten Lamongan karena secara geografis letaknya langsung berada disepanjang DAS Bengawan Solo yang jika meluap bisa menenggelamkan rumah penduduk di Kecamatan Laren hingga 3 -4 meter.

Cara yang spontanitas dalam penanganan bencana ini dilakukan karena memang di Kecamatan Laren Lamongan belum ada koordinasi penanganan bencana. Menurut Pak Burhan selaku Kamtibmas sebenarnya di Kabupaten Lamongan ada susunan penanggulangan Bencana yaitu Satlak PBP (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi). di Kecamatan Laren. Namun untuk tingkat desa belum terstruktur secara administrasi. Selain itu, dalam susunan struktur Satlak PBP pun perempuan sama sekali tidak dilibatkan sehingga belum ada penanganan bencana yang secara khusus menangani kebutuhan perempuan seperti kebutuhan saat menstruasi, hamil, melahiran maupun menyusui. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Burhan bahwa:

> *"Perempuan tidak dilibatkan karena waktu rapat tidak ada yang usul, lagi pula pembentukan Satlak PBP juga mengacu pada Kabupaten dimana belum ada anggota yang perempuan, termasuk sekretaris anggotanya adalah laki-laki."*

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Laren selama ini belum banyak melibatkan perempuan terutama dalam mengambil kebijakan maupun menetapkan strategi penanggulangan bencana. Namun dalam penanganan saat terjadi bencana perempuan dilibatkan akan tetapi hanya yang mereka bertugas di dinas saja seperti bidan, sedangkan perempuan dari masyarakat biasa belum ada bahkan untuk terlibat dalam berbagai pelatihan tanggap darurat bencana sekalipun. Sebagaimana penuturan Pak Burhan Bahwa:

> *"Perempuan sama sekali tidak dilibatkan, kalau untuk mencukupi kebutuhan perempuan seperti pembalut itu sudah disediakan karena ada donatur yang juga menyumbang pembalut. Terus kalau untuk yang hamil atau melahirkan sudah ada bidan puskesmas yang bertugas di setiap posko, selain itu juga banyak tenaga medis dari luar."*

Kalau ada perempuan yang terlibat dalam penanganan bencana, keterlibatannya hanya jika terjadi bencana banjir yaitu bertugas sebagai pengelola bahan makanan, sedangkan yang lainnya dikerjakan oleh laki-laki. Adapun perempuan yang dilibatkan juga bukan dari penduduk yang menjadi korban bnecana akan tetapi dari dinas-dinas pemerintahan maupun para relawan.

Dari gambaran diatas terkait dengan penanganan bencana alam di Bojonegoro dan Lamongan, mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana. Mitigasi dilakukan untuk memperkecil,

mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*man-made disaster*).

Mitigasi sudah dilakukan baik di kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap bencana banjir adalah melalui pembangunan tanggul/dam, pembuatan kawasan resapan air dan pembuatan polder sebagai pengendali banjir.

Seperti pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Materi pokok yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana antara lain adalah tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana, kelembagaan, peran lembaga usaha dan lembaga internasional, penyelenggaraan penanggulangan bencana (pra bencana - saat tanggap darurat - pasca bencana), pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Salah satu amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana adalah dibentuknya lembaga khusus yang menangani bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini karena negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman bencana. Oleh karena itu Undang-undang Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai payung hukum dalam manajemen bencana.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah diatur dari berbagai macam unsur di tingkat kabupaten/kota sampai pada tingkat masyarkat. Adapun susunan dari tingkat kabupaten/kota meliputi :

- Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PB menunjuk Komandan Penanganan Darurat (*Incident Commander*) untuk mengendalikan operasi.
- Komandan Penanganan Darurat mempunyai tugas :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir.
  2. Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana
  3. Membuka POSKO di lapangan dan mengaktifkan Ruang Posko Crisis Centre
  4. Memberlakukan Rencana Operasi menjadi Perintah Operasi Tanggap Darurat.

5. Melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta saran-saran kepada Ketua SATLAK PB yang tembusannya disampaikan kepada Ketua SATKORLAK PB dan Ketua BAKORNAS PB Cq Kalakhar BAKORNAS PB melalui Posko Crisis Centre.

Unsur Teknis dari Dinas atau Badan terkait Dalam pelaksanaan tugas Satlak PB didukung oleh instansi Teknis/Dinas/lembaga tingkat Kabupaten/ Kota antara lain :

- Dinas Kesehatan
- Dinas PU
- Dinas Sosial
- Dinas Kebersihan
- Badan Kesbang Linmas/lembaga terkait.

Instansi Teknis Pusat di Kabupaten/Kota Pelaksanaan tugas SATLAK PB berserta unsur teknis dalam penanggulangan banjir juga didukung oleh Instansi Teknis Pusat antara lain :

- BMG
- TNI (KODIM)
- Kepolisian (POLRES)
- BASARNAS (SAR)

Unsur Masyarakat

Unsur masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya penggulangan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai, antara lain :

- PMI
- Pramuka
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- RAPI, ORARI
- Organisasi/pihak-pihak lain.

Kebijaksanaan mitigasi merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana terutama di daerah. Mitigasi bencana meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap bahaya alam dan buatan manusia, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda.

Tujuan utama (*ultimate goal*) dari Penyusunan Kebijaksanaan Mitigasi Bencana ini adalah sebagai berikut :

a. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk , seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi (*economy costs*) dan kerusakan sumber daya alam.
b. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan .
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat (*public awareness*) dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman (*safe*).

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda sebesar Rp 211 Miliar di kabupaten Bojonegoro dan Rp 178 Miliar di kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bencana di negara kita masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Selama ini, manajemen bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-waktu saja, padahal kita hidup di wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana. Oleh karena itu pemahaman tentang manajemen bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

VII. 2. Keterlibatan Perempuan Dalam Managemen Bencana Banjir

Perempuan mengalami akibat secara tidak seimbang ketika terjadi kejadian bencana banjir, dimana pada umumnya sebagai akibat status jender mereka di dalam masyarakat. Sebenarnya bagaimanapun juga perempuan merupakan bagian penting dalam upaya tanggap darurat dan mitigasi bencana. Apakah sudah mewakili peran jender ketika ada bahaya banjir. Banyak memunculkan isu yang beda perspektif. Beberapa penulis seperti: Enarson, Shrader, Delaney, Byrne, dan Baden; sudah membawa muatan jender dalam menganalisa tanggapan dan mitigasi bencana, dimana beberapa diantaranya menemukan hasil yang sangat menarik. Mengapa perempuan lebih rentan? Elaine Enarson (2000) dalam tulisannya yang bejudul *Gender and Natural Disasters* menyatakan: "... jender membentuk dunia sosial di dalamnya, dimana berbagai peristiwa alam terjadi." Perempuan 'dibuat' menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang mereka bangun. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam kesiapsiagaan bencana, mitigasi, dan rehabilitasi. Hal ini tampak pada anggota dari BPBD di Bojonegoro tidak ada yang perempuan, sehingga saat membuat dapur umum para relawan ini kesulitan untuk memasak karena mereka juga harus melakukan penyelamatan. Seperti pada saat banjir tahun 2007

tersebut ada salah satu warga yang terisolasi di Desa Pilang Bojonegoro. Karena letaknya yang terpensil sehingga evakuasi sulit dilakukan karena mereka harus berbagi tenaga untuk mengurus dapur umum dan evakuasi. Maka, para relawan ini sering meminta bantuan kepada warga yang perempuan untuk memasak di dapur umum.

Demikian juga dalam program-program penanganan bencana di Kabupaten Lamongan ini keterlibatan perempuan masih sangat kecil. Perempuan yang dilibatkan dalam penanganan bencana biasanya mereka yang memang bekerja di dinas pemerintahan. Instansi dinas pemerintahan seperti dinas perhutani, dinas pertanian, Satpol PP, Koramil Laren, dan dinas terkait lainnya yang ikut tergabung dalam penanganan bencana. Sedangkan untuk perempuan dari masyarakat sekitar sama sekali belum dilibatkan, contohnya dalam program pelatihan yang semua pesertanya adalah laki-laki. Ketika ditanya, Kusairi sendiri tidak tahu apa sebabnya, yang jelas dari pusat memang semua yang terlibat adalah laki-laki. Seperti penuturan Kusairi dibawah ini :

> *"Kalau yang ikut pelatihan-pelatihan itu memang laki-laki semua, kalau perempuan saya kok gak pernah dengar ada yang ikut. Tapi saya juga tidak tahu kenapa soalnya setahu saya kalau dari pusat itu yang ikut pelatihan ya yang laki-laki semua".*

Pendapat dari bapak Kusairi diatas, bahwa program penanganan bencana di Kabupaten Lamongan masih mengacu pada stereotype gender yaitu kebijakan penanggulangan bencana seringkali menempatkan laki-laki pada peran gendernya misalnya sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, tulang punggung ekonomi keluarga, terlibat dala kegiatan kegotong royongan serta menempatkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, mengurus kegiatan domestic. Hal ini merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk tidak pernah dilibatkan seperti dalam pelatihan penanganan bencana, sehingga akses untuk mendapatkan informasi tidak didapat secara langsung atau didapat melalui orang lain atau suami. Sebagai akibatnya bisa terjadi distorsi informasi dan ketika terjadi bencana, perempuan tidak dapat melakukan tindakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam hal ini perempuan tidak mendapatkan yang adil dalam mendapatkan akses dan informasi berkaitan dengan program penanganan bencana.

Menurut pandangan ekofeminisme bahwa bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari ancaman akibat bencana alam (dalam hal ini banjir). Perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan sumber daya alam karena itulah perempuan kemudian menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap risiko dan dampak akibat bencana banjir.

Akses dan kontrol perempuan di Bojonegoro dan Lamongan hilang akibat sumber daya alam yang ada sudah tidak dapat dikelola lagi. Misalnya, menjadi buruh tani, membuat anyaman dari rotan dan daun pandan seperti tikar, bakul, dan tas tidak lagi bisa dilakukan perempuan. Dalam hal ini, perempuan tidak pernah disentuh berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Padahal kenyataan di Bojonegoro dan Lamongan sebagai buruh tani, membuat anyaman dari rotan dan daun pandan seperti tikar, bakul, dan tas adalah perempuan. Hal ini ekonomi keluarga banyak ditopang oleh peranan kaum perempuan, tulang punggung dan pencari nafkah. Ekofeminisme sesungguhnya adalah cara pandang menganalisis persoalan lingkungan hidup dengan menggunakan pisau analisis feminis. Di sini feminis menilai akar persoalan, dampak yang ditimbulkan, khususnya spesifik pada kelompok rentan antara lain perempuan.

Keterkaitan alam dan perempuan terutama yang menjadi titik fokusnya adalah kerusakan alam yang mempunyai keterkaitan langsung dengan penindasan perempuan. Dalam Ekofeminisme perempuan ditempatkan sebagai "sosok yang lain" sejajar dengan sosok yang lainnya yang diabaikan dalam patriarkhi seperti kelompok ras, anak-anak, kelompok miskin dan alam. Budaya Patriarkhi menyebabkan adanya dominasi terhadap perempuan, kelompok ras, anak-anak, kelompok miskin dan alam, dan menempatkan mereka sebagai subordinate dibawah laki-laki yang mempunyai sifat yang unggul, netral, pengelola "sah" bumi dan seisinya.

Dalam menggali keterkaitan antara penindasan "sosok yang lain" (perempuan, kelompok ras, anak-anak, kelompok miskin), kerusakan alam dan dominasi patrarkhi, ekofeminisme menggunakan pendekatan analisis gender dan lebih memfokuskan keterkaitan ini pada penindasan perempuan, kerusakan alam serta dominasi patriarki sebagai penyebabnya. Hal tersebut disebabkan Pertama, Ekofeminis melihat yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah perempuan. Kedua, Peranan gender perempuan (sebagai pengatur dari economi domestik) bertindihan (*overlap*) dengan permasalahan kerusakan alam dan lingkungan. Ketiga, beberapa ideologi barat berisikan konsep-konsep pendominasian alam oleh gender laki-laki. (Warren, 1996 : 20).

Perempuan yang tidak memiliki pekerjaan setelah terjadi bencana, 'dianggap' bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik seperti mengurus anak, memasak untuk keluarga. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mendapatkan pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat, meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggungjawabnya oleh perempuan. Hal ini sangat nampak terutama di Lamongan. Perempuan di Lamongan terpaksa mengurus dan memasak mie instan dan susu

cair kental untuk anak dan keluarganya tanpa bantuan dari suami. Mie instan dan susu cair kental sangat tidak cocok untuk anak-anak. Namun keterbatasan bahan makanan, semua bantuan itu tetap mereka konsumsi. Sedangkan suaminya mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan mereka. Demikian juga di Bojonegoro, pasca bencapun, perempuan harus memasak mie instan, maupun beras (yang agak keras) untuk anak dan keluarganya. Mereka terpaksa memberikan bantuan bahan makan untuk keluarga daripada kelaparan.

Rumah atau tempat tinggal seringkali hancur akibat bencana banjir, banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat perlindungan sementara. Keterbatasan fasilitas untuk kehidupan sehari-hari, misalnya aktifitas memasak berarti bahwa beban domestik perempuan bertambah pada saat yang bersamaan dengan beban ekonominya, memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimilikinya untuk mencari alternatif sumber pendapatan keluarga. Seringkali begitu ada bencana banjir, aktifitas perempuan untuk memasak, mencuci dan mandi menjadi sangat terbatas. Mereka terpaksa menggunakan air hujan tersebut untuk memasak, mencuci dan mandi di tempat tinggal atau di pengungsian tersebut. Mereka sangat susah mendapatkan air bersih. Air mineral didapat dari bantuan hanya 2 – 5 liter perhari, hanya untuk minum saja.

Sifat bencana itu sendiri dapat meningkatkan kerentanan perempuan. Tak terkecuali adanya gejala peningkatan perempuan sebagai kepala rumah tangga dan kenyataan bahwa mayoritas penghuni tempat perlindungan sementara adalah kaum perempuan. Yang tak kalah pentingnya yaitu kesehatan kaum perempuan, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, yang sejak awal harus dikenali sebagai komponen kunci dalam upaya pemberian bantuan/pertolongan setelah bencana. Bagaimanapun juga perhatian kepada mereka tidaklah cukup dan kesehatan perempuan mengalami penderitaan yang tidak sebanding dengan hasilnya. Kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, tidak pernah terpantau oleh dinas Kesehatan baik di Lamongan dan Bojonegoro. Banyak ibu-ibu pasca banjir mengalami penyakit gatal pada kemaluannya. Ibu–ibu merasa malu dan tabu untuk menceritakan berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual pada tim medis. Mereka hanya menunjukkan penyakit gatal-gatal di badan, diare dan mutaber yang lebih nampak kelihatan dibandingkan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Kesehatan reproduksi terutama menyangkut dengan reproduksi perempuan sebagai hal yang "tabu" untuk dibicarakan dan diperiksa karena berhubungan dengan konsep "aurat". Dengan adanya mitos "ketabuan" untuk tidak membicarakan permasalahan seksual dan reproduksi secara publik dan terbuka maka informasi yang berhubungan dengan itu menjadi sangat kurang didapatkan oleh kaum perempuan (Saifuddin, 1999:6). Hal ini didukung oleh

Abdullah (2001:86) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh ideologi agama (dalam hal ini kyai). Mengingat mayoritas masyarakat Lamongan dan Bojonegoro adalah beragama Islam.

Meskipun ada perempuan yang mengeluhkan kesehatan reproduksi seperti yang dialami Sumini warga desa Gelap Lamongan dan mereka datang ke puskesmas.

> *"waktu bencana banjir di 2007, saya mandi dan masak menggunakan air hujan, eh ternyata mbak, maaf kemaluan saya tiba-tiba gatal. Dan saya air hujannya tinggal selutut saya ke puskesmas. Gatal-gatal di kemaluan saya tidak papa,mbak, kata bidan di puskesmas".*

Nampaknya tidak banyak yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas. Mengingat keterbatasan ketersediaan obat, keterbatasan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi perempuan, serta kecenderungan menganggap keluhan perempuan sebagai tidak penting.

Selain itu (Adrina, 1998 : 158) banyak petugas kesehatan berpandangan bahwa sebaiknya orang yang datang (dalam hal ini perempuan) pada petugas kesehatan tidak perlu diberi informasi (akses) terlalu banyak. Dalam banyak pratek pelayanan kesehatan reproduksi, sering perempuan sebagai pasien tidak mendapat penjelasan mengenai penyakitnya, baik tentang diagnosisnya maupun *treatment* yang diberikan kepadanya, seperti kandungan obat ataupun suntikan yang diterima. Ketidaksediaan mereka menginformasikan penyebab maupun penanganan terhadap masalah kesehatan reproduksi dapat didasarkan oleh berbagai sebab. Salah satunya mengendalikan informasi, mereka bisa mempertahankan kekuasaannya dihadapan perempuan sebagai pasien. Atau justru keengganan pihak petugas kesehatan menginformasikan kondisi perempuan mencerminkan bahwa mereka menyamarkan pengetahuannya yang terbatas atau ketidakyakinannya terhadap diagnosis yang mungkin kompleks. Sebaliknya perempuan sebagai pasien, juga memiliki pengetahuan yang terbatas tentang masalah kesehatan reproduksi dan dianggap bukanlah sebagai suatu penyakit. Apalagi masalah kesehatan reproduksi belum mendapat perhatian di puskesmas dan laporan di puskesmas tidak muncul sebagai masalah kesehatan reproduksi. Penyakit typus, malaria, diare, gatal-gatal dimasukkan dalam laporan bulanan di puskesmas sampai ke Dinas Kesehatan. Namun masalah kesehatan reproduksi tidak muncul baik di puskesmas maupun di Departemen kesehatan karena kesehatan reproduksi di kalangan perempuan dianggap tidak bermasalah (Mohamad, 1996 : 31-32).

Namun disisi lain bencana alam juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menghadapi tantangan dan mengubah status jender mereka di dalam masyarakat.

Perempuan sudah membuktikan bahwa keberadaan dirinya sangat dibutuhkan ketika tiba saatnya untuk memberikan tanggapan atas peristiwa bencana. Pada waktu bencana banjir akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008, perempuan di Bojonegoro dan Lamongan sudah terlihat membangun rumah, menggali sumur dan parit, menyelamatkan persediaan air, dan membangun tempat perlindungan. Meski seringkali harus melawan keinginan laki-laki, perempuan juga rela dan ternyata mampu mengambil peran aktif dalam apa yang secara kebiasaan dianggap sebagai tugas laki-laki. Ini dapat memberikan pengaruh dalam mengubah konsepsi masyarakat terhadap kemampuan perempuan.

Gerakan perempuan di Lamongan hampir tidak ada, namun berbeda di Bojonegoro. Sukowati merupakan salah satu sekretaris perempuan desa Simbatan di Kecamatan Kanor Bojonegoro. Sekretaris desa Simbatan ini melakukan koordinasi dengan ibu PKK di desanya untuk membentuk kelompok memberikan bantuan khusus untuk kebutuhan perempuan. Meskipun bantuan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak seperti mie instan dan susu cair kental. Menurutnya sebenarnya perempuan ternyata paling efektif dalam menggerakkan massa dalam masa tanggap darurat. Pengorganisasian masyarakat semacam ini ternyata diperlukan dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sebagai hasil upaya tanggap bencana yang mereka lakukan, perempuan juga sedang dalam proses mengembangkan keterampilan baru yaitu pengelolaan sumberdaya alam dan pertanian dalam lingkungan yang sesuai, kemudian mereka mentransfernya ke dalam lapangan kerja.

Perhatian jender dalam pemberian bantuan baik di Bojonegoro dan Lamongan dilewatkan atau dilupakan karena dianggap tidak penting. Kesempatan yang unik untuk mengubah peran tradisional jender yang berharga dalam situasi bencana, akan sia-sia jika perempuan tidak berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut, atau jika pengambil keputusan mengabaikan hal tersebut. Organisasi yang dibentuk kaum perempuan di tingkat masyarakat dan nasional sangatlah penting jika ukuran pemulihan adalah tanggapan terhadap kebutuhan perempuan dan yang berhubungan dengannya. Pemberian bantuan yang tidak melibatkan perempuan disebabkan :

Pertama, pandangan sempit bahwa sebagai konsekuensi terjadinya bencana menuntun ke satu fokus kondisi fisik semata, kondisi sosial diabaikan, perhatian terhadap jender dipinggirkan. Perempuan akan terus mengalami ketidakseimbangan pengaruh yang ditimbulkan oleh bencana alam, kecuali jika para pekerja sosial kebencanaan dan pejabat pemerintah mengakui adanya status kerentanan mereka dan usaha memberikan bantuan yang sesuai untuk bereaksi terhadap hal ini.

Kedua, kebanyakan upaya pemberian bantuan/pertolongan dimaksudkan untuk keseluruhan penduduk yang terkena bencana. Ketika mereka bersandar pada struktur distribusi sumberdaya yang mencerminkan struktur masyarakat patriarki, perempuan terpinggirkan dalam akses ke sumber bantuan/pertolongan.

Ketiga, kekurangselarasan antara ukuran tanggap bencana dan rencana pembangunan jangka panjang berarti bahwa kesiapsiagaan bencana dikorbankan di hadapan usaha tanggap bencana. Kaum perempuan sudah menyadari bahwa cara terbaik untuk mengurangi dampak negatif bencana adalah dengan persiapan untuk menanggulanginya. Perempuan memiliki peran advokasi yang kuat dalam mengukur kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, sebab mereka memahami bencana apa yang mengancam kehidupan mereka sehari-hari.

Keempat, advokasi sudah menekankan bahwa apa yang diperlukan untuk membawa suatu perspektif jender kepada studi kebencanaan adalah riset dan analisa data yang dipisahkan jenis kelamin, proyek percobaan selama tahap rekonstruksi, suatu dialogue terbuka di dalam masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah nasional dan membangun kapasitas perempuan sebelum, selama dan setelah kejadian bencana.

Kelima, pada akhirnya ketidakhadiran kapasitas kelembagaan di dalam analisa jender tercermin dalam upaya pertolongan/pemberian bantuan, yang tidak memasukkan perspektif jender di dalam kaidah-kaidah dan prosedurnya. Sekali lagi, ini berarti bahwa kebutuhan tertentu perempuan, perhatian dan potensi mereka untuk menyumbangkan kontribusi dilewatkan begitu saja selama tahapan kesiapsiagaan, tanggapan, dan rekonstruksi. Ini juga sesuai dalam menyoroti pentingnya kebutuhan pengorganisasian, suatu pendekatan jender terhadap kajian bencana alam dan yang diakibatkan olehnya.

Keenam, dibutuhkan suatu proses pengembangan efektif yang mencakup keduanya, baik kebutuhan dan kontribusi potensial perempuan seperti halnya laki-laki. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berbasis masyarakat dan rencana tanggapan yang melibatkan perempuan secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi ke dalam hitungan/perkiraan akan sangat membantu dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap bencana secara keseluruhan. Suatu rencana yang berjalan bahkan berlanjut akan menandai kemampuan perempuan dan termasuk di dalamnya upaya memberi bantuan/pertolongan akan membantu mengubah kepercayaan jender tentang perempuan. Suatu pendekatan bermuatan jender terhadap studi dan analisis bencana alam sangat penting dalam rangka memenuhi tujuan ini.

Bahkan ada kecenderungan penanganannya bias terhadap perempuan, karena tiga hal :

1) Para pengambil keputusan yang terlibat dalam perencanaan maupun implementator umumnya laki-laki. Kebanyakan dari pengambil keputusan kurang peka terhadap pengalaman sebagai perempuan dalam bencana.
2) Masih kuatnya pemahaman streotipe gender diantara mereka yang terlibat dengan penglolaan bencana, yang melihat "pengalaman perempuan dalam bencana" sebagai bagian dari "kodrat perempuan".
3) Langkanya data terpilah menurut jenis kelamin sehingga isu gender tidak terkuak. Data terpilah menurut jenis kelamin sangat penting untuk penanggulangan bencana banjir. Karena dapat diantisipasi kebutuhan maupun cara penanggulangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data informasi yang diperlukan misalnya berapa jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kepala keluarga laki-laki, kepala keluarga perempuan, penduduk menurut umur, jumlah anak, lanjut usia, jumlah perempuan hamil, menyusui. System data terpilah yang terkelola dengan baik, terlembaga, *up to date*, akan banyak membantu menyalurkan barang yang sesuai dengan keperluan perempuan, anak-anak, lanjut usia dan laki-laki, seperti daster, pakaian anak, selimut dan peralatan dapur (kompor, panci, tempat nasi, wajan, piring, gelas, sendok) sehingga dalam mekanisme penyaluran barang dapat terpenuhi. Hal ini dapat mengantisipasi pemenuhan kebutuhan untuk setiap fase penanggulangan bencana.

VII.3. Kebijakan Bencana Banjir Terkait Dengan Keterlibatan Perempuan

Indonesia dengan jumlah penduduk 234.2 juta jiwa adalah negara keempat dengan populasi terpadat di dunia dan juga merupakan Negara yang berisiko bencana. Sampai sekarang ini rencana manajemen bencana nasional belum terumuskan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya merancang rencana manajemen bencana di tingkat lokal. Perempuan masih sangat termajinalkan. Dalam tingkat komunitas, kebiasaan dan kepercayaan (budaya dan agama) masih sangat patriarki/dominasi laki-laki, perempuan hanya memiliki tempat yang sempit dalam publik dan hanya berperan dalam urusan rumah tangga saja.

UUNo.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khusunya **Bab V Pasal 26 dan 27** terkait dengan "Hak dan Kewajiban Masyarakat" serta PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana khususnya pada Paragraf **5 Pasal 87 point (1)** "Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana kearah

lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana". Merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum dilaksanakan dengan baik bahkan dibeberapa lokasi belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Demikian juga dalam semua kebijakan, disebutkan Pengarustamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi program pembangunan nasional maupun daerah, seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di daerah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan bencana, sudah memasukkan dimensi gender secara eksplisit yang tercantum sebagai asas, prinsip serta tujuan dari UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian Gender seharusnya menjadi payung dan acuan bagi peraturan yang berada dibawahnya.

Namun apabila mengkaji kebijakan Surat Keputusan No : 05 tahun 2006 tentang Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Kecamatan Kanor Bojonegoro dan Surat Keputusan No : 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan Laren Lamongan (SK Terlampir), tampaknya ada disharmoni antara kebijakan strategis (UU no 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008) dengan kebijakan dibawahnya.

Demikian juga dalam kebijakan ditingkat manajerial yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda seperti Renstra/Program yang berkaitan dengan pengelolaan bencana, hampir bisa dikatakan netral gender. Semua kebijakan penanggulangan bencana mengacu pada tupoksi masing-masing kementerian/lembaga yang memang belum mencantumkan gender sebagai salah satu strateginya. Paradigma yang dipakai masih bersifat umum dan tanggap darurat. Penyebabnya adalah meskipun UU no 24 tahun 2007 sudah mencantumkan gender sebagai salah satu asas, prinsip serta tujuan dari Penanggulangan Bencana, akan tetapi belum dipahami dan tersosialisasi dengan baik. Sementara itu kementerian/lembaga serta Pemda telah mengeluarkan lebih dahulu kebijakan/pedoman sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Menurut dinas Sosial, minimnya dukungan masyarakat disebabkan ada anggapan bahwa penanggulangan bencana adalah wujud fungsi pemerintah dalam perlindungan rakyat. Akibatnya, rakyat mengharapkan penanggulangan bencana sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Menteri Sosial menekankan, saat ini seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana, dan program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana harus dilakukan terpadu. Disamping itu, harus melibatkan semua pihak sejak fase pencegahan, mitigasi,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga fase pemulihan (sumber:http://balaeropakompas.com). Demikian juga dalam hal tidak dilibatkannya perempuan dalam penanggulangan bencana banjir di Bojonegoro dan Lamongan. Ada beberapa sebab tidak dilibatkannya perempuan dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu :

1. Kurang peka terhadap isu gender : Kebijakan penanggulangan bencana yang tidak sensitive terhadap isu gender mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan (termasuk anak-anak dan lansia) dalam kesempatan memperoleh akses, manfaat serta partisipasi dan kontrol dari kebijakan, program maupun bantuan bencana yang diberikan. Para pengambil kebijakan dan pelaksanaan penanggulungan bencana sering memahami penanganan bencana "tidak berpihak" atau disebut netral gender. Pelaksana penanggulangan bencana umumnya melihat masyarakat terkena bencana sebagai kelompok homogen, padahal perempuan dan laki-laki berbeda, bukan hanya secara biologis saja tetapi juga berbeda dalam kebutuhan, peran dan status gender. Hal ini berdampak pada dalam hal memperoleh tanggungjawab, hak, kewajiban, pengalaman termasuk dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan (keikutsertaan dalam memutuskan dan didengar pendapat serta keinginannya serta penguasaan terhadap sumber daya seperti informasi, pengetahuan dan ketrampilan) serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam setiap usaha rehabilitasi dan rekonstruksi.

   Hal ini termasuk :

   a. Aspek hukum : menyangkut soal perlindungan hukum sehubungan dengan keluarga terpisah, kepemilikan, dokumen-dokumen penting yang hilang atau musnah.
   b. Aspek Kesehatan : berkaitan dengan masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi keluarga yang menurut peran gender masih menjadi tanggungjawab perempuan, pemenuhan hak kesehatan reproduksi (misal kebutuhan perempuan ketika sedang hamil, menyusui, sedang mengalami menstruasi) seperti kasus ibu Sumini asal Laren Lamongan.
   c. Aspek Sosial Ekonomi : terutama pembagian kerja menurut jenis kelamin seperti kehilangan pekerjaan pada suami atau meninggal, harus bertanggungjawab dalam menghidupi keluarga, terganggunya partisipasi social ekonomi perempuan sebagai akibat dari tidak berfungsinya pranata social ekonomi di masyarakat seperti pasar, posyandu, PKK dan sebagainya. Hampir bencana alam di Bojonegoro dan

Lamongan, perempuan harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi maupun masalah kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun anaknya.

d. Aspek psikologi : tinggal dipengusian yang dialami perempuan dan dalam keadaan keluarga bercerai berai, beban stress/binggung selalu terbayang-bayang bagaimana posisi tidur di dalam pengungsian.

e. Aspek social budaya : berkaitan dengan masalah porak porandanya kehidupan social pasca bencana banjir akan mengancam pergeseran perilaku, tata nilai budaya, penuruan angka partisipasi sekolah terhadap anak. Ketika bencana banjir terjadi anak-anak tidak ke sekolah hampir 14 hari. Hal ini disebabkan gedung sekolah banjir sampai 3 - 4 meter, buku pelajaran yang dibawa arus banjir, dan jalan menuju sekolah masih banjir

f. Aspek keamanan : menyangkut rasa aman dari intimidasi dan pencurian. Justru perempuan selalu memikirkan, menjaga dan mengamankan barang-barang yang berharga seperti TV, kasur dan surat-surat berharga lainnya.

Perempuan memainkan peran vital dikala bencana karena selain tetap menjalankan tugas dan fungsinya *care giver* dalam keluarga, mereka juga seringkali berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, tulang punggung keluarga terutama ketika ia harus menjadi orang tua tunggal karena suami kehilangan pekerjaan. Karena tanaman padi hanyut dan ikan di tambak banyak yang hilang, maka suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Tidak jarang perempuan juga terlibat kegiatan social seperti membantu di dapur umum dan pos kesehatan. Dalam keadaan bencana peran dan serta beban perempuan justru bertambah. Perempuan bukan saja sebagai menjadi objek yang harus dilindungi, tetapi juga menjadi subyek berperan aktif sebagai *change of agent*.

2. Tidak adanya data terpilah yang berkaitan dengan korban bencana banjir menurut jenis kelamin baik di kecamatan Bojonegoro dan Lamongan sehingga isu gender tidak terkuak. Kebijakan penanggulangan bencana tetap merancang kebijakan program tanpa data terpilah menurut jenis kelamin karena ketidaksediaan data terpilah dan tetapi juga karena tidak dianggap penting. Hal ini memaknai bahwa penanggulangan bencana belum menerapkan strategi pengarustamaan gender sesuai amanat Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional serta UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan gender sebagai salah satu dasar, prinsip serta tujuan Penanggulangan Nasional Bencana Alam (PNBA). Hal ini juga tercermin dari beberapa realita yang memperlihatkan masih lemahnya

pelaksanaan PUG pada umumnya dan penanggulangan bencana pada khususnya, yang meliputi :

a. Masih belum dilaksanakannya analisis gender kedalam proses perencanaan penanggulangan bencana.
b. Belum melembaganya data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang berkaitan dengan keadaan demografis, keadaaan social ekonomi, jumlah penduduk rentan bencana, belum tertanganinya secara komprensif.
c. Masih kurangnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik perempuan dalam penanggulangan bencana.
d. Peran serta atau partisipasi perempuan belum diakui secara formal dalam penanggulangan bencana karena pandangan budaya patriarkhi mendudukkan perempuan dalam posisi pasif.

Perempuan bukan hanya sebagai obyek, namun juga sebagai subyek. Artinya, perempuan itu bukan saja sebagai korban tetapi mereka adalah sumberdaya yang berpotensi yang dapat memobilisasi kekuatan dalam masyarakatnya, ketika sendi-sendi kehidupan tidak berfungsi seperti dalam keadaan bencana. Peran dan inisiatif perempuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan keseharian dalam keluarga dan dalam bermasyarakat tetap berjalan dan diakui secara luas. Potensi ini akan dapat lebih bermanfaat jika peran serta inisiatif mereka itu diaprisiasi dan diakomodasi dalam penyelenggaraan pengelolaan bencana dalam setiap tahapannya.

Dengan dikeluarkannya UUNo.24 Tahun 2007 ada perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana, dimana penekanan bahwa bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama masyarakat memberikan proteksi dan keselamatan tanggungjawab terhadap daerah yang terkena bencana banjir. Pada dasarnya pengelolaan bencana,tidak hanya di fase tanggap yaitu ketika bencana datang atau ketika dalam keadaan darurat tetapi pengelolaan untuk mengurangi resiko dalam setiap fase bencana seperti fase mitigasi, keadaan darurat sampai pasca bencana (meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi).

Perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana yaitu lebih difokuskan pada penguatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat (baik perempuan dan laki-laki), serta para pemangku kepentingan sebagai subyek dalam pengelolaan bencana. Dengan mekanisme ini seharusnya diimplementasi pengelolaan bencana akan bekerja dengan baik, menciptakan rasa kepedulian, keterlibatan dan kebersamaan masayarakat.

BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bencana banjir yang melanda kabupaten Bojonegoro dan Lamongan yang diakibatkan karena luapan air sungai dimana kapasitas penyimpanan air di sungai ini terlampaui akibat curah hujan yang tinggi dan hutan gundul, maka kedua kabupaten tersebut telah melakukan berbagai upaya melalui perbaikan tanggul mulai dari Cepu hingga Kacamatan Kanor, karung pasir, pelatihan tanggap darurat sampai pada penanganan berbasis masyarakat. Penanganan bencana sesuai dengan UU No. 25 tahun 2007, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/objek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana.

Pada pelatihan tanggap darurat sampai pada penanganan berbasis masyarakat, tidak tersentuh sama sekali yang terkait dengan perspektif gender. Dampaknya minimnya pengetahuan pada perempuan tentang kejadian penanggulangan bencana dari pra bencana terkait dengan akses penyuluhan dan informasi tentang manajemen bencana, pada saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana.

Program penanganan bencana di kabupaten Bojonegoro dan Lamongan masih mengacu pada stereotype bias gender yaitu kebijakan penanggulangan bencana seringkali menempatkan laki-laki pada peran gendernya sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, tulang punggung ekonomi keluarga, terlibat dalam kegiatan kegotong royongan serta menempatkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, mengurus kegiatan domestik. Hal ini merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk tidak pernah dilibatkan seperti dalam pelatihan penanganan bencana, sehingga akses untuk mendapatkan informasi tidak didapat secara langsung atau didapat melalui orang lain atau suami. Sebagai akibatnya bisa terjadi distorsi informasi dan ketika terjadi bencana, perempuan tidak dapat melakukan tindakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam hal ini perempuan tidak mendapatkan yang adil dalam mendapatkan akses dan informasi berkaitan dengan program penanganan bencana.

Bencana banjir di kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, yang merujuk pada UUNo.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khusunya **Bab V Pasal 26 dan 27** terkait dengan "Hak dan Kewajiban Masyarakat" serta PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana khususnya pada Paragraf **5 Pasal 87 point (1)** "Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(1) huruf e bertujuan untuk

meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana kearah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana", serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan terbentuknya BPBD. Demikian juga dalam semua kebijakan, disebutkan Pengarustamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi program pembangunan nasional maupun daerah, seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di daerah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan bencana, sudah memasukkan dimensi gender secara eksplisit yang tercantum sebagai asas, prinsip serta tujuan dari UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian Gender seharusnya menjadi payung dan acuan bagi peraturan yang berada dibawahnya.

Namun apabila mengkaji kebijakan Surat Keputusan No : 05 tahun 2006 tentang Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Kecamatan Kanor Bojonegoro dan Surat Keputusan No : 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kecamatan Laren Lamongan (SK Terlampir), tampaknya ada disharmoni antara kebijakan strategis (UU no 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008) dengan kebijakan dibawahnya.

Saran

Ada beberapa saran untuk strategi mitigasi dan pengembangan manajemen bantuan bencana banjir :

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di lokasi rawan banjir seharusnya memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Perlunya diimplementasikan strategi pengarustamaan gender sesuai amanat Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional serta UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan gender sebagai salah satu dasar, prinsip serta tujuan Penanggulangan Nasional Bencana Alam (PNBA) dianggap penting untuk adanya suatu kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di daerah rawan bencana banjir.
3. Antara kebijakan strategis (UU no 24 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008) dengan kebijakan dibawahnya (Surat Keputusan di tingkat kabupaten) perlu adanya keselarasan.
4. Alam sangat erat kaitannya terhadap kehidupan perempuan. Rusaknya alam menyebabkan peluang terhadap perempuan untuk melanjutkan kehidupannya semakin

berkurang. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan yang dikaitkan dengan fungsi produksinya untuk mempertahankan hidup. Dengan demikian perempuan memegang kunci yang paling utama dalam siklus kehidupan. Oleh karena itu penyelamatan terhadap alam dan lingkungan menjadi teramat penting karena secara tidak langsung dapat menyelamatkan kehidupan keseluruhan. Peranan penyelamatan ini penting dilakukan oleh perempuan itu sendiri karena merekalah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi diri mereka. Namun disamping itu semua, peranan negara juga teramat penting dalam menciptakan kebijakan-kebijakan untuk mendorong aktivitas penyelamatan alam dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan,* Yogyakarta : Tarawang

Adrina, 1998, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Ariadi, Septi & Karnaji (ed.), 2005, *Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.* Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Farley, Margaret, 1990, "Feminist Theology and Bioethics", dalam Loades, Ann (ed), *Feminist Theology : A Reader,* London : SPCK and W/JKP.

Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2000, *What Is Mitigation?, Mitigation: Reduction Risk through Mitigation,* Washington.

Gifford, 1987, *Environmental Psikology : Principles dan Practice,* Boston :Allyn and Bacon, Inc Jurnal Perempuan No 40, 2005, Perempuan Dalam Bencana.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008, Kebijakan Perlindungan Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana.

Makalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Sosialisasi Gladi Pos Komando dan Dril Penanggulangan Bencana, Lido, 20-23 Juli 2008

Mary Mellor. 1997, dalam Perempuan dan Ekologi *Jurnal Perempuan* No. 21/2002.

Mohammad, Kartono, 1996 Prioritas Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di Indonesia, Dalam *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Program for Hidro-Meteorological Risk Disaster Mitigation in Secondary Cities in Asia, *Banjir dan Upaya Penanggulangannya,* kerjasama USAID, ITB, Jayabaya dan adpc).

Reuther, Rosemary R, 1992, *Sexisme and God-Talk*, London : SCM

Saifuddin, Achmad Fedyani dan Irwan Martua Hidayana, 1999 *Seksualitas Remaja*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Antropologi FISIP UI dan The Ford Foundation

Soekanto, Soerjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Suyanto, Bagong, 2009, Dampak dan Upaya Penanganan Masyarakat Korban Bencana, dalam Wignjosoebroto, Soetandyo dan Bagong Suyanto (ed), *Bencana di Jawa Timur*, Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur.

UNDP, 1994, *Program Pelatihan Managemen Bencana, Mitigasi Bencana*, Edisi Dua, Cambridge Architectural Research Limited

Warrren, Karen, 1996, "Ecological Feminist Philosophies : An Overview of the Issues" dalam Karen J Warren (ed), *Ecological Feminist Philosophies*, Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press.

Sumber lain :

http://balaeropakompas.com._Perkembangan Banjir di Jawa Timur. Diakses tanggal 19 Agustus 2010.

Kompas 6 Maret 2009. Bencana Banjir, Jatim Rugi Rp 389 Miliar. Diakses tanggal 15 Agustus 2010

Data Bakornas PB, 23 Juni 2006, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009.

(http://www.melanesianews.org/suara/publish/alam/Dusun_Grape_Terancam_Hilang_150108_printer.shtml). Dusun Grape Terancam Hilang Dari Peta. Diakses tanggal 14 Oktober 2010

Feminism and Ecology. Cambridge: Polity Press Petani Organik Solusi Persoalan Petani. http://satudunia.net/node/1551 WHO Gender and Health a Technical Paper. 1998.

Welcome to G-HELP [Gender, Health and Environmental Linkages Program] 'site http://web.g-help.or.id Powered by Joomla! Generated: 28 May, 2010, 17:10

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim, Jumat, 27 Februari 2009, Bojonegoro Lepas Status Siaga Banjir.

Gambar (1) Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Gelap - Lamongan, Setelah Bencana Banjir

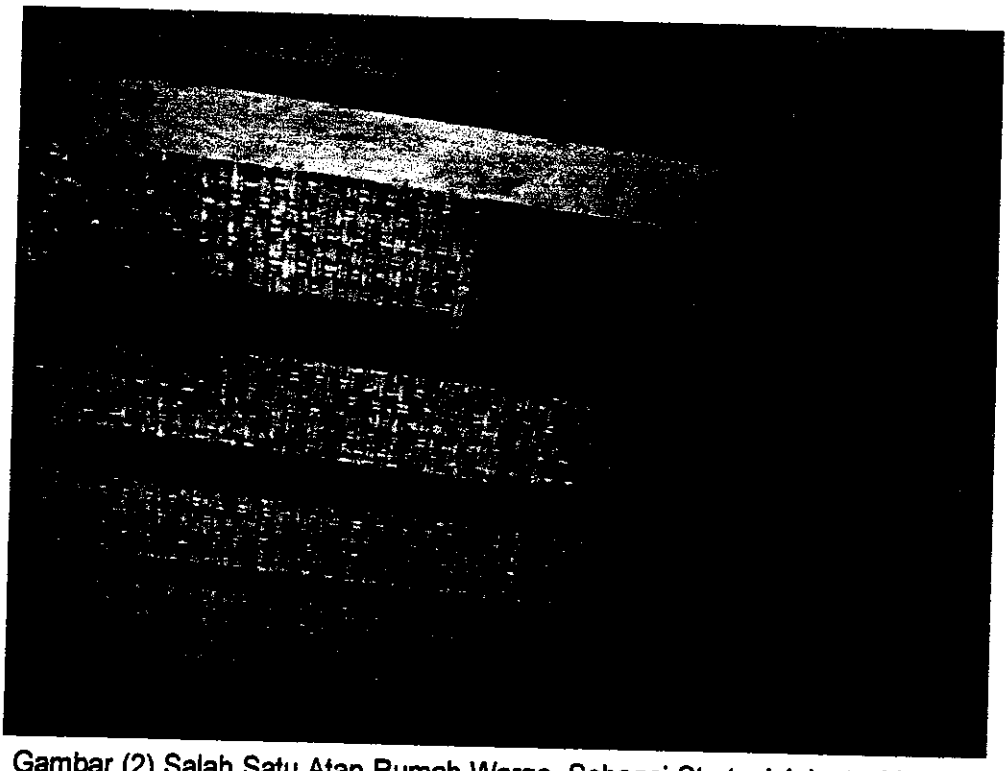

Gambar (2) Salah Satu Atap Rumah Warga, Sebagai Strategi Adaptasi Ketika Banjir Datang

Gambar (3) Aktivitas Pembangunan Waduk di Kecamatan Laren-Lamongan, Sebagai Salah Satu Program Pemerintah Pencegahan Bencana Banjir

Gambar (4) Kondisi Pemukiman Penduduk Desa Gelap - Lamongan

Gambar (5) Perahu Miliki Warga yang Digunakan Untuk Aktivitas Ketika Bencana Banjir

Gambar (6) Kondisi Areal Persawahan Penduduk Tergenang Banjir

Gambar (7) Salah satu Sekolah yang Tergenang Banjir

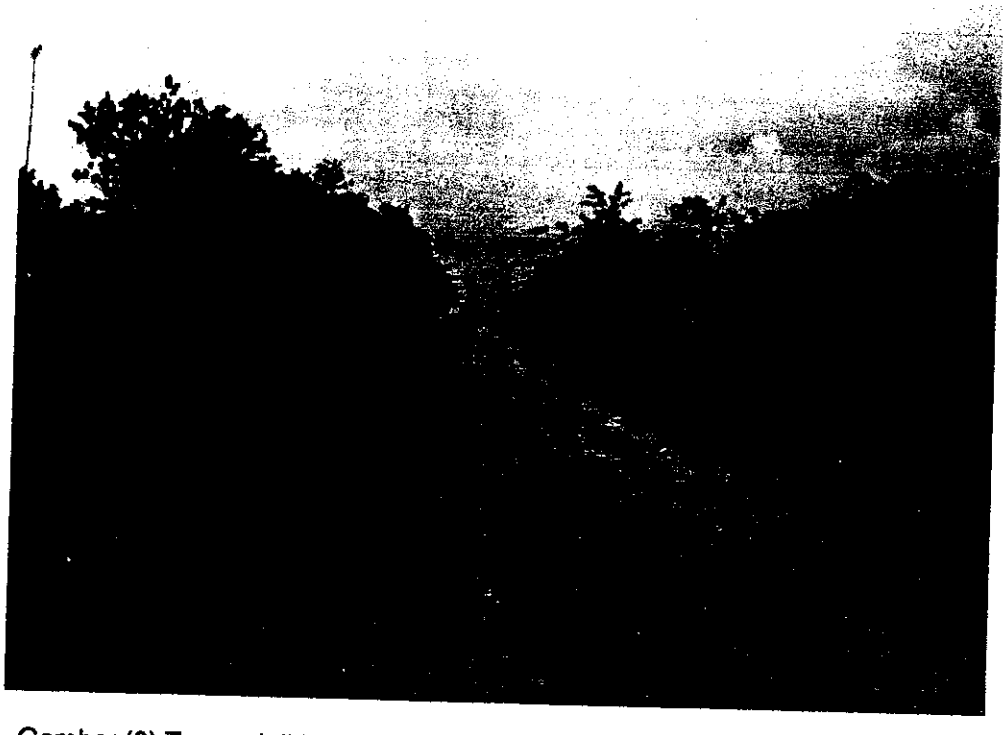

Gambar (8) Tanggul di Desa Pilang Kanor Bojonegoro

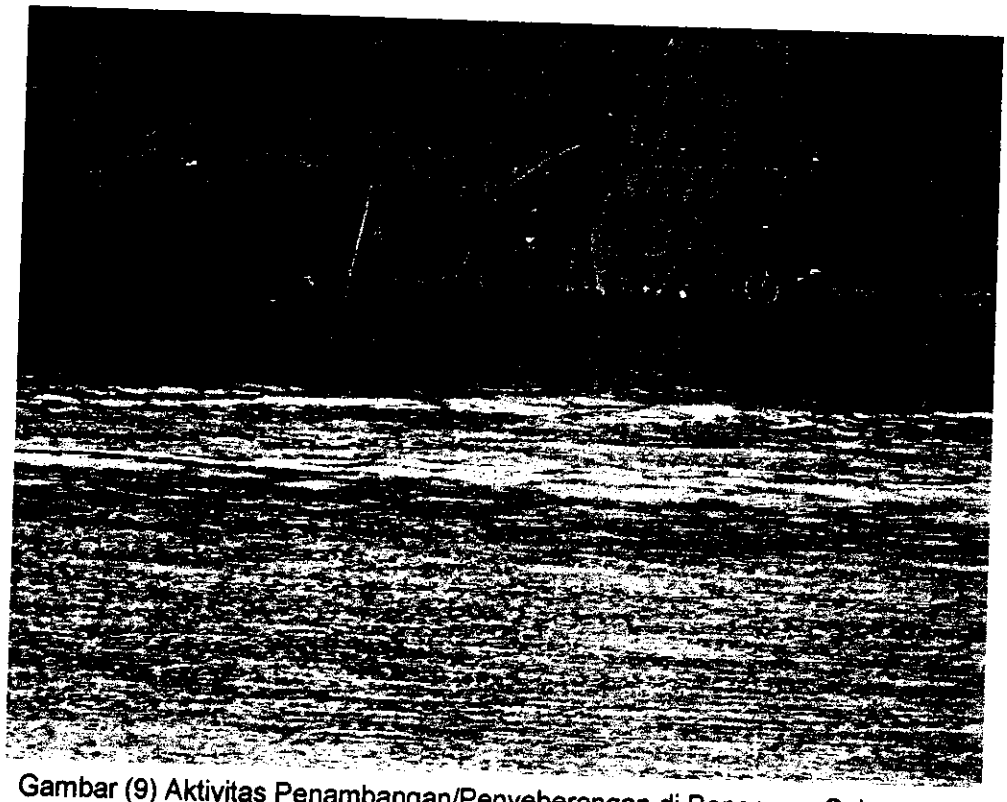

Gambar (9) Aktivitas Penambangan/Penyeberangan di Bengawan Solo

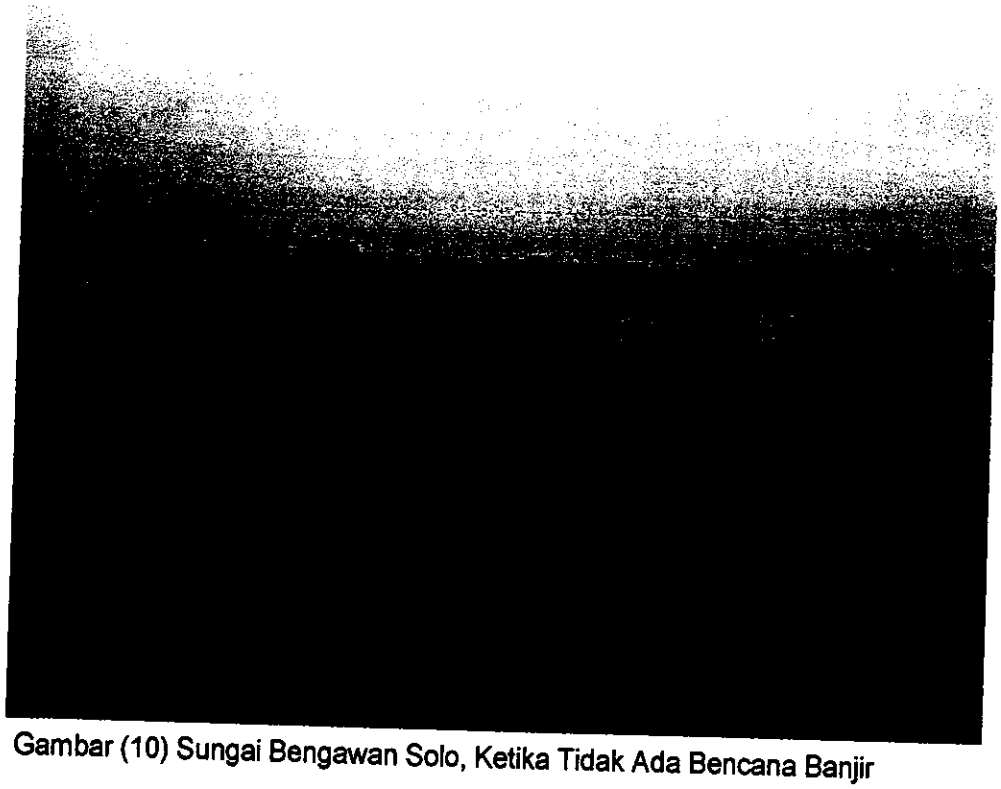

Gambar (10) Sungai Bengawan Solo, Ketika Tidak Ada Bencana Banjir

PETA KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

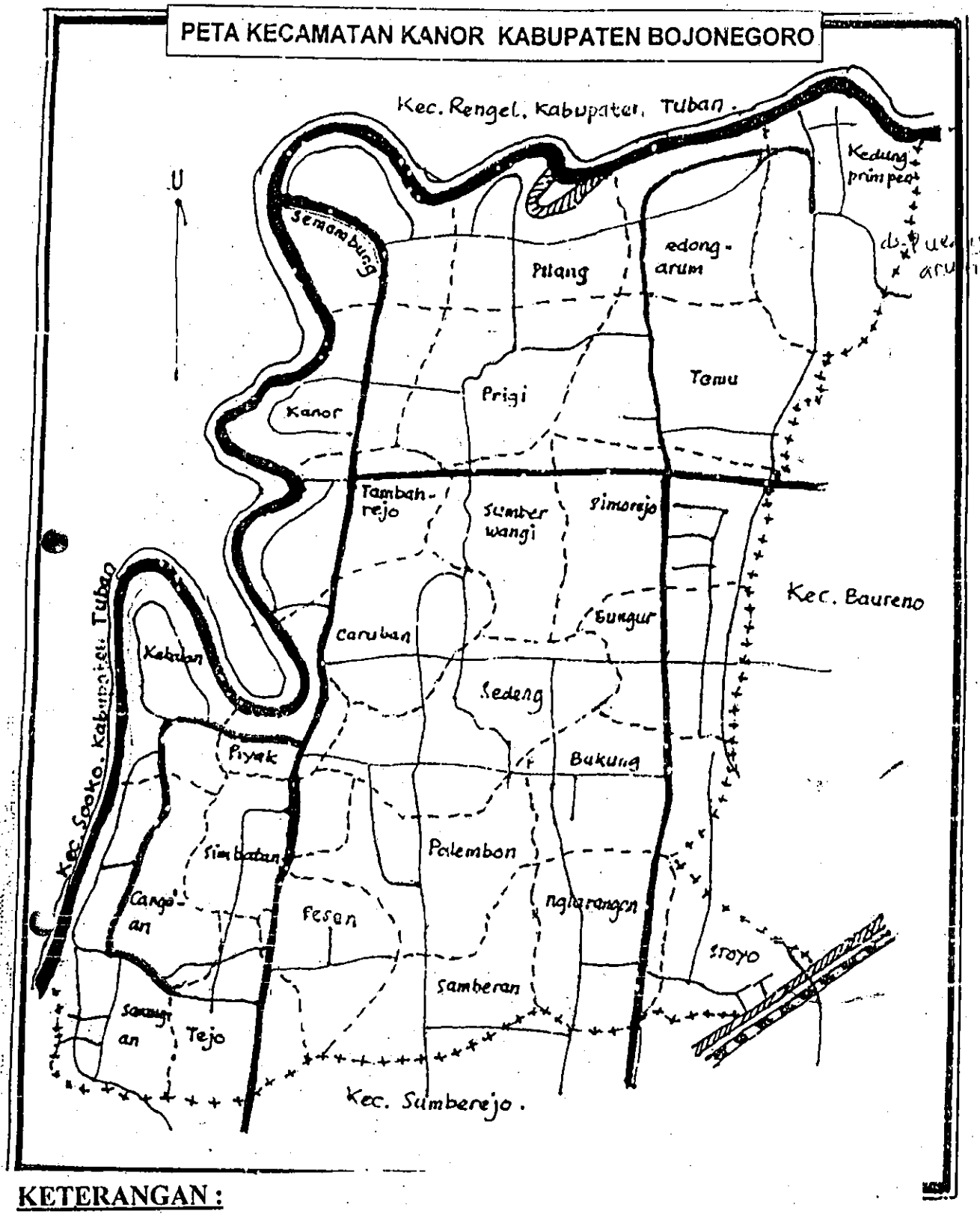

KETERANGAN :

▬▬▬▬	: Jalan Raya
— — — — =	: Jalan Kereta Api (KA)
———	: Jalan Desa
▬▬▬	: Jalan Makadam / beraspal
≈≈≈	: Sungai Bengawan Solo.
X X X X X X X X	: Batas Wilayah Kecamatan
- - - - - - - - - - - -	: Batas Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
CAMAT KANOR
Jalan Raya Kanor No. 01 Telp. (0353) 331468
KANOR

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT KANOR
NOMOR : 05 TAHUN 2006

TENTANG
UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (UNIT OPERASI PBP) KECAMATAN KANOR

CAMAT KANOR

MENIMBANG :

a. Bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau ulah manusia dan masalah pengungsi dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga upaya penanggulangan dan penanganannya perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, tepat, terkoordinasi, terpadu dan cepat.

b. Bahwa dalam upaya penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang lebih efektif, maka perlu dibentuk Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kecamatan Kanor berdasarkan Keputusan Camat Kanor.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Madya daerah tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Kepres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 111 tahun 2001.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk-produk hukum Daerah.
7. Keputusan Mendagri RI Nomor 131 tahun 2003 tentang Pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 188/141/KPTS/013/2003 tentang Satuan Koordinasi pelaksana Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi Propinsi Jatim.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 28 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Badan dan Kantor Kabupaten Bojonegoro.
10. Keputusan Bupati Nomor 118/43/KEP/412.12/2004 tentang Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP)

Memperhatikan : Surat dari Bupati Bojonegoro, tanggal 28 Agustus 2006 Nomer : 360/963/204.412/2006 TENTANG Pembentukan Unit Operasi Penanggulangan Bencana Penanganan Pengungsi (PBP).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Kecamatan Kanor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) tugas :

a. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan memperhatikan kebijaksanaan dan arahan teknis yang diberikan Satlak PBP Kabupaten Bojonegoro baik meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah ditetapkan keadaan bencana.
b. Melakukan koordinasi instansi terkait di kecamatan, desa maupun dengan badan-badan sosial, organisasi kemasyarakatan sesuai petunjuk Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Kecamatan Kanor.

c. Melaporkan secepatnya tentang Bencana yang timbul kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Operasi Satuan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit PBP) dan Sekretariat Unit Operasi PBP di bebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kanor
Pada tanggal : 27 Nopember 2006

CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KANOR

H. SUHONO, SH, CN. MM
Pembina
NIP. 510 111 449

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. 1. BUPATI Bojonegoro
2. Ka. Badan Kesbang Linmas Kabupaten Bojonegoro
3. Ka. Badan KB & KESSOS Kabupaten Bojonegoro
4. Muspika Kec. Kanor
5. Sdr. Anggota Unit Operasi PBP Kecamatan Kanor

Lampiran : Keputusan Camat Kanor
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 05 Tahun 2006
Tanggal : 27 Nopember 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (UNIT OPERASI PBP)
KECAMATAN KANOR

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT OPERASI PBP	INSTANSI / JABATAN
1.	a. Ketua	Camat Kanor
	b. Wakil Ketua I	Dan Ramil Kanor
	c. Wakil Ketua II	Kapolsek Kanor
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Kanor
3.	Pelaksana Harian	Kasi Tranlinmas Kecamatan Kanor
4.	Anggota – anggota :	1. Kasie Kesejahteraan Sosial Kec. Kanor 2. Kasie Pemerintahan Kec. Kanor 3. Kasie PMD Kec. Kanor 4. Kasie Pelayanan Umum Kec. Kanor 5. Kepala UPTD KB Kec. Kanor 6. Ketua PKK Kec. Kanor 7. Ka. Puskesmas Kanor 8. Mantri Pengairan Kec. Kanor 9. Koordinator PPL Kec. Kanor 10. Mantri Tani Kec. Kanor 11. Mantri Peternakan Kec. Kanor 12. Petugas Lapangan Dishutbun Kec. Kanor 13. Petugas Infokom Kec. Kanor 14. Ka. KUA Kec. Kanor 15. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kanor 16. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kanor 17. Ka. Satpol PP Kec. Kanor 18. Ka. Kwartir Ranting Pramuka Kec. Kanor 19. Kepala Desa Se – Kec. Kanor 20. SUNANDAR Tokoh Masyarakat 21. PONIMUN tokoh Masyarakat 22. SUBANDJI, BA Tokoh Masyarakat 23. H. SAGI Tokoh Masyarakat

Kanor, 27 Nopember 2006

CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN KANOR

H. SUHONO, SH, CN. MM
Pembina
NIP. 510 111 449

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
KEPALA DESA. .KEDUNGPRIMPEN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA. . .KEDUNG PRIMPEN
NOMOR : 08 2006

TENTANG
UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (UNIT OPERASI PBP)
DESA. . . . KEDUNGPRIMPEN

KEPALA DESA. . . . . KEDUNGPRIMPEN

MENIMBANG :

a. Bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau ulah manusia dan masalah pengungsi dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga upaya penanggulangan dan penanganannya perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, tepat, terkoordinasi, terpadu dan cepat.
b. Bahwa dalam upaya penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang lebih efektif, maka perlu dibentuk Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Desa. .Kedungprimpen berdasarkan Keputusan Kepala Desa .

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Madya daerah tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Kepres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 111 tahun 2001.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur penyusunan Produk-produk hukum Daerah.
7. Keputusan Mendagri RI Nomor 131 tahun 2003 tentang Pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 188/141/KPTS/013/2003 tentang Satuan Koordinasi pelaksana Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi Propinsi Jatim.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomer 28 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Badan dan Kantor Kabupaten Bojonegoro.
10. Keputusan Bupati Nomor 118/43/KEP/412.12/2004 tentang Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP)

Memperhatikan : Surat dari Camat Kanor, tanggal 27 Nopember 2006 Nomer : 541/1000/412.522/2006 TENTANG Pembentukan Unit Operasi Penanggulangan Bencana Penanganan Pengungsi (PBP).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Desa. .Kedungprimpen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) tugas :

a. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Desa .Kedungprimpen . . . dengan memperhatikan kebijaksanaan dan arahan teknis yang diberikan Satlak PBP Kecamatan Kanor baik meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah ditetapkan keadaan bencana.
b. Melakukan koordinasi instansi terkait di kecamatan, desa maupun dengan badan-badan sosial, organisasi kemasyarakatan sesuai petunjuk Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasi PBP) Kecamatan Kanor.

c. Melaporkan secepatnya tentang Bencana yang timbul kepada Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kecamatan Kanor.

KETIGA : Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Operasi Satuan Penaggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit PBP) dan Sekretariat Unit Operasi PBP di bebankan kepada Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedung pompen
Pada tanggal : 28 Nopember 2006

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA KEDUNGPRIMPEN
KECAMATAN KANOR

H. ACH. MUSLIH

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. 1. Ka. Kesbang Linmas
Kabupaten Bojonegoro
2. Muspika Kec. Kanor

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 08 2006
Tanggal : 28 Nopember 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (UNIT OPERASI PBP)
DESA KEDUNGPRIMPEN

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT OPERASI PBP	NAMA / JABATAN	
1.	A. Ketua	H. ACH. MUSLIH	/ Kepala Desa
	B. Wakil Ketua I	SUYITNO	/ Kasun
	C. Wakil Ketua II	AGUS PURWANTO	/ Kasun
	Sekretaris	Drs. Hasan Mundholik	/ Sekdes
	Anggota-anggota		
	- Kelompok Lingkungan Pemukiman	1. Kaim	6. Kasrawi
		2. AH. Ngalim	7. Mahmud
		3. Kahari	8. Musiran
		4. Sumitro	9. Budiono
		5. Dasiyat	10. M. syamsun
	- Kelompok Lingkungan Pekerjaan / Proyek / Obyek Vital	1. Musonto	6. Sukatmo
		2. Hartono	7. Sarju
		3. Sutaji	8. Sokran
		4. Ali Munit	9. Lasmiran
		5. Supari	10. Hadis Ma'ruf
	- Kelompok Lingkungan Pendidikan	1. Lasmijan	6. Abd. Ruat
		2. Suwadi	7. Sutrisno
		3. Masduki	8. Maslikan
		4. Sudjono	9. A. Zuhdi S.
		5. Tartib	10. A Tholib

Kedungprimpen, 28 Nopember 2006
KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA KEDUNGPRIMPEN
KECAMATAN KANOR

H. ACH. MUSLIH

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jalan Raya Kanor Nomor 01 Telepon (0353)331468
KANOR

Kanor, 18 Mei 2010

Nomor : 360 / 437 / 412.51.10 / 2010
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) lembar
Perihal : Laporan bencana alam banjir

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bojonegoro
di-
Bojonegoro

Bersama ini kami laporkan dengan hormat data akibat bencana alam banjir luapan air Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor keadaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681122 198911 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro
4. Sdr. Kepala Balai PSDA Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro
5. Sdr. Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kab. Bojonegoro
6. Sdr Kepala Kantor Satpol PP Kab. Bojonegoro
7. Sdr. Kepala Disnakertransos Kab. Bojonegoro
8. Sdr. Ketua PMI Cabang Bojonegoro

DATA KORBAN / KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM
BANJIR BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR

Waktu Kejadian : Tanggal : 18 Mei 2010
Pukul : 12.00 WIB

No.	Desa	Jumlah Korban / Kerusakan Akibat Bencana																					Taksir Kerugian (dalam ribu Rupiah)	Ket
		Manusia				Rumah (buah)			Sawah Tergenang (Ha)			Ternak Diungsikan (ekor)		Fasilitas Umum										
		Menderita		Meng-ungsi (jiwa)	Meni-nggal (jiwa)	T	RR	RB	Padi	Ja-gung	Polo-wijo	Kam-bing	Sapi	Gedung Sekolah (unit)				Tempat Ibadah		Jalan (m)		Tang-gul (m)		
		KK	Jiwa											TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA	Mas-jid	Mu shola	Jalan Desa	Jalan PU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Kanor	5	17	-	-	5	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	40.000	
2	Pilang	56	172	-	-	56	-	-	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	55.000	
3	Sarangan	22	71	-	-	22	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	
4	Piyak	25	79	-	-	25	-	-	45	20	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2.000	500	-	75.000	
5	Kabalan	40	126	-	-	40	-	-	140	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	200	-	-	87.000	
6	Simbatan	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	35.000	
7	Cangaan	4	13	-	-	4	-	-	75	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	45.000	
8	Kedungprimpen	22	73	-	-	22	-	-	300	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	1.200	-	65.000	
9	Gedongarum	43	138	-	-	43	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	15	45.000	
10	Tambahrejo	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	
11	Semambung	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	
	Jumlah	217	689	-	-	217	-	-	680	122	-	-	-	1	1	-	-	1	-	5.300	1.800	15	536.500	

Keterangan :
T : Tergenang
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat

Kanor, 18 Mei 2010
CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 196811221989111001

KETINGGIAN AIR BENGAWAN SOLO
MULAI TANGGAL 16 MEI 2010

HARI / TANGGAL	PUKUL (WIB)	KETINGGIAN AIR		
		KARANG NONGKO	BOJONEGORO	SEMAMBUNG
1	2	3	4	6
Minggu	07.00	28.35	14.30	10.08
16 Mei 2010	09.00	28.35	14.30	10.15
	10.00	28.87	14.29	10.15
	12.00	28.89	14.38	10.40
	15.00	28.84	14.48	10.50
	16.00	28.84	14.50	10.52
	18.00	28.81	14.55	10.55
	19.00	28.81	14.55	10.58
	20.00	28.81	14.55	10.59
	21.00	28.80	14.59	10.59
Senin	07.00	28.74	14.70	10.62
17 Mei 2010	11.00	28.37	14.74	10.75
	15.00	28.10	14.75	10.78
	18.00	28.82	14.75	10.80
Selasa	07.00	27.00	14.50	10.82
18 Mei 2010	09.00	26.35	14.38	10.80
	10.00	25.72	14.35	10.72

Kanor, 18 Mei 2010
CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KL. CAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681122 198911 1 001

DATA KORBAN / KERUSAKAN AKIBAT MELUAPNYA KALI MEKURIS DI KECAMATAN KANOR

Waktu Kejadian : Tanggal : 21 Mei 2010
Pukul : 11.00 WIB

No.	Desa	Jumlah Korban / Kerusakan Akibat Bencana																					Taksir Kerugian (dalam ribu Rupiah)	Ket
		Manusia				Rumah (buah)			Sawah Tergenang (Ha)			Ternak Diungsikan (ekor)		Fasilitas Umum										
		Menderita		Meng-ungsi (jiwa)	Meni-nggal (jiwa)	T	RR	RB	Padi	Ja-gung	Polo-wijo	Kam-bing	Sapi	Gedung Sekolah (unit)				Tempat Ibadah		Jalan (m)		Tang-gul (m)		
		KK	Jiwa											TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA	Mas-jid	Mu shola	Jalan Desa	Jalan PU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Pesen	30	97	-	-	30	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	40.000	
2	Simbatan	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	160.000	
3	Palembon	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	
	Jumlah	30	97	-	-	30	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	-	240.000	

Keterangan :
T : Tergenang
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat

Kanor, 21 Mei 2010
CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19681221989111001

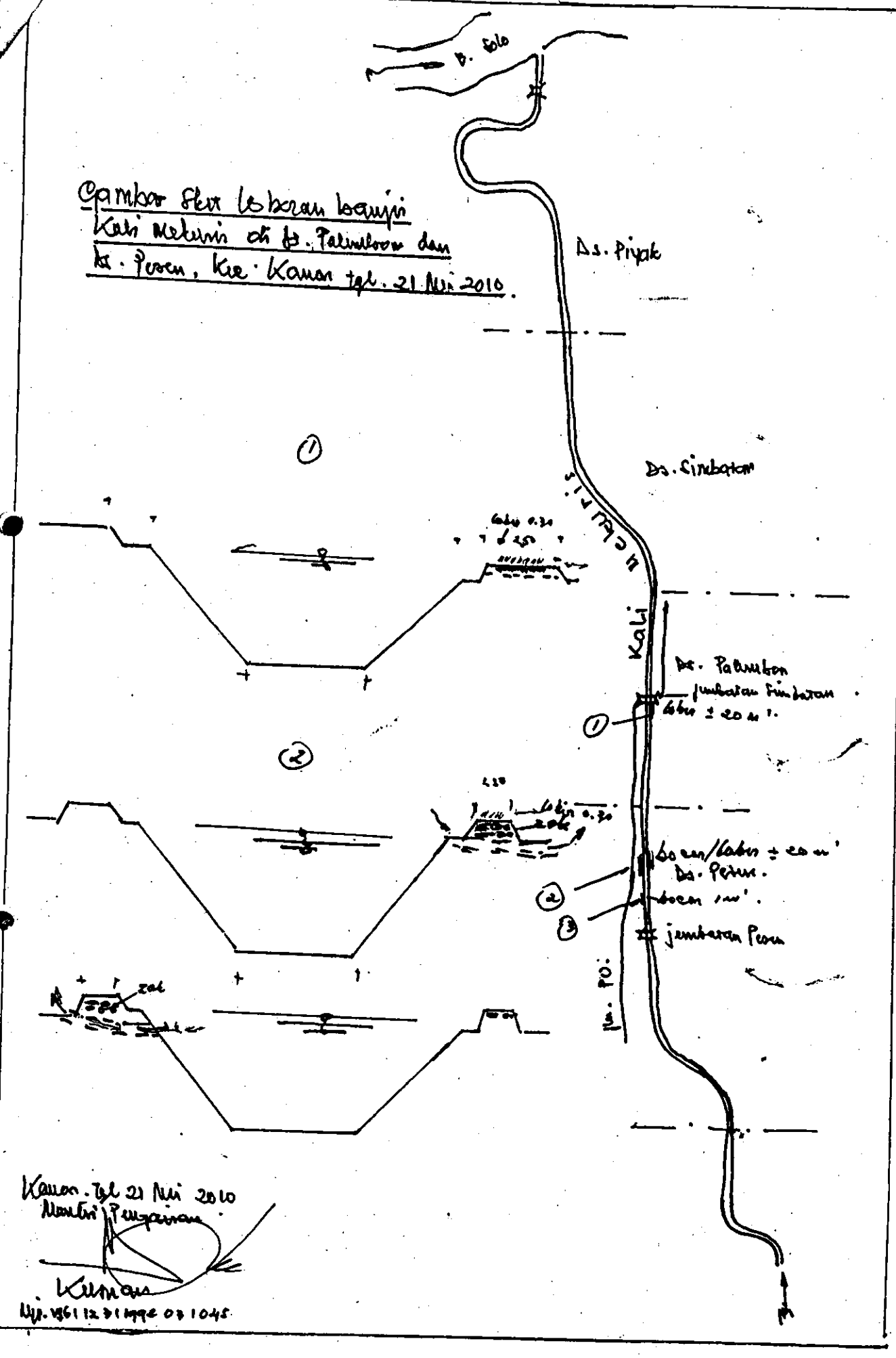
Gambar Sket Lokasi Banjir
Kali Meluris di Ds. Palumbon dan
Ds. Pesen, Kec. Kanan tgl. 21 Mei 2010.
D. Solo
Ds. Piyak
Ds. Simbatan
Kali Meluris
Ds. Palumbon
jembatan Simbatan
Lokasi ± 20 m'
Lokasi 0.30
Lokasi 0.30
Lokasi ± 20 m'
Ds. Pesen.
Lokasi 1 m'.
jembatan Pesen
Jm. PO.
Kanan. Tgl 21 Mei 2010
Mantri Pengairan
Kusnan
Nip. 1961 12 31 1992 03 1045

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR

Jalan Raya Kanor Nomor 01 Telp (0353) 331468
KANOR

Kanor, 7 Januari 2008

Nomor : 360 /001 / 412.52.2 / 2008
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana alam Banjir Kecamatan Kanor

Kepada
Yth. Bp. Bupati Bojonegoro
selaku Satlak PBP
Kabupaten Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Menindaklanjuti hasil rapat Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kecmaatan Kanor tanggal 29 Desember 2007 dan hasil rapat Muspika dan Kepala desa tanggal 7 Januari 2008 tentang hasil survei di lokasi desa yang dilanda bencana alam banjir secara rinci sebagaimana data kerusakan dan kerugian terlampir.

Demikian alporan kami buat sebenarnya dan untuk menjadikan periksa serta mohon prioritas perbaikan infrastruktur jalan, tanggul, dan jembatan.

CAMAT KANOR

H. SUHONO SH. CN. MM
Pembina
NIP. 510 111 449

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesbanglinmas Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Badan KB dan Kesos Kab. Bojonegoro
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro
4. Sdr. Kepala Dinas PU Kab. Bojonegoro
5. Sdr. Ketua Pengurus Cabang PMI Kab. Bojonegoro

REKAPITULASI : KERUSAKAN JALAN, SALURAN IRIGASI, DAN TANGGUL PUTUS
AKIBAT BENCANA BANJIR BENGAWAN SOLO
MULAI 26 DESEMBER 2007

No	Desa	Jalan Putus			Saluran Irigasi Putus			Tanggul Putus			Total Tafsir Kerugian
		Jumlah Titik	Jumlah p X l X d (m)	Tafsir Kerugian	Jumlah Titik	Jumlah p X l X d (m)	Tafsir Kerugian	Jumlah Titik	Jumlah p X l X d (m)	Tafsir Kerugian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Semambung	2	6X5X2 (PU)	28,475,000	-	-	-	11	300X3X5 (TB)	472,500,000	500,975,000
2	Tambahrejo	3	180X5,5X5 (PU)	2,079,000,000	4	85X6X5	382,500,000	4	106X6X2 (TB) rusak tidak putus	133,560,000	2,595,060,000
3	Pilang	-	-	-	-	-	-	7	23X2X2 (TB)	9,660,000	9,660,000
4	Piyak	3	150X2,5X0,75 (DS)	37,500,000	2	550X0,60X0,50	14,850,000	11	250X3X2 (TB)	157,500,000	209,850,000
5	Cangaan	1	3X4X1,5 (DS)	3,240,000	12	300X2X1,5	81,000,000	-	-	-	84,240,000
6	Temu	-	-	-	2	5X2X2,5 (jembatan PU)	22,500,000	2	250X0,20X1,5	22,500,000	45,000,000
7	Sumberwangi	-	2X4 (DS,rusak)	1,200,000	1	6X2X2,5 (jembatan PU)	27,000,000	3	350X3X2 (TS)	189,000,000	217,200,000
8	Kabalan	5	150X3X0,75 (DS)	42,625,000	9	54X0,70X0,60	4,082,400	-	-	-	46,707,400
9	Gedongarum	-	-	-	-	-	-	2	15X2X2 (TDS)	5,400,000	5,400,000
10	Kanor	17	450X5X7 (PU)	3,937,500,000	17	450X12X7	5,670,000,000	-	-	-	9,607,500,000
11	Sarangan	-	-	-	-	-	-	10	150X6X5(TDS)	405,000,000	405,000,000
12	Kedungprimpen	4	85X4X3	153,000,000	-	-	-	4	100X2,5X4 (TDS)	90,000,000	243,000,000
	Jumlah	35	-	6,282,540,000	47	-	6,201,932,400	54	-	1,485,120,000	13,369,592,400

Kanor, 7 Januari 2008
Camat Kanor

H. SUHONO,SH,CN,MM
Pembina
NIP. 510 111 449

Catatan : TB (tanggul bengawan), TS (tanggul sungai)
DS (desa), TDS (tanggul desa)

DATA :PERKEMBANGAN PENGUNGSI DARI DESA-DESA
SEKECAMATAN KANOR YANG DILANDA BENCANA ALAM BANJIR
s.d. 2 JANUARI 2008 (KEADAAN PUNCAK)

No	Desa	Jumlah Pengungsi	Jumlah Rumah	Jumlah Penduduk		Keterangan
				KK	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Semambung	525	600	600	2,725	Pengungsi berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing dan ketinggian air terus turun.
2	Gedongarum	2,645	717	714	2,645	
3	Sarangan	700	326	326	1,300	
4	Prigi	2,856	825	825	2,856	
5	Kedungprimpen	2,990	777	777	2,990	
6	Pilang	2,005	630	630	2,110	
7	Sumberwangi	350	611	611	1,700	
8	Kanor	2,930	800	831	3,267	
9	Tambahrejo	2,877	769	769	2,937	
10	Simbatan	2,045	530	555	2,045	
11	Temu	3,834	1,060	1,060	3,834	
12	Simorejo	750	500	950	3,650	
13	Piyak	500	150	286	1,142	
14	Kabalan	950	539	599	2,475	
15	Cangaan	2,000	750	750	2,700	
16	Pesen	603	30	271	1,057	
17	Tejo	2,000	450	550	2,000	
	Jumlah	30,560	10,124	11,104	41,433	

Kanor, 7 Januari 2008
Camat Kanor

H. SUHONO,SH,CN,MM
Pembina
NIP. 510 111 449

DAFTAR DESA-DESA KECAMATAN KANOR YANG DILANDA BENCANA ALAM BANJIR MULAI TGL 27 DESEMBER 2007 S/D SEKARANG

NO	DESA	JUMLAH RUMAH		TANAMAN PADI TERGENANG USIA 1 S/D 60 HARI (Ha)	TANAMAN JAGUNG TERGENANG USIA 30 S/D 60 HARI (Ha)	JALAN POROS DESA TERGENANG (km)	TANGGUL PUTUS (M)	JALAN PUTUS (M)	JUMLAH KERUGIAN (JUTA)	KETERANGAN
		TERGENANG (KK)	ROBOH (KK)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TEJO	500		100		3			750	110 AYAM MATI
2	PRIGI	830		275		3			2615	500 AYAM MATI
3	TEMU	1160	1 + 2	312		9			2408	750 AYAM MATI
4	BAKUNG			50	60				400	
5	PESEN			30					950	
6	SIMOREJO	400		200	50	3			950	
7	PILANG	630	2	180	100	4	600		1510	
8	TANBAHREJO	769	3	120	71	4	500	15	1366	
9	KANOR	700	19	160	10	6	30	18	2830	
10	CANGAAN	700	5	70	5	2.5	25		1090	
11	GEDUNG ARUM	700	2	350		3	30		2590	
12	SARANGAN	300	3	75	15	1.5	50		850	
13	KEDUNG PRIPEN	770	25	300		7	100	160	4380	
14	SEMAMBUNG	590	3	130		4	50	125	1165	
15	PALEMBON				30				90	
16	PIYAK	280		40	2	3			385	
17	KABALAN	514		200	20	5			1999	
18	SIMBATAN	120		100	100	4			970	
19	SUMBERWANGI	590		185	33	1.5			1278.5	
20	BUNGUR			197					394	
21	SEDENG	60		45		0.5			194	
22	CARUBAN	100		20		0.5			160	
	JUMLAH	9633	64	3139	496	64.5	1385	318	29324.5	

Kanor, 2 januari 2008
Camat Kanor

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR

H. SUHONO. SH. CN. MM
Pembina
NIP. 510 111 449

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jalan Raya Kanor Nomor 01 Telepon 331468
KANOR

Kanor, 9 Pebruari 2009

Nomor : 360 / 138 / 412.31.10 / 2009
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan bencana alam banjir

Kepada
Yth. Bp.Bupati Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Bersama ini kami laporkan dengan hormat data akibat bencana alam banjir luapan air Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor keadaan mulai tanggal 31 Januari 2009 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2009 , sebagimana data terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 010 228 405

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro
3. Sdr. Kepala Balai PSDA Wilayah Bengawan Solo Bojonegoro
4. Sdr. Kepala Bakesbanglinmas Kab. Bojonegoro
5. Sdr. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro
6. Sdr. Ketua PMI Cabang Bojonegoro

LAPORAN : DATA BENCANA ALAM BANJIR AKIBAT LUAPAN AIR BENGAWAN SOLO
DI KECAMATAN KANOR MULAI TANGGAL 31 JANUARI S.D. 9 FEBRUARI 2009

No	Desa	Rumah Tergenang		Rumah		Tanaman Tergenang			Taksir Kerugian Tanaman Padi & Palawija (dalam ribu Rp)	Jalan Tergenang		Saluran Irigasi rusak (m)	Tanggul Longsor / Pecah (m)	Taksir Kerugian (dalam ribu Rp)	Fasilitas Umum yang Tergenang					Pengungsi		Ket
		KK	Jiwa	Hanyut	Rusak	Padi (Ha)	Jagung (Ha)	dll.		PU (m)	Desa (m)				Masjid	Musholla	Balai Desa	Sekolah		KK	Jiwa	
																		SD	MI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Piyak	235	765	-	2	42	-	-	84.000	1.300	3.250	1.500	-	360.000	1	1	1	-	-	-	-	
2	Simbatan	60	155	-	-	101	5	-	679.000	800	1.000	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kanor	135	453	1	1	70	5	-	155.000	1.000	300	100	-	250.000	-	2	-	-	-	-	-	1. Ketinggian air terus menurun.
4	Semambung	12	40	-	-	2	2	3	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Desa Gedongarum dan Pilang persemaian padi yang tergenang usia +10 hari.
5	Tambahrejo	-	-	-	-	3	70	-	60.000	-	-	1.100	40	165.000	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kabalan	315	945	-	-	109	9	-	384.000	-	3.000	2.000	-	375.000	-	4	-	1	1	-	-	
7	Sarangan	97	193	-	-	32	10	-	384.000	-	400	-	60	175.000	-	3	-	1	1	-	-	
8	Cangaan	300	645	-	-	71	14	-	190.000	-	2.000	2.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tejo	-	-	-	-	192	-	-	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pilang	70	295	-	1	100	-	-	150.000	-	-	20	40	125.000	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kedungprimpen	60	173	-	-	300	-	-	450.000	-	2.500	-	12	140.000	-	-	-	2	-	-	-	
12	Palembon	-	-	-	-	20	-	-	80.000	-	1.000	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	
13	Sedeng	16	45	-	-	20	-	-	100.000	-	300	-	-	50.000	-	-	-	1	-	-	-	
14	Temu	7	28	-	-	200	-	-	300.000	1.500	5.000	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	
15	Gedongarum	30	95	-	-	350	-	-	525.000	-	500	-	50	150.000	-	-	-	-	-	-	-	
16	Prigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	55.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1.337	3.832	1	4	1.612	115	3	4.712.000	4.600	19.250	6.720	312	3.995.000	1	10	1	5	2	-	-	

Kanor, 9 Februari 2009
CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN ... KECAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos,M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 010 228 405

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jl. Raya Kanor No. 01 Telp. (0353) 331468 Kode Pos 62193
K A N O R

Nomor : 360 / 194 / 412.51.10 / 2010
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir Bandang

Kanor, 22 Februari 2010
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2010 pukul 00.30 WIB di Desa Pesen, Simbatan dan Samberan Kecamatan Kanor terjadi banjir bandang yang disebabkan tanggul Sungai Mekuris putus dan sliding (ambles) dan pada pukul 08.00 WIB air baru mulai surut.

Berkaitan hal tersebut, dampak kerusakan banyak tanggul yang putus, sliding (ambles) dan tanggul kondisi saat ini mengkhawatirkan (banyak yang retak-retak). Adapun lokasi / jenis kerusakan sebagai berikut:

1. Tanggul Sungai Mekuris putus 4 (empat) titik (3 titik Desa Pesen dan 1 titik di Desa Simbatan) dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Titik 1 : - panjang tanggul yang putus 16 meter
      - lebar atas 4 meter
      - kedalaman 2 meter
      sebagaimana pada gambar 1 terlampir
   b. Titik 2 : - panjang 3 meter
      - lebar atas 2 meter
      - kedalaman 1 meter
      - lokasi di Desa pesen sebagaimana gambar1 terlampir
   c. Titik 3 : - panjang 5 meter
      - lebar atas 2 meter
      - kedalaman 2 meter
      - lokasi di Desa Pesen sebagaimana gambar 1 terlampir
   d. Titik 4 : - panjang 5 meter
      - lebar atas 2 meter
      - kedalaman 2 meter
      - lokasi di Desa Simbatan sebagaimana gambar 1 terlampir
2. Tanggul yang sliding (ambles) ada 3 titik di lokasi Desa Samberan dengan panjang keseluruhan 97 meter dengan perincian sebagai berikut :
   a. Titik 1 : - panjang 63 meter
      - lebar atas 4 meter
      - kedalaman 1,5 meter
      sebagaimana pada gambar 2 terlampir
   b. Titik 2 : - panjang 22 meter
      - lebar atas 3,2 meter
      - kedalaman 2,5 meter
      sebagaimana pada gambar 2 terlampir
   c. Titik 3 : - panjang 12 meter
      - lebar atas 4 meter
      sebagaimana pada gambar 2 terlampir
3. Taksir kerugian :
   a. Sawah tergenang dengan usia tanaman 30-35 hari sejumlah 205 Ha dan satu minggu sebelum banjir dilakukan pemupukan sebagaimana data kerugian terlampir.

b. Nilai taksir kerusakan tanggul yang putus, jalan PUK dan jalan poros desa sebagaimana data terlampir.
c. Nilai taksir kerusakan tanggul yang sliding sepanjang 97 meter secara teknis belum bisa ditentukan.

4. Kegiatan pasca banjir :
   a. Kerja bakti menutup tanggul yang putus dengan zak berisi tanah di Desa Pesen mulai tanggal 21 Februari 2010 sampai selesai dengan melibatkan warga Desa Pesen serta anggota TNI dan POLRI.
   b. Kerja bakti memperkuat tanggul yang sliding di Desa Samberan mulai tanggal 22 Februari 2010 secara terus menerus sampai selesai.

Demikian laporan kami buat dengan sebenarnya dan untuk menjadikan periksa.

SAMAT KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681122 198911 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro
4. Sdr. Kepala Balai PSDA Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro
5. Sdr. Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kab. Bojonegoro
6. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Bojonegoro
7. Sdr. Kepala Disnakertransos Kab. Bojonegoro
8. Sdr. Ketua PMI Cabang Bojonegoro

DATA KORBAN / KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM
BANJIR BANDANG DI KECAMATAN KANOR

Waktu Kejadian : · Tanggal : 20 Pebruari 2010
Pukul : 00.30 WIB

No.	Desa	Jumlah Korban / Kerusakan Akibat Bencana																								
		Manusia				Rumah (buah)			Sawah Tergenang (Ha)			Ternak Diung-sikan (ekor)		Fasilitas Umum										Taksir Kerugian (dalam ribu Rupiah)		Jumlah (dalam ribu Rupiah)	Keterangan
		Menderita		Meng-ungsi (jiwa)	Meni-nggal (jiwa)	T	RR	RB	Padi	Ja-gung	Polo-wijo	Kam bing	Sapi	Gedung Sekolah (unit)				Tempat Ibadah (unit)		Tang gul (m)	Jalan / Jembatan					
		KK	Jiwa											TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA	Mas-jid	Mu shola		Jln PUK (m)	Jln Desa (m)	Jem batan	Pertanian	Infra struktur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pesen	-	-	-	-	90	-	-	30	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	24	300	550	-	60.000	30.000	90.000	- Ketinggian air rata-rata di
2	Tejo	-	-	-	-	42	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	50.000	-	50.000	rumah penduduk 10-20 cm
3	Simbatan	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	250	-	-	250.000	10.000	260.000	- Taksir kerugian tanggul di
4	Palembon	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	3 (tiga) titik sliding sepan-
5	Samberan	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	5.000	-	5.000	jang 97 m secara teknis
6	Piyak	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500	belum bisa ditentukan
																											- Banjir bandang disebabkar
																											curah hujan dari hulu
																											stasiun Kedungadem
																											mendapat 140 mm
	Jumlah	-	-	-	-	132	-	-	205	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	126	1.050	550	-	507.500	40.000	547.500	

Keterangan :
T : Tergenang
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat

Kanor, 22 Pebruari 2010
CAMAT KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 196811221989111001

(2)

Sekitar kerusakan / jebolan
Tanggul Paska banjir
Kali Mekuris - Pari Sabtu
tgl. 20 Feb. 2010.

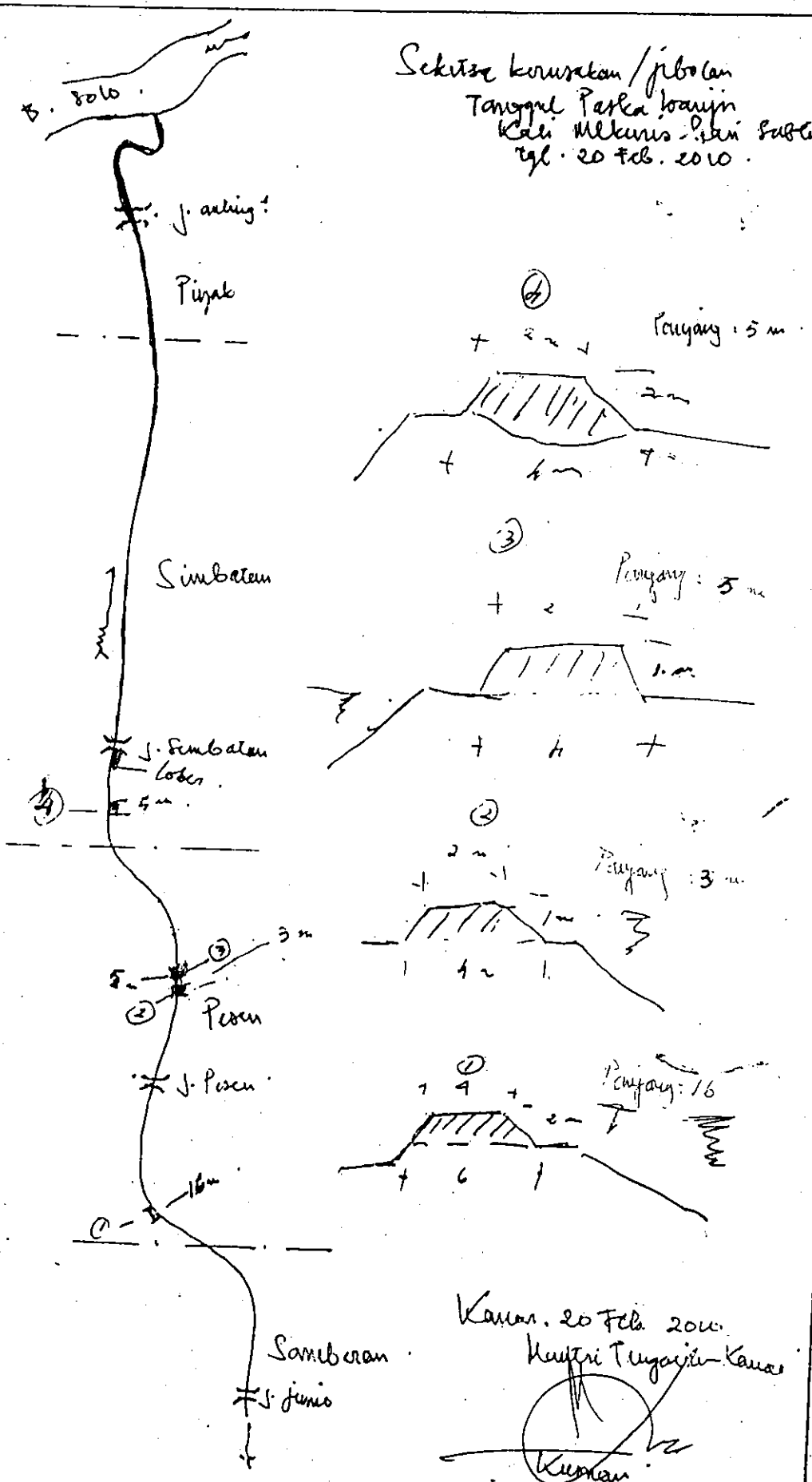

Kanar. 20 Feb. 2010
Mantri Pengairan Kanar

Kusman

Nip. 19611231 199203 1045

Sekitar kerusakan / jebol / Sliding
Tanggul Kali Mekuris di Ds. Sumberan,
Kec. Kauman. Pada banjir Tgl. 20 Feb. 2010

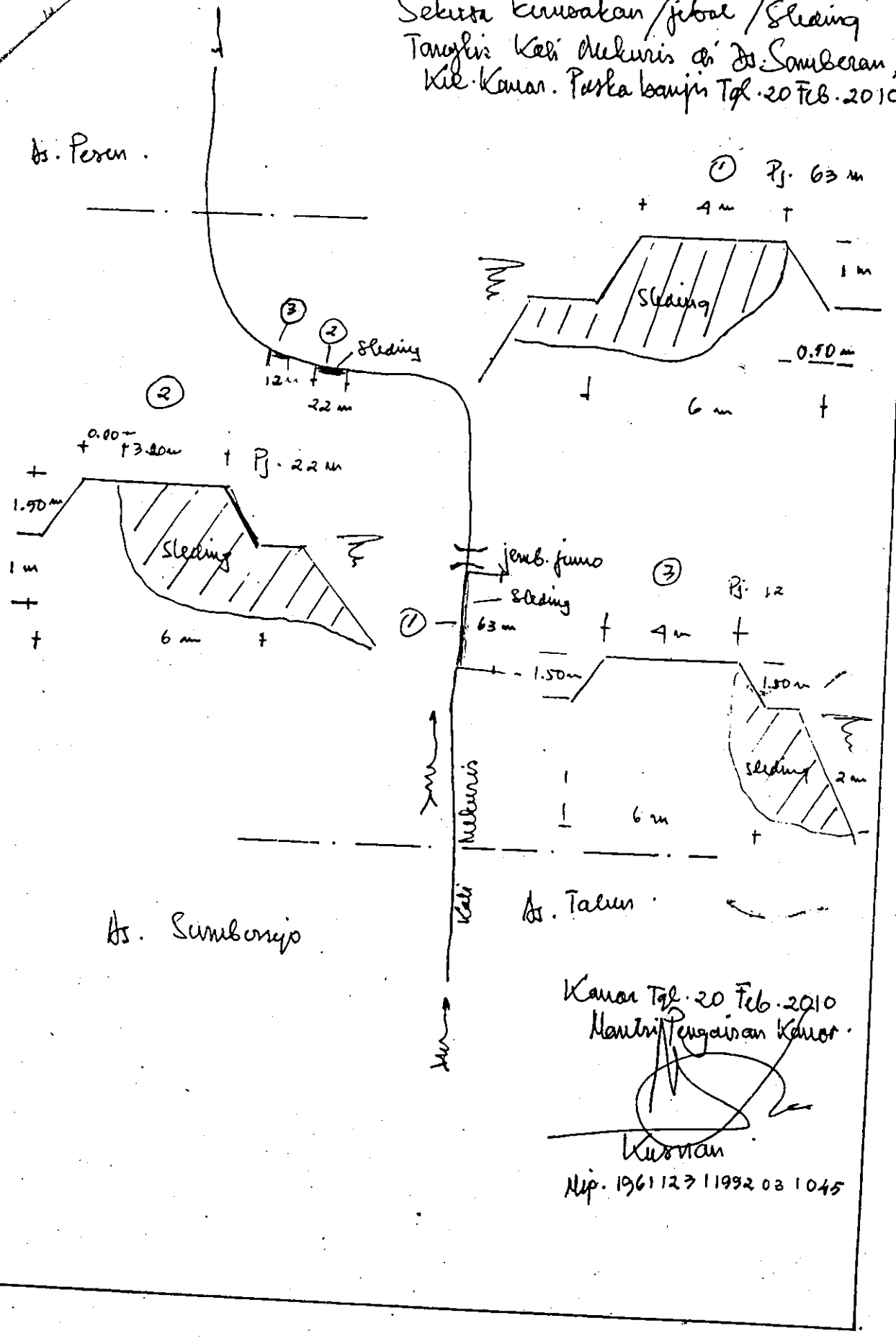

Kauman Tgl. 20 Feb. 2010
Mantri Pengairan Kauman.

Kusnan
Nip. 19611231 199203 1045

PETA KECAMATAN KANOR

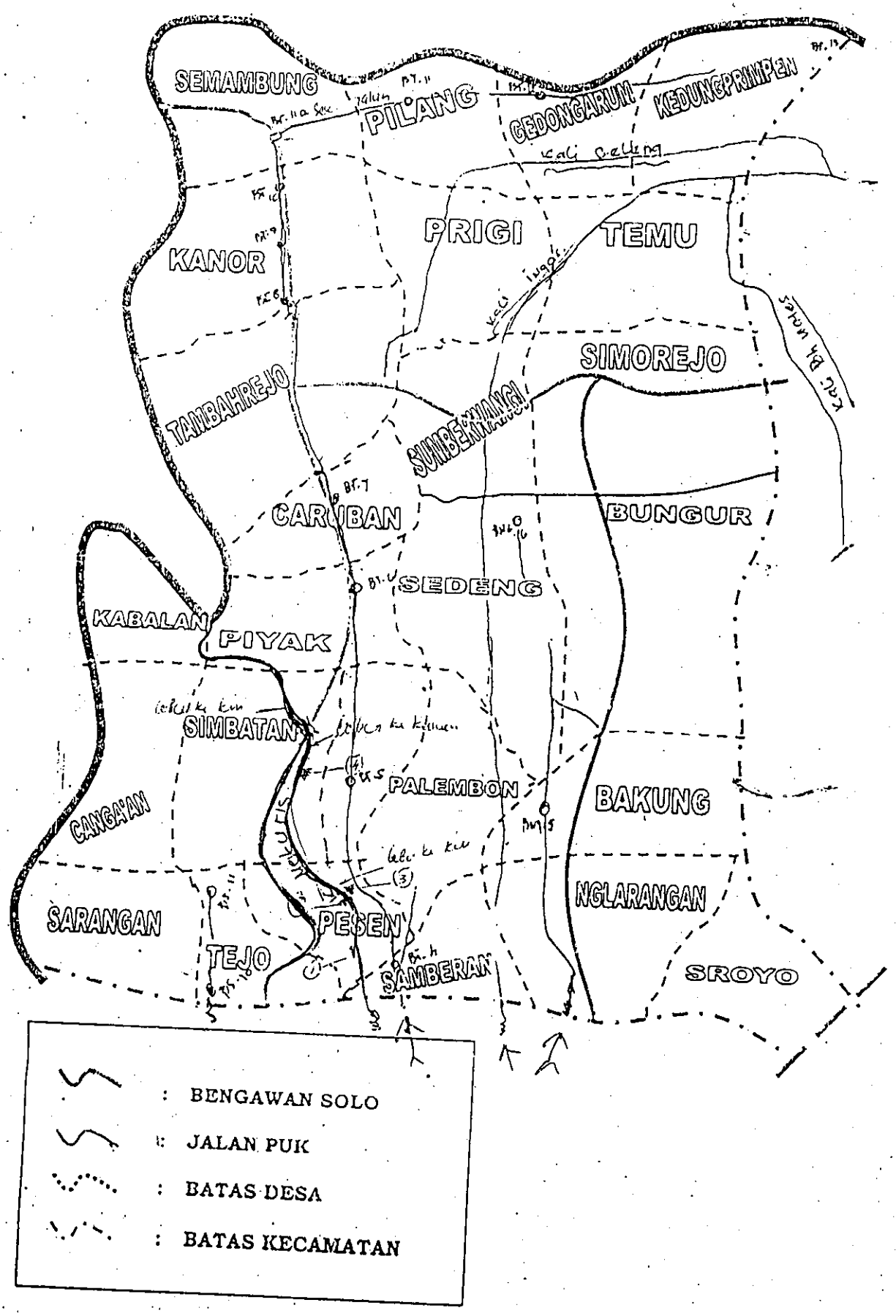

Bantuan yg telah di terima th. 2009.

Dari : Bupati Bojonegoro ; Dari mahagana Jatim dan lain-lain
Untuk : Korban Bencana Alam Banjir Bengawan Solo.

1. Sembako : 400 paket (tgl. 05. maret 2009).
2. Sak/karong plastik : 5000 buah (tgl 27-2-2009).
3. Beras
4 kecap
5 air mineral
6 mie Instan
7 minyak goreng
8 ikan asin
9 makanan bayi
10 Biskuit besar
11. minyak kayu putih
12 minyak telon
13 sabeb gatal-gatal
14 Balpirik
15 Sarden
16 mie
17 Pembalut (shotek)
18 Abon sapi
19 Terpal plastik
20 selimut
21. Sarung.

- Mohon maaf belum bisa merekap bantuan yg telah diterima di kec. kanor, masih banyak bantuan yg belum bisa mengebutkan satu-per satu karena ada yang langsung kepada para korban.

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. Telepon (0353) 881826
BOJONEGORO

Nomor : 061 / 32 / 217.412 / 2009
Sifat : Penting/segera
Lampiran : --
Perihal : **Pemberitahuan Pembentukan BPBD Kab. Bojonegoro**

Bojonegoro, 06 Oktober 2009

Kepada
Yth. Sdr.1. Dinas/ Bagian/Badan/Kantor/Instansi Vertikal
2. Camat se Kabupaten Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro serta dengan telah dilantiknya Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 14 Agustus 2009, dengan ini di beritahukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk dengan susunan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

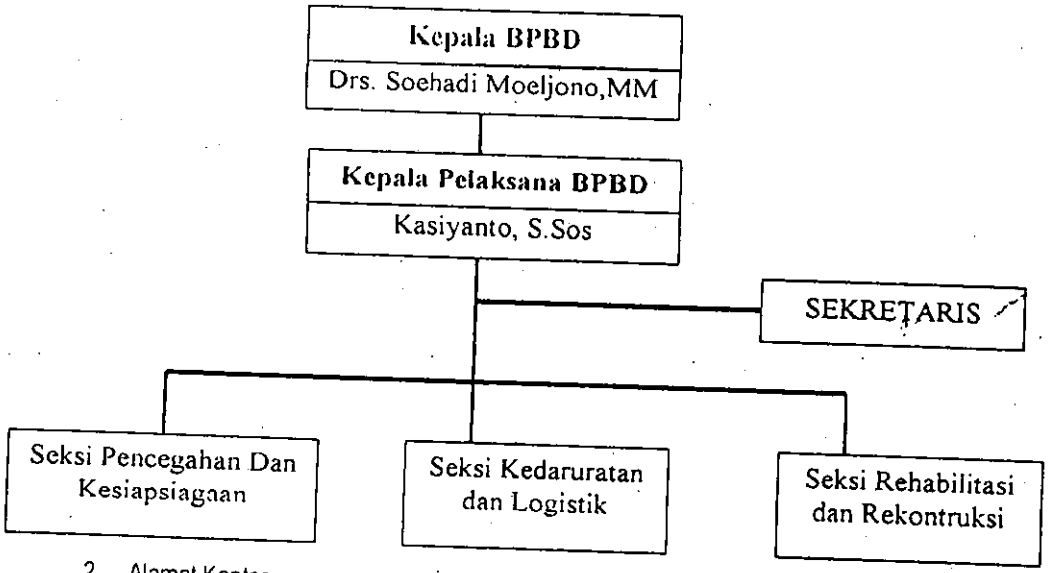

2. Alamat Kantor : Jalan Mas Tumapel No. 1 (0353) 881826 Bojonegoro
3. Contoh Stampel :

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Demikian untuk diketahui dan menjadikan periksa

A.n. BUPATI BOJONEGORO
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jl. Raya Kanor No. 01 Telp. (0353) 331468
KANOR

Kanor, 14 Maret 2008

Nomor : 360 / 272 / 412.52.2 / 2008
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Bencana Alam Banjir 2008

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

Berdasarkan hasil laporan Kepala Desa yang wilayahnya dilanda bencana alam banjir sejak tanggal 10 Maret 2008 di Kecamatan Kanor dan hasil pengamatan di lokasi bencana oleh unit Penanggulangan Bencana dan Penggungsi (PBP) Kecamatan Kanor tanggal 10 Maret 2008 sampai dengan tanggal 14 Maret 2008.

Selanjutnya kami laporkan dengan hormat, bahwa kejadian bencana alam banjir di Kecamatan Kanor adalah akibat luapan air Bengawan Solo mulai tanggal 10 Maret 2008, sedangkan tanggul irigasi milik negara, tanggul Desa dan badan jalan PUK di Desa Kanor yang baru diperbaiki belum kuat, sedangkan langkah yang sudah kami lakukan serta dampak yang perlu kami laporkan sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 10 Maret 2008 sampai 13 Maret 2008 dilaksanakan kerja Bakti masyarakat dari 6 (enam) Desa, yaitu pengurukan tanah dengan cara pengisian tanah dalam karung plastik sejumlah ± 20.000 lembar untuk peninggian bibir badan jalan dan tanggul irigasi serta tanggul Desa.
2. Kerja Bakti masyarakat mulai pagi sampai malam hari dengan jumlah ribuan warga, dan dilakukan penjagaan oleh warga terhadap titik yang rawan putus.
3. Permohonan karung plastik / zak kepada satkorlak PBP Kabupaten Bojonegoro realisasi sejumlah 11.000 lembar, dan bantuan partisifasi masyarakat Kecamatan Kanor sejumlah 9.000 lembar sebagaimana alokasi pendistribusian, data terlampir.
4. Karena ketahanan tanggul dan badan jalan PU di Desa Kanor dengan beberapa upaya tersebut tidak mampu menahan luapan air Bengawan solo, akhirnya pada tanggal 13 Maret 2008 pukul 05.00 WIB. Badan jalan sepanjang 40 Meter putus dan membawa dampak kerugian bidang pertanian di 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Kanor, Semambung, Pri[illegible], Gedong arum, Kedung primpen, dan Pilang, sebagaimana data [illegible]r (kondisi tanam padi ke – 2).

5. Perlu kami sampaikan data Rumah tergenang, pengungsi dan Rumah hilang, tanggul putus dan lain-lain sebagai data terlampir.
6. Di Desa Kanor ada 14 (Empat belas) titik badan jalan yang rawan putus yang baru selesai dalam perbaikan oleh Pemkab Bojonegoro secara darurat dan 3 (tiga) titik tanggul Desa yang putus di Desa Semambung sebagaimana data terlampir.

Berkaitan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati untuk dapatnya memprioritaskan pembangunan tanggul dan badan jalan yang putus akibat luapan air bengawan solo yang terjadi pada bulan Januari 2008 dan bulan Maret 2008, dalam usaha untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat petani, memperlancar transportasi perhubungan, perekonomian demi tercapainya masyarakat yang benar-benar sejahtera lahir dan batin.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT KANOR

H. SUHONO,SH. CN. MM.
Pembina
NIP. 510 111 449

Tembusan :
Yth.
1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro.
2. Sdr. Kepala Badan Kesbanglinmas Kab. Bojonegoro.
3. Sdr. Kepala Badan KB dan Kesos Kab. Bojonegoro.
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro.
5. Sdr. Kepala Dinas PU Kab. Bojonegoro.
6. Sdr. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro.
7. Sdr. Kepala Pengelola Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro.
8. Sdr. Ketua Pengurus Cabang PMI Kab. Bojonegoro.

DATA : **INFRASTRUKTUR JALAN YANG DILANDA BENCANA ALAM BANJIR AKIBAT LUAPAN AIR BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR SEJAK TANGGAL 11 MARET 2008 S.D. 13 MARET 2008**

No	Desa	Jalan PUK		Jalan Desa (Dusun)		Tanggul putus / longsor		Taksir kerugian (Rp) dalam ribuan	Keterangan
		Putus (m)	Tergenang (m)	Putus (m)	Tergenang (m)	Tanggul irigasi Negara (m)	Tanggul desa (m)		
1.	Kanor	40	-	-	4500	40	-	850.000	- 1 (satu) titik putus berdampak bidang pertanian : Ds. Pilang, Semambung, Prigi, Temu, Gedongarum,Kedungprimpm pada tanam padi ke2 - 3 (tiga) ttik putus Ds. Semambung - Longsor 7 (tujuh) titik, luber 4 (empat) titik Ds. Tambahrejo - 6 (enam) titik longsor, 4 (empat) titik luber Ds. Sarangan - 1 (satu) titik longsor dan luber 1 (satu) titik Ds. Cangaan - Longsor 250 meter dan putus 90 meter - putus 25 meter dan luber 40 meter - longsor - sungai afur ingas Desa Temu tanggul kurang tinggi - Air saat ini terus berangsur-angsur surut
2.	Semambung	-	-	-	1500	-	500	260.000	
3.	Tambahrejo	-	-	-	-	-	248	6.000	
4.	Sarangan	-	-	-	1200	-	200	12.000	
5.	Cangaan	-	-	-	-	-	15	4.000	
6.	Pilang	-	-	-	1500	-	340	200.000	
7.	Gedongarum	-	-	-	2000	-	65	50.000	
8.	Kedungprimpm	-	-	-	-	-	50	30.000	
9.	Temu	-	-	-	2000	-	100	80.000	
10.	Piyak	-	1200	-	1800	-	-	-	
	Jumlah	40	1200	-	14500	40	1418	1.492.000	

Kanor, 14 Marert 2008
CAMAT KANOR

H. SUHONO, SH, CN, MM.
Pembina
NIP. 510 111 449

DAFTAR : PENERIMAAN BANTUAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARUNG PLASTIK DAN TERPAL PLASTIK
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN KANOR
SEJAK TANGGAL 10 MARET 2008 S.D. 14 MARET 2008

No	Asal Bantuan	Tanggal Penerimaan	Jenis dan Jumlah Barang		Pendistribusian			Keterangan
			Karung Plastik (lembar)	Terpal Plastik (lembar)	Desa	Jumlah		
						Karung Plastik (lembar)	Terpal Plastik (lembar)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) Kab. Bojonegoro	10 Maret 2008	500		Kanor	500		- Untuk penanggulangan tanggul irigasi milik negara dan jalan PU di Desa Kanor - Penanggulangan tanggul milik desa akibat luapan air Bengawan Solo di Desa Tambahrejo, Cangaan, dan Sarangan.
		11 Maret 2008	1000		Kanor	500		
					Sarangan	400		
		11 Maret 2008	4000		Cangaan	100		
					Kanor	3700		
					Sarangan	200		
		12 Maret 2008	2000		Tambahrejo	500		
		12 Maret 2008		10	Kanor	2000		
					Kanor		8	
		12 Maret 2008	2500		Tambahrejo		2	
					Sarangan	250		
					Tambahrejo	300		
		12 Maret 2008	1500		Kanor	1450		
					Sarangan	250		
					Kanor	1000		
2	Swadaya masyarakat (Desa Gedongarum, Kanor, Prigi, Bakung, Temu, Sumberwangi, dan Pilang)	10 s.d. 13 Maret 2008	8500		Tambahrejo	250		
					Kanor	8500		
	Jumlah		20.000	10		20.000	10	

Kanor, 14 Marert 2008
CAMAT KANOR

H. SUHONO, SH, CN, MM.
Pembina
NIP. 510 111 449

DATA : RUMAH DAN FASILITAS UMUM YANG TERGENANG AKIBAT LUAPAN AIR BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR SEJAK TANGGAL 10 MARET 2008 S.D. 13 MARET 2008

No	Desa yang dilanda banjir	Jumlah Penduduk		Rumah tergenang		Jumlah rumah hilang		Jumla pengungsi		Fasilitas umum tergenang					Keterangan
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	Masjid	Mushola	Balai desa	Gedung sekolah SD	Gedung sekolah MI	
1.	Kanor	848	3042	523	2000	1	4	100	300	3	11	-	-	-	Kondisi air sudah berangsur-angsur surut dan tidak da korban jiwa
2.	Semambung	550	2500	400	2165	-	-	-	-	2	-	1	2	1	
3.	Kabalan	599	2475	525	2475	-	-	-	-	3	15	1	1	1	
4.	Temu	1060	3834	100	400	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
5.	Prigi	827	2897	323	961	-	-	-	-	-	5	-	1	-	
6.	Pilang	630	2110	250	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Gedongarum	717	2656	40	120	-	-	-	-	1	6	-	-	1	
8.	Piyak	286	1141	200	825	-	-	25	100	-	-	-	-	-	
9.	Simbatan	555	2017	70	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Cangaan	600	2650	60	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Sarangan	317	1235	35	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Kedungprimpen	770	2990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Tambahrejo	715	3170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		8474	32717	2626	10747	1	4	125	400	9	36	2	4	3	

Kanor, 14 Marert 2008
CAMAT KANOR

H. SUHONO, SH, CN, MM.
Pembina
NIP. 510 111 449

LAPORAN : BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN KANOR
KEADAAN TANGGAL : 10--14 MARET 2008

No	Desa	Jenis Tanaman			Umur Tanaman (HSS/HST)			Lahan Tergenang Banjir (Ha)												Kerugian (000) (Rp)
								Padi				Jagung				Palawija				
		Padi	Jagung	Palawija	Padi	Jagung	Palawija	R	S	B	P	R	S	B	P	R	S	B	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Cangaan	71			60				71											426.000
2	Piyak	10			30				10											40.000
3	Tambahrejo	4	10		50	30			4				10							64.000
4	Kanor	120			14				120											360,000
5	Pilang	180			30				180											720.000
6	Tejo	60			45				60											360.000
7	Sarangan	35			15				35											105.000
8	Kabalan	50	15		20	30			50				15							210.000
		75			Prsm				75											112.500
9	Simbatan	80	20		30	40			80				20							400.000
10	Semambung	135			30				135											540.000
11	Gedongarum	300			30				300											1200.000
12	Kedungprimpen	275			30				275											1100.000
13	Temu	200			30				200											800.000
14	Prigi	120			30				120											480.000
	Jumlah	1.715	45						1.715				45							6.917.500

Keterangan : R : ringan
S : sedang
B : berat
P: puso

Kanor, 14 Maret 2008
CAMAT KANOR

H. SUHONO, SH, CN, MM.
Pembina
NIP. 510 111 449

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jalan Raya Kanor Nomor 01 Telepon (0353) 331468
K A N O R

Kanor, 23 April 2007

Nomor : 360 / 4627 412.52.2 / 2007
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Kejadian Bencana Alam Banjir Bengawan Solo.

K e p a d a
Yth. Bupati Bojonegoro
di-
BOJONEGORO.

Menindaklanjuti hasil koordinasi Tim Unit Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kecamatan Kanor pada tanggal 23 April 2007 dengan Kepala Desa yang wilayahnya tergenang air akibat luapan air Bengawan Solo.

Berkaitan hal tersebut, bersama ini kami laporkan bahwa mulai hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sampai dengan 23 April 2007 di Kecamatan Kanor terjadi bencana alam banjir sebagaimana data terlampir, selanjutnya mohon bantuan karung plastik sebanyak 1000 (seribu) zak.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT KANOR

H. SUHONO, SH, CN, MM
Pembina
NIP. 510 111 449

Tembusan:
Yth. 1. Kepala Badan Kesbanglinmas Kab. Bojonegoro
2. Kepala Badan KB dan Kesos Kab. Bojonegoro
3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro
4. Kepala Dinas PU Kab. Bojonegoro
5. Ketua Pengurus Cabang PMI Kab. Bojonegoro
6. Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro

LAPORAN : BANJIR BENGAWAN SOLO DI WILAYAH KECAMATAN KANOR KEADAAN 23 APRIL 2007

	Desa	Sawah (Ha)	Pekarangan (Ha)	Perumahan (KK)	Masjid / mushola (buah)	Jalan		Jenis Tanaman						Lama Tergenang (hari)	Taksir Kerugian (Rp)	Keterangan
						PUK (m)	Desa (m)	Padi (Ha)	Umur (hari)	Jagung (Ha)	Umur (hari)	Lain/ Plwj (Ha)	Umur (hari)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kanor	35	-	18	-	-	4.000	2	7	-	-	-	-	3	1.000.000	
2	Piyak	40	23	67	2	750	1.500	- 11 - 8	50 75	-	-	15	60	3	262.000.000	- Ketinggian air genangan di jalan desa ±50 cm, di jalan PU ±25 cm.
3	Kabalan	115	-	75	-	-	3.000	115	60	25	30	Terong (5 Ha)	60	3	1.275.000.000	
4	Simbatan	64	15	-	-	200	-	64	25	3	30	Ketela R (1Ha)	60	3	104.250.000	
5	Tejo	40	-	-	-	-	-	40	20	-	-	-	-	3	-	
6	Sarangan	-	-	10	-	-	-	-	-	15	50	-	-	3	135.000.000	
7	Cangaan	65	-	-	-			65	70			-	-	3	585.000.000	
8	Semambung	1	-	-	-	-	-	1	7	5	7	-	-	3	4.000.000	- Tanggul dalam keadaan kritis ±50 m (tidak putus), saat ini dilakukan pengurukan dengan karung berisi tanah.
9	Kedungprimpen	65	-	-	-	-	-	65	65	-	-	-	-	3	325.000.000	- Tanggul Apur Ringas putus 1 m
10	Pilang	3	-	-	-	-	-	3	75	-	-	-	-	3	32.400.000	
11	Gedongarum	10	-	-	-	-	-	10	45	5	65	-	-	-	135.000.000	
Jumlah		438	38	170	2	950	8.500	374	-	53	-	21	-	-	2.858.650.000	Banjir di Kecamatan Kanor akibat luapan air Bengawan Solo dan hujan deras di wilayah hulu.

Kanor, 23 April 2007
CAMAT KANOR

H. SUHONO, SH, CN, MM
Pembina
NIP. 510 111 449

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KANOR
Jalan Raya Kanor Nomor 01 Telepon 331468
K A N O R

Kanor, 2 Maret 2009

Nomor : 360/218 / 412.51.10 / 2009
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Laporan bencana alam banjir

K e p a d a
Yth. Bp. Bupati Bojonegoro
di-
BOJONEGORO

Bersama ini kami laporkan dengan hormat data bencana alam banjir akibat luapan air Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor keadaan mulai tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 2 Maret 2009 , sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT KANOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 010 228 405

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro
3. Sdr. Kepala Balai PSDA Wilayah Bengawan Solo Bojonegoro
4. Sdr. Kepala Bakesbanglinmas Kab. Bojonegoro
5. Sdr. Kepala Disnakertransos Kab. Bojonegoro
6. Sdr. Ketua PMI Cabang Bojonegoro
7. Sdr. Kapolsek Kanor
8. Sdr. Danramil Kanor

Sampai dengan Pukul 18.00 WIB

LAPORAN : DATA BENCANA ALAM BANJIR AKIBAT LUAPAN AIR BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR MULAI TANGGAL 25 FEBRUARI S.D. 01 MARET 2009

No	Desa	Rumah Tergenang		Rumah		Tanaman Tergenang			Taksir Kerugian Tanaman Padi & Palawija (dalam ribu Rp)	Jalan Tergenang		Saluran Irigasi rusak (m)	Tanggul Longsor / Pecah (m)	Taksir Kerugian (dalam ribu Rp)	Fasilitas Umum yang Tergenang					Pengungsi		Ket
		KK	Jiwa	Hanyut	Rusak	Padi (Ha)	Jagung (Ha)	dll.		PU (m)	Desa (m)				Masjid	Musholla	Balai Desa	Sekolah		KK	Jiwa	
																		SD/MI	SMP/MTs			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Piyak	286	1.141	-	2	-	-	-	-	1.500	3.250	1.500	-	-	1	3	1	2	-	76	225	
2	Simbatan	345	1.570	-	-	120	-	20	180.000	1.500	4.000	-	-	-	2	6	1	1	1	25	105	
3	Kanor	575	2.650	-	1	150	-	-	-	-	4.000	100	-	-	3	4	-	2	1	325	748	
4	Semambung	560	2.132	1	-	-	-	3	-	600	3.700	1.000	25	-	2	5	-	3	-	25	87	
5	Tambahrejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
6	Kabalan	537	2.044	-	-	25	-	-	75.000	-	3.000	2.000	-	-	2	7	1	2	-	-	-	
7	Sarangan	334	997	-	-	-	-	-	-	-	6.500	-	-	-	2	7	1	1	1	22	96	
8	Cangaan	472	2.400	-	-	20	-	-	105.000	-	9.000	2.000	40	-	3	6	1	2		230	412	
9	Tejo	200	1.200	-	-	20	-	-	160.000	-	1.500	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	
10	Pilang	525	2.155	1	2	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	2	6	-	2	-	325	904	
11	Kedungprimpen	145	543	-	-	50	-	-	75.000	-	2.850	20	-	-	1	2	-	2	-	70	356	
12	Palembon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Sedeng	30	107	-	-	25	-	-	37.500	-	300	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
14	Temu	1.055	3.787	-	-	40	-	-	60.000	-	9.000	-	-	-	2	28	-	3	-	-	-	
15	Gedongarum	560	2.400	1	4	50	-	-	75.000	-	1.700	-	10	-	1	-	1	2	1	500	1.700	
16	Prigi	756	2.145	-	-	20	-	-	200.000	-	8.500	-	-	-	2	1	-	2	-	284	1.240	
17	Pesen	-	-	-	-	20	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
18	Simorejo	112	463	-	-	125	-	-	1.000.000	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Sumberwangi	125	-	-	-	55	-	-	440.000	2.000	1.100	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	
	Jumlah	**6.617**	**25.734**	**3**	**9**	**720**	**-**	**23**	**2.607.500**	**5.600**	**62.350**	**7.720**	**75**	**-**	**24**	**77**	**7**	**30**	**12**	**1.882**	**5.873**	

Kanor, 01 Maret 2009
CAMAT KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos,M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 010 228 405

LAPORAN : **DATA BENCANA ALAM BANJIR AKIBAT LUAPAN AIR BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR KEADAAN TANGGAL 02 MARET 2009**

Sampai dengan Pukul 10.00 WIB

No	Desa	Rumah Tergenang		Rumah		Tanaman Tergenang			Taksir Kerugian Tanaman Padi & Palawija (dalam ribu Rp)	Jalan yang pernah tergenang		Saluran Irigasi rusak (m)	Tanggul Longsor / Pecah (m)	Taksir Kerugian (dalam ribu Rp)	Fasilitas Umum yang Tergenang					Pengungsi		Ket
		KK	Jiwa	Hanyut	Rusak	Padi (Ha)	Jagung (Ha)	dll.		PU (m)	Desa (m)				Masjid	Musholla	Balai Desa	Sekolah SD/MI	Sekolah SMP/MTs	KK	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Piyak	22	83	-	2	-	-	-	-	1.500	3.250	1.500	-	-	1	3	1	2	-	-	-	
2	Simbatan	-	-	-	-	120	-	20	180.000	1.500	4.000	-	-	-	2	6	1	1	1	-	-	
3	Kanor	-	-	-	1	150	-	-	-	-	1.500	100	-	-	-	4	-	-	1	-	-	
4	Semambung	450	1.332	2	-	-	-	3	-	600	3.700	1.000	100	-	2	5	-	3	-	-	-	
5	Tambahrejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
6	Kabalan	-	-	-	-	25	-	-	75.000	-	3.000	2.000	-	-	2	7	1	2	-	-	-	
7	Sarangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	2	7	1	1	1	6	18	
8	Cangaan	-	-	-	-	20	-	-	105.000	-	3.000	-	50	-	3	6	1	2		-	-	
9	Tejo	-	-	-	-	20	-	-	160.000	-	1.500	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	
10	Pilang	325	1.040	1	2	-	-	-	-	1.500	4.000	-	-	-	1	12	-	2	-	-	-	
11	Kedungprimpen	100	431	-	-	50	-	-	75.000	200	2.850	20	-	-	1	6	-	2	-	-	-	
12	Palembon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Sedeng	-	-	-	-	25	-	-	37.500	-	300	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
14	Temu	855	2.785	-	-	40	-	-	60.000	-	9.000	-	-	-	2	28	-	3	-	100	275	
15	Gedongarum	30	130	1	4	50	-	-	75.000	-	1.700	-	10	-	1	-	1	2	1	-	-	
16	Prigi	385	1.645	-	-	20	-	-	200.000	3.000	3.500	-	-	-	2	14	-	2	-	100	225	
17	Pesen	-	-	-	-	20	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
18	Simorejo	-	-	-	-	125	-	-	1.000.000	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Sumberwangi	-	-	-	-	55	-	-	440.000	2.000	1.100	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	
	Jumlah	**2.167**	**7.446**	**4**	**9**	**720**	**-**	**23**	**2.607.500**	**10.300**	**46.350**	**5.720**	**160**	**-**	**20**	**100**	**7**	**28**	**12**	**206**	**518**	

Kanor, 02 Maret 2009
CAMAT KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos,M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 010 228 405

LAPORAN : **DATA BENCANA ALAM BANJIR AKIBAT LUAPAN AIR BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR KEADAAN TANGGAL 02 MARET 2009**

Sampai dengan Pukul 10.00 WIB

No	Desa	Rumah Tergenang		Rumah		Tanaman Tergenang			Taksir Kerugian Tanaman Padi & Palawija (dalam ribu Rp)	Jalan yang pernah tergenang		Saluran Irigasi rusak (m)	Tanggul Longsor / Pecah (m)	Taksir Kerugian (dalam ribu Rp)	Fasilitas Umum yang Tergenang					Pengungsi		Ket
		KK	Jiwa	Hanyut	Rusak	Padi (Ha)	Jagung (Ha)	dll.		PU (m)	Desa (m)				Masjid	Musholla	Balai Desa	Sekolah SD/MI	Sekolah SMP/MTs	KK	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Piyak	22	83	-	2	-	-	-	-	1.500	3.250	1.500	-	-	1	3	1	2	-	-	-	
2	Simbatan	-	-	-	-	120	-	20	180.000	1.500	4.000	-	-	-	2	6	1	1	1	-	-	
3	Kanor	-	-	-	1	150	-	-	-	-	1.500	100	-	-	-	4	-	-	1	-	-	
4	Semambung	450	1.332	2	-	-	-	3	-	600	3.700	1.000	100	-	2	5	-	3	-	-	-	
5	Tambahrejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
6	Kabalan	-	-	-	-	25	-	-	75.000	-	3.000	2.000	-	-	2	7	1	2	-	-	-	
7	Sarangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	2	7	1	1	1	6	18	
8	Cangaan	-	-	-	-	20	-	-	105.000	-	3.000	-	50	-	3	6	1	2		-	-	
9	Tejo	-	-	-	-	20	-	-	160.000	-	1.500	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	
10	Pilang	325	1.040	1	2	-	-	-	-	1.500	4.000	-	-	-	1	12	-	2	-	-	-	
11	Kedungprimpen	100	431	-	-	50	-	-	75.000	200	2.850	20	-	-	1	6	-	2	-	-	-	
12	Palembon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Sedeng	-	-	-	-	25	-	-	37.500	-	300	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
14	Temu	855	2.785	-	-	40	-	-	60.000	-	9.000	-	-	-	2	28	-	3	-	100	275	
15	Gedongarum	30	130	1	4	50	-	-	75.000	-	1.700	-	10	-	1	-	1	2	1	-	-	
16	Prigi	385	1.645	-	-	20	-	-	200.000	3.000	3.500	-	-	-	2	14	-	2	-	100	225	
17	Pesen	-	-	-	-	20	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
18	Simorejo	-	-	-	-	125	-	-	1.000.000	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Sumberwangi	-	-	-	-	55	-	-	440.000	2.000	1.100	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	
	Jumlah	**2.167**	**7.446**	**4**	**9**	**720**	**-**	**23**	**2.607.500**	**10.300**	**46.350**	**5.720**	**160**	**-**	**20**	**100**	**7**	**28**	**12**	**206**	**518**	

Kanor, 02 Maret 2009
CAMAT KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos,M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 010 228 405

LAPORAN : **KRONOLOGIS JEBOLNYA TANGGUL AKIBAT LUAPAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KECAMATAN KANOR TAHUN 2009**

1. DESA CANGAAN

Pada malam hari, tanggal 26 Pebruari 2009 mulai pukul 19.30 WIB kenaikan air mulai terasa dan arusnya semakin kencang.

Pada pukul 06.30 WIB tanggal 27 Pebruari 2009 tanggul tembok yang terbuat dari batu bata dan cor di sebelah sekolah MTs Roudloh mulai ada tanda-tanda kebocoran, dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pada awalnya terjadi kebocoran air dan akhirnya jebol sepanjang 5 meter. Atas perintah Bapak Camat dikirimkan tenaga bantuan sukarelawan dari desa Tejo dan Desa Pesen serta 2 tenaga Teknis Pengairan, telah dicoba dengan pemasangan trucuk dari bambu tapi nampaknya kewalahan karena airnya benar-benar kencang, telah dicoba dengan pemasangan gedeg juga terpal tetapi air tetap menerobos dengan derasnya, para pekerja kewalahan mengahadapi derasnya arus air Bengawan Solo karena posisi tanggul yang jebol langsung pada tikungan sungai.

Tepat pukul 11.00 WIB karena derasnya arus maka panjang tanggul yang semula jebol 5 meter malah menjadi 50 meter, kami menyerah dengan kondisi ini. Untuk mengurangi derasnya arus air kami beri halangan-halangan berupa gedeg dengan terpal dan bambu dengan harapan arus yang ada tidak merusak bangunan disekitar jebolnya tembok penahan/tanggul.

Saat dilaporkan pada Rabu tanggal 26 Pebruari 2009 juga ada tanggul yang jebol sepanjang 5 meter, akan tetapi dapat ditangani dari pukul 03.00 pagi sampai dengan pukul 11.00 siang dengan melibatkan tenaga sukarelawan dari desa Kabalan, Tejo dan Pesen

2. DESA SEMAMBUNG

Pada tanggal 26 Pebruari 2009 didepan MI Roudloh terjadi kebocoran tanggul sepanjang 3 meter, dan dapat kami perbaiki.

Pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2009 arus Bengawan Solo mulai kencang dan kenaikan air Bengawan Solo sangat cepat sekali.

Pada pukul 04.30 WIB.

- Terjadi kebocoran dititik keep depan MI Roudloh, pancaran terobosan air sangat kencang sekali, segala upaya untuk penutupan tanggul yang bocor sudah kami laksanakan tapi kebocoran semakin besar.

Pukul 06.00 Wib

- Pasangan tanggul dari sak pasir, terpal dan batu kumbung akhirnya jebol sepanjang 5 meter, karena derasnya air tidak memungkinkan untuk dilakukan penutupan atas jebolnya tanggul tersebut, karena pekerja akan mendekati kebocoran tanggul tersebut serasa terlempar, karena begitu derasnya aliran arus Bengawan Solo.

- Dan saat ini jebolnya tanggul Bengawan Solo di depan MI Roudloh sepanjang 60 meter

- Luberan atas jebolnya tanggul tersebut akhirnya melebar sampai tanggul bagian timur yang berdekatan dengan jalan kecamatan antara Desa Semambung dengan jurusan Desa Pilang, karena volume air dan derasnya air Bengawan Solo akhirnya merusak jalan jurusan Semambung – Pilang termasuk memutuskan saluran irigasi desa

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kanor, 2 Maret 2009

CAMAT KANOR

JOKO PURNOMO, S.Sos, M.Si

Penata Tk.I

NIP. 010 228 405

PETA KECAMATAN LAREN

Kec. Laren Kab. Lamongan

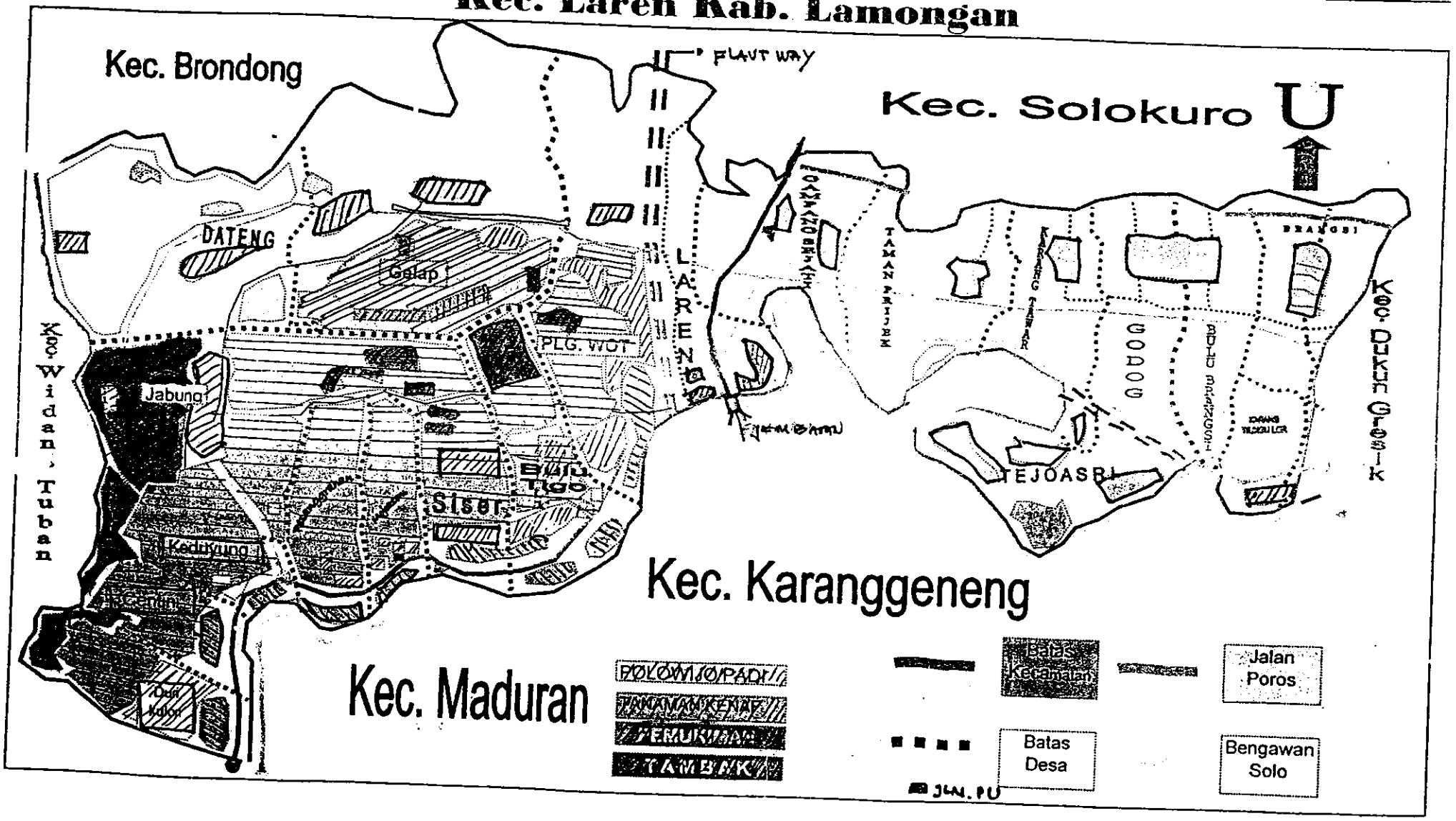

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAREN
Jalan Raya Laren No. 9 Telp. (0322) 312 845
LAREN

Salinan

KEPUTUSAN CAMAT LAREN
Nomor : 08 Tahun 2008

Tentang

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DANA PENANGANAN PENGUNGSI KECAMATAN LAREN TAHUN 2008

CAMAT LAREN

Menimbang : Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan guna mengoptimalkan satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (Satlak PBP) di kecamatan Laren, maka dipandang perlu membentuk satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kecamatan Laren dengan keputusan Camat.

Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dan propinsi.
2. Undang – undang Republik Indoneia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang badan koordinasi penanggulangan bencana dan peanaganan pengungsi.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1997 tentang Manajemen penanggulangan bencana di daerah.
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor .... Tahun 2001 tentang pembentukan satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kecamatan Laren dengan susunan anggota sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA :
1. Tugas satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi melaksanakan kegiatan di kecamatan Laren sesuai dengan kebijakan yang ditetapka oleh badan koordinasi nasional penanganan bencana.
2. Satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mempunyai fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas SATLAK PBP Kecamatan Laren.
3. Satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi berupaya melakukan pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan wilayah (penyuluhan).

KETIGA : Satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bertanggung jawab langsung kepada camat Laren.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LAREN
Tanggal : 3 Maret 2008

CAMAT LAREN

Ttd

RUSGIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan
5. Sdr. Kapolres Lamongan
6. Sdr. Anggota SATLAK PBP

Salinan sesuai dengan aslinya
An. CAMAT LAREN
Sekretaris Kecamatan

SUCIPTO,SH.MM
Pembina
NIP. 19571217 198003 1 007

Lampiran : Keputusan Camat Laren
Nomor 08 tahun 2008
Tanggal 3 Maret 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI KECAMATAN LAREN TAHUN 2008

1.	Penasehat	: MUSPIKA Laren
2.	Katua	: Sekcam Laren
3.	Wakil Ketua	: 1. KRPH Gampangsejati
		2. KRPH Gelap
4.	Laksar	: Kasi Trantib
5.	Sekretaris	: Usnandi Setiawan
6.	Bendahara	: Kasi Kesos
7.	Anggota	: 1. Kepala KUA Kecamatan Laren
		2. Kasi Pemerintahan Kecamatan Laren
		3. Kepala Pukesmas Kecamatan Laren
		4. Kacabdin Pertanian dan Kehutanan
		5. Kacabdin PKP
		6. Kacabdin PU. Pengairan
		7. Ketua Penggerak PKK Kecamatan Laren

Ditetapkan di : LAREN
Tanggal : 3 Maret 2008

CAMAT LAREN

Ttd

RUSGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. CAMAT LAREN
Sekretaris Kecamatan

SUCIPTO,SH.MM
Pembina
NIP. 19571217 198003 1 007